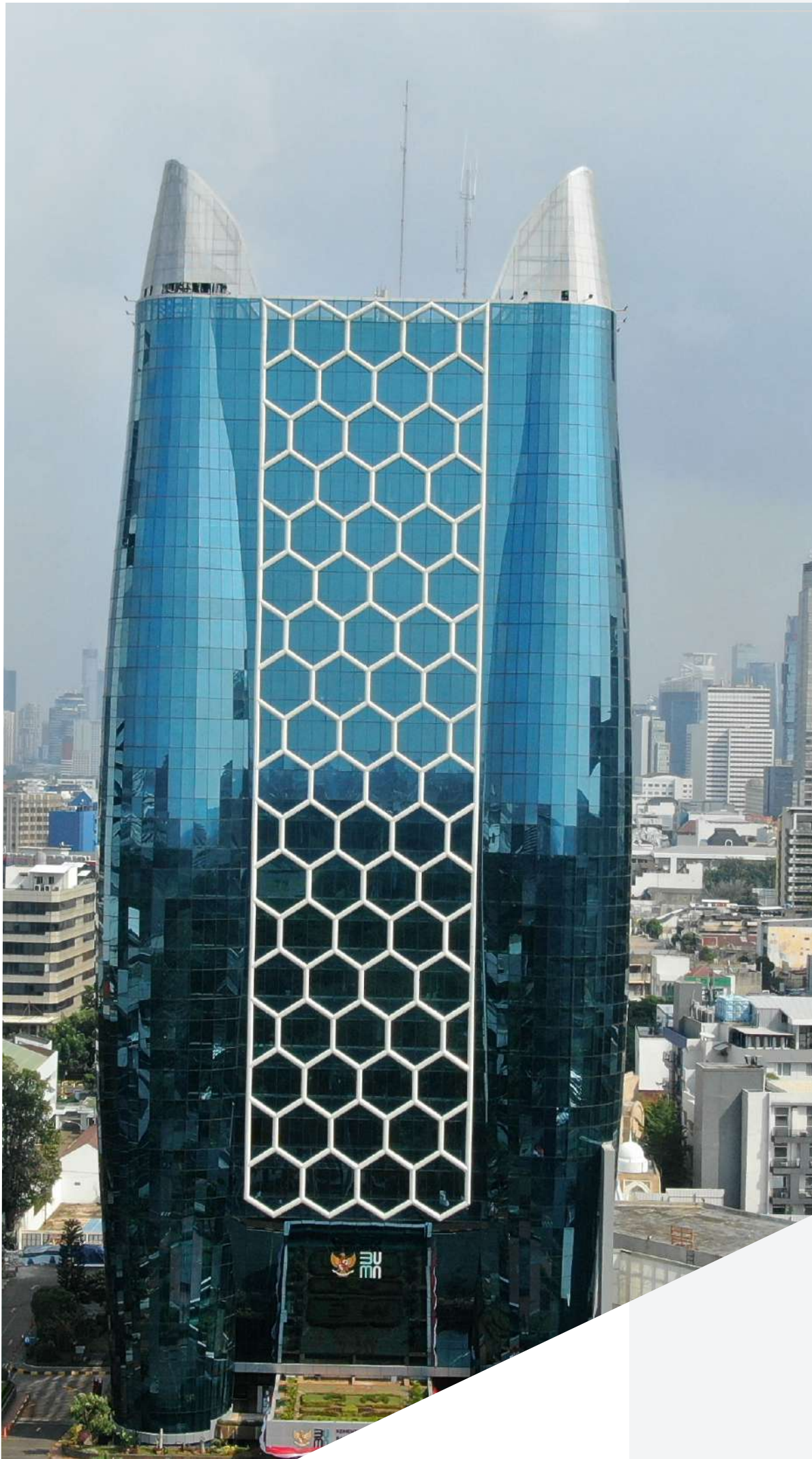




KEMENTERIAN
BADAN USAHA
MILIK NEGARA
REPUBLIK
INDONESIA

LAPORAN KINERJA 2023 KEMENTERIAN BUMN



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
KATA PENGANTAR	iv
PROFIL PEJABAT KEMENTERIAN BUMN	v
RINGKASAN EKSEKUTIF	viii
KALEIDOSKOP KEMENTERIAN BUMN TAHUN 2023	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi	2
B. Susunan Organisasi	3
C. Sistematika Pelaporan	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA	7
A. Rencana Strategis Tahun 2020-2024	8
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2023	11
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	14
A. Capaian Kinerja	15
B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	17
C. Realisasi Anggaran Kementerian BUMN	64
BAB IV PENUTUP	67
LAMPIRAN	68

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur kami ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga Kementerian BUMN dapat menjalankan program-program yang telah direncanakan pada tahun 2023 dengan baik dan menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Kementerian BUMN Tahun 2023.

Laporan Kinerja ini merupakan perwujudan implementasi akuntabilitas Kementerian BUMN atas kinerja dan anggaran yang telah ditargetkan pada tahun 2023. Di dalamnya terdapat gambaran mengenai target kinerja, pencapaian yang telah dicapai, hambatan dan tantangan yang dihadapi, serta upaya yang telah dilakukan, termasuk juga kinerja anggaran, kaleidoskop kegiatan, dan prestasi lainnya yang berhasil diraih sepanjang tahun 2023. Penyusunan laporan ini merujuk pada regulasi yang ada seperti Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 mengenai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis terkait Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2022 mengenai Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sepanjang Tahun 2023 ini, Kementerian BUMN terus bertransformasi dan berinovasi bersama BUMN dengan menerapkan 5 Prioritas Utama Kementerian BUMN dan berpedoman terhadap Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia sehingga BUMN tidak hanya memberikan nilai ekonomi kepada Indonesia, namun turut memberikan nilai sosial yang bermanfaat bagi rakyat Indonesia.

Kami sampaikan apresiasi kepada setiap Kementerian dan Lembaga, Stakeholders, dan seluruh lapisan masyarakat yang turut memberikan dukungan terhadap pencapaian kinerja Kementerian BUMN.

Turut disampaikan kepada segenap Pegawai Kementerian BUMN dan BUMN yang telah berkomitmen untuk menjalankan tugas dan kewajiban dengan baik, berintegritas serta menerapkan nilai AKHLAH dan BerAKHLAK dalam memberikan kontribusi yang luar biasa terhadap pencapaian kinerja Kementerian BUMN.

Kami menyadari bahwa penyusunan laporan ini belum mencapai kesempurnaan. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan masukan dan saran yang konstruktif untuk membantu kami mencapai target kinerja Kementerian BUMN di masa mendatang. Dengan adanya Laporan Kinerja ini, diharapkan peran strategis dari seluruh jajaran Kementerian BUMN dan BUMN dapat semakin ditingkatkan agar dapat mendukung kinerja secara mendalam mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.

Jakarta, Februari 2024
MENTERI
BADAN USAHA MILIK NEGARA



ERICK THOHIR

PROFIL PEJABAT KEMENTERIAN BUMN



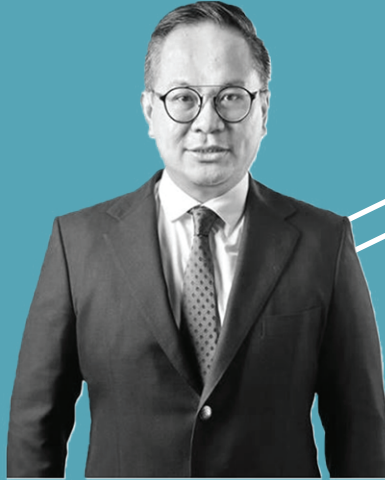
Erick Thohir

Menteri Badan Usaha Milik Negara

Lahir pada tanggal 30 Mei 1970, beliau ditunjuk sebagai Menteri BUMN sejak tanggal 23 Oktober 2019 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019–2014.

Erick Thohir meraih Bachelor of Arts dari *Glendale University* pada tahun 1991 dan menyelesaikan gelar *Master of Business Administration* dari *National University of California* pada tahun 1993.

Karir sebelum menjabat sebagai Menteri BUMN, antara lain adalah sebagai Direktur ANTV (2014), Komisaris Utama Mahaka Media, dan Ketua INASGOC Badan Pengelola Asian Games (2018).



Kartika Wirjoatmodjo

Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara

Lahir pada tanggal 18 Juli 1973. Ditunjuk sebagai Wakil Menteri BUMN II sejak tanggal 25 Oktober 2019 berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72/M Tahun 2019 tanggal 25 Oktober 2019.

Kartika Wirjoatmodjo meraih gelar sarjana di Bidang Akuntansi pada tahun 1996 dari Universitas Indonesia (UI) dan menyelesaikan gelar *Master of Business* di *Rotterdam School of Management*, Erasmus University pada tahun 2001.

Karir sebelum menjabat sebagai Wakil Menteri BUMN antara lain adalah sebagai Presiden Direktur PT Indonesia *Infrastructure Finance* (2011–2013), Kepala Eksekutif dan Anggota Dewan Komisiner Lembaga Penjamin Simpanan (2014–2015), Direktur *Finance & Strategy* PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (2015–2016), dan Direktur Utama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (2016–2019).



Rabin Indrajad Hattari

Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara

Lahir pada tanggal 26 Maret 1975. Ditunjuk sebagai Sekretaris Kementerian BUMN pada tanggal 24 Mei 2023 berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 62/TPA Tahun 2023. Sebelum menduduki posisi saat ini, beliau merupakan Staf Ahli Bidang Industri sejak 12 Januari 2021 berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11/TPA Tahun 2021 tanggal 12 Januari 2021. Pria yang banyak berkiprah di penulisan buku dan publikasi ilmiah ini berkarir di *Asian Development Bank* (ADB) Manila sejak tahun 2010 dengan posisi terakhir sebagai *Senior Economist, Regional Cooperation and Integration Division, Sustainable Development and Climate Change Department* (SDCC) (2019–2020). Beliau juga memiliki pengalaman sebagai *Analisis* di *The World Bank Washington DC* (2007–2010) dan *International Monetary Fund Washington DC* (2002–2007).

PROFIL PEJABAT KEMENTERIAN BUMN



Tedi Bharata

Deputi Bidang Sumber Daya Manusia, Teknologi, dan Informasi

Lahir pada tanggal 31 Mei 1983. Ditunjuk sebagai Deputi Bidang Sumber Daya Manusia BUMN, Teknologi dan Informasi Kementerian BUMN sejak 5 Agustus 2021 berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 112/TPA Tahun 2021 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kementerian BUMN.

Tedi Bharata meraih gelar Sarjana bidang Komputer dan Sistem Manajemen Informasi dari Universitas Pelita Harapan pada tahun 1992 tahun 2005 dan menyelesaikan *Master of Public Administration* di *Columbia University* pada tahun 2016.

Karir sebelum menjabat sebagai Deputi Bidang Sumber Daya Manusia BUMN, Teknologi dan Informasi Kementerian BUMN, antara lain menjabat sebagai Staf Khusus V Menteri BUMN (2021), *Vice President Office of The Board MIND ID* (2019 - 2020) dan *Investment Planning Manager - Telematic Industry* Badan Koordinasi Penanaman Modal (2016 - 2019).



Robertus Billitea

Deputi Bidang Hukum dan Perundang-Undangan

Lahir pada 4 Agustus 1966 ini meraih gelar S1 di Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana pada tahun 1990 dan gelar S2 di bidang yang sama dari Universitas Padjajaran pada tahun 2009.

Beliau dilantik sebagai Deputi Bidang Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan pada tanggal 7 September 2023 berdasarkan Surat Keputusan Presiden Nomor: 122/TPA Tahun 2023 tanggal 4 September 2023 tentang tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara. Sebelumnya, ia merupakan Direktur Utama PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)/IFG sejak 11 Februari 2020 hingga 14 Maret 2023. Ia juga menjadi Komisaris Utama PT Bahana Securities sejak 8 April 2020, Komisaris Independen PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. sejak 9 Desember 2019 hingga 14 Maret 2023, dan Komisaris PT Bahana Mitra Investa sejak 8 Juni 2020.



Nawal Nely

Deputi Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko

Lahir pada tanggal 12 Mei 1973. Ditunjuk sebagai Deputi Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko Kementerian BUMN sejak tanggal 4 Februari 2020 berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34/TPA Tahun 2020 tanggal 30 Januari 2020.

Nawal Nely meraih gelar sarjana di Bidang Akuntansi dari Universitas Gadjah Mada dan menyelesaikan *Executive Master of Business Administration* di INSEAD pada tahun 2019.

Karir sebelum menjabat sebagai Deputi Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko Kementerian BUMN antara lain adalah sebagai *Manager National Bank of Kuwait* (2005-2006), *Manager Ernst & Young - Doha* (2007-2008), *Senior Manager Ernsts & Young Egypt - Cairo* (2009-2010), dan *Partner Ernsts & Young Indonesia* (2010-2020).

PROFIL PEJABAT KEMENTERIAN BUMN



Andus Winarno
Staf Ahli Bidang Industri

Lahir di Kabupaten Kebumen, 14 September 1971, beliau meraih gelar Sarjana di Fakultas Ilmu Ekonomi Universitas Merdeka Malang, dan menyelesaikan pendidikan S2 di Fakultas Ilmu Hukum Universitas Indonesia pada tahun 2012.

Beliau dilantik sebagai Staf Ahli Bidang Industri berdasarkan Surat Keputusan Presiden Nomor: 122/TPA Tahun 2023 tanggal 4 September 2023 tentang tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara.

Karir sebelum menjabat Staf Ahli Bidang Industri antara lain, Asisten Deputi Bidang Manajemen Sumber Daya Manusia di Kementerian BUMN (2021-2023), Asisten Deputi Bidang Manajemen Sumber Daya Manusia Eksekutif BUMN (2019-2020), Asisten Deputi Data dan Teknologi Informasi (2016-2019), Kepala Bidang Kebijakan Sumber Daya Manusia Eksekutif BUMN (2015-2016), Kepala Bidang Kebijakan SDM Eksekutif BUMN (2014-2015), Kepala Bidang Usaha Industri Primer IIb (2013-2014), dan Kepala Bidang usaha Infrastruktur dan Logistik IIb (2010-2013).



Wahyu Setiawan
Staf Ahli Bidang Implementasi Kebijakan Strategis

Lahir di Jakarta, 9 September 1974, beliau meraih gelar Sarjana di Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya dan menyelesaikan pendidikan S2 di Fakultas Hukum, Niigata University pada tahun 2008. Beliau dilantik sebagai Staf Ahli Bidang Implementasi Kebijakan Strategis berdasarkan Surat Keputusan Presiden Nomor: 122/TPA Tahun 2023 tanggal 4 September 2023 tentang tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara.

Karir sebelum menjabat sebagai Staf Ahli Bidang Implementasi Kebijakan Strategis, antara lain Asisten Deputi Bidang Peraturan Perundang-Undangan (2020-2023), dan Kepala Bagian Peraturan Perundang-Undangan (2015-2020).



Loto Srinaita Ginting
Staf Ahli Bidang Keuangan dan Pengembangan UMKM

Lahir pada tanggal 7 Mei 1967. Ditunjuk sebagai Staf Ahli Bidang Keuangan dan Pengembangan UMKM Kementerian BUMN sejak tanggal 4 Februari 2020 berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34/TPA Tahun 2020 tanggal 30 Januari 2020.

Loto Srinaita Ginting meraih gelar sarjana di Bidang Ekonomi dari Universitas Indonesia pada tahun 1992 dan menyelesaikan *Master of Commerce in Economics* di University of New South Wales pada tahun 2000.

Karir sebelum menjabat sebagai Staf Ahli Bidang Keuangan dan Pengembangan UMKM Kementerian BUMN antara lain adalah sebagai Direktur Surat Utang Negara di Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan (2012 – 2015) dan Direktur Surat Utang di Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan (2015 – 2020).

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Kementerian BUMN Tahun 2023 merupakan implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Seluruh kebijakan yang dilaksanakan oleh Kementerian Badan Usaha Milik Negara selama tahun 2023 merupakan keberlanjutan dari kebijakan tahun 2022 dengan berbagai perbaikan dan berpedoman pada Rencana Strategis Kementerian BUMN Tahun 2020-2024 dalam rangka transformasi berkelanjutan untuk mendukung pencapaian seluruh visi dan misi Kementerian BUMN.

Dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja, Kementerian BUMN telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dengan 9 (sembilan) Sasaran Strategis (SS) dan 25 (dua puluh lima) Indikator Kinerja Utama (IKU). Dari hasil pengukuran realisasi terhadap 25 (dua puluh lima) IKU tersebut, dapat disimpulkan sebagai berikut:

Sebanyak 12 IKU berhasil terealisasi di atas 100% dari target;

Sebanyak 7 IKU berhasil terealisasi tepat 100% dari target;

Sebanyak 6 IKU terealisasi di bawah 100% dari target.

Kinerja Kementerian BUMN tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

TUJUAN I

MEWUJUDKAN KEMENTERIAN BUMN SEBAGAI PEMBINA DAN PENGAWAS BUMN YANG PROFESIONAL

Sasaran Strategis 1

Menciptakan SDM yang Unggul dan Profesional

No	SS/IKU	Target	Realisasi	Capaian
1	Peningkatan Indeks Profesionalitas ASN	84,00	84,65	100,77%
2	Produktivitas Tenaga Kerja BUMN	Rp6,96 miliar/orang	Rp7,61 miliar/orang	109,33%
3	Rasio Keterwakilan Perempuan dalam Direksi BUMN	25,00%	21,17%	84,68%
4	Rasio Keterwakilan Talenta Muda dalam Direksi BUMN	10,00%	9,85%	98,50%

Sasaran Strategis 2

Menciptakan organisasi yang kuat, sehat dan akuntabel

No	SS/IKU	Target	Realisasi	Capaian
5	Indeks E-Government (SPBE)	3,50	4,41	120,00%*
6	Opini BPK atas Laporan Keuangan Kementerian BUMN	WTP	WTP	120,00%**

TUJUAN II

MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN DAN KORPORATISASI BUMN

● Sasaran Strategis 3

Meningkatnya Tata Kelola BUMN sebagai Korporasi

No ▾	SS/IKU ▾	Target ▾	Realisasi ▾	Capaian ▾
7	Rasio BUMN dengan tingkat Kesehatan Kategori Sehat	70,00%	77,10%	110,14%
8	Persentase penyelesaian harmonisasi regulasi tata kelola BUMN	100,00%	100,00%	120,00%**
9	Tingkat Kepatuhan BUMN dalam menindaklanjuti Regulasi dan Kebijakan	100,00%	100,00%	120,00%**
10	Penyelesaian Deregulasi Peraturan Menteri BUMN (Omnibus Permen Kementerian BUMN)	100,00%	100,00%	120,00%**

● Sasaran Strategis 4

Penguatan Kapasitas BUMN

No ▾	SS/IKU ▾	Target ▾	Realisasi ▾	Capaian ▾
11	Jumlah BUMN dan Anak Usaha yang telah melakukan IPO	37 BUMN/Anak	37 BUMN/Anak	100,00%
12	Penyelesaian Restrukturisasi Hutang BUMN (RDI/SLA, Hutang tidak produktif, BUMN tidak sehat)	Rp3,02 triliun	Rp3,02 triliun	100,00%

TUJUAN III

MENINGKATKAN KEUNGGULAN DAN DAYA SAING BUMN

● Sasaran Strategis 5

Meningkatnya Daya Saing BUMN

No ▾	SS/IKU ▾	Target ▾	Realisasi ▾	Capaian ▾
13	Peningkatan Pasar BUMN ke Luar Negeri (Jumlah Negara)	48 Negara	98 Negara	120,00%*
14	BUMN yang telah mengimplementasikan roadmap transformasi digital / INDI 4.0	24 BUMN	24 BUMN	100,00%

● Sasaran Strategis 6

BUMN Unggul di Kancan Global

No ▾	SS/IKU ▾	Target ▾	Realisasi ▾	Capaian ▾
15	Jumlah BUMN yang masuk peringkat Global	5 BUMN	6 BUMN	120,00%
16	Pembentukan Holding BUMN	1 Holding	2 Holding	120,00%*

TUJUAN IV

MEMAKSIMALKAN KONTRIBUSI BUMN TERHADAP PEMBANGUNAN EKONOMI BERKELANJUTAN

● Sasaran Strategis 7

Meningkatnya Daya Saing BUMN

No ▾	SS/IKU ▾	Target ▾	Realisasi ▾	Capaian ▾
17	Kontribusi BUMN Kepada Negara (Dividen, Pajak, PNBPN)	Rp597,22 triliun	Rp459,21 triliun***	76,89%

● **Sasaran Strategis 8**
Kontribusi BUMN Sebagai Agen Pembangunan Nasional

No ▾	SS/IKU ▾	Target ▾	Realisasi ▾	Capaian ▾
18	Realisasi Belanja Modal (CAPEX)	Rp262,60 triliun	Rp182,88 triliun***	69,64%
19	Kontribusi BUMN pada Pengembangan Energi Baru Terbarukan	20,77%	91,17%	120,00%*
20	Persentase penyelesaian tahapan progress PSN untuk tahun 2023 di seluruh kluster BUMN Binaan Kementerian BUIVIN	100,00%	91,88%	91,88%
21	Persentase penyelesaian tahapan progress Proyek SDU untuk tahun 2023 di luar PSN	100,00%	91,15%	91,15%
22	Persentase perusahaan negara yang telah melakukan pengukuran metode <i>Social Return on Investment</i> (SROI)	60,00%	61,79%	102,98%
23	Persentase perusahaan negara yang telah melakukan kegiatan berkonsep <i>Creating Shared Value</i> (CSV)	70,00%	70,73%	101,04%

● **Sasaran Strategis 9**
Kontribusi BUMN dalam Peningkatan Value BUMN untuk Pemegang Saham

No ▾	SS/IKU ▾	Target ▾	Realisasi ▾	Capaian ▾
24	<i>Net Profit</i>	Rp196,22 triliun	Rp231,50 triliun***	117,78%
25	Kapitalisasi Saham BUMN	Rp2.215,00 triliun	Rp2.467,89 triliun	111,42%

RATA - RATA CAPAIAN

105,83%

Keterangan

* : Apabila % capaian di atas 120%, maka akan terhitung 120%.

** : Capaian Realisasi Maksimal, maka akan terhitung 120%

*** : Data Triwulan III Tahun 2023

Untuk mendukung capaian-capaian yang telah ditetapkan, Kementerian BUMN didukung dengan anggaran tahun 2023 yang dapat dirinci sebagai berikut:

No ▾	Unit Kerja ▾	Anggaran (Rp) ▾	Realisasi (Rp) ▾	% ▾
1	Wakil Menteri BUMN	12.685.205.000	12.652.485.132	99,74%
2	Sekretariat Kementerian BUMN	171.308.084.000	168.364.953.714	98,28%
3	Deputi Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko	19.184.699.000	18.931.396.793	98,68%
4	Deputi Bidang Hukum dan Perundang-Undangan	3.211.619.000	3.181.159.838	99,05%
5	Deputi Bidang Sumber Daya Manusia, Teknologi dan Informasi	35.135.561.000	34.944.185.168	99,46%
TOTAL		241.525.168.000	238.074.180.645	98,57%

KALEIDOSKOP

KEMENTERIAN BUMN TAHUN 2023

Selama Tahun 2023 Kementerian BUMN telah melalui berbagai momen bersama, berikut beberapa momen yang terekam:

x

2 Januari 2023 ▾



1. Pelantikan Sumpah PNS

11 Januari 2023 ▾



2. Pengarahan Menteri BUMN dan KPK

26 Januari 2023 ▾



3. Bazaar UMKM Untuk Indonesia

2 Februari 2023 ▾



4. MoU antara Kementerian BUMN dan Kementerian Kelautan dan Perikanan tentang Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

10 Februari 2023 ▾



5. Peresmian Pabrik NPK Pupuk Iskandar Muda

27 Februari 2023 ▾



6. Perjanjian Kerja Sama Kementerian BUMN dengan BEI

13 Maret 2023 ▾



7. Donor Darah dan Tali Asih Ramadhan 2023

15 Maret 2023 ▾



8. Ngopi Bareng BUMN

3 April 2023 ▾



9. Tanda Tangan Komitmen Pegawai

13 April 2023 ▾



10. Hari Ulang Tahun Kementerian BUMN

18 April 2023



11. Mudik Bersama Tahun 2023

3 Mei 2023



12. Syukuran 25th Kementerian BUMN

26 Mei 2023



13. Peresmian Gedung Danareksa

4 Juni 2023



14. Festival Purnama

12 Juni 2023



15. Launching Battery Asset Management Service IBC

10 Juli 2023



16. Testing LRT Jabodebek

8 Agustus 2023 ▼



17. Bedah Buku "Demotivasi" bersama Pegawai Kementerian BUMN

10-15 Agustus 2023 ▼



18. Semarak HUT-RI ke-78

17 Agustus 2023 ▼



19. Upacara HUT RI ke-78

11 September 2023 ▼



20. Penyaluran Bantuan Pemerintah bersama Perum Bulog

27 September 2023 ▼



21. Gotong Royong Bopong Pohon

2 Oktober 2023 ▼



22. Peresmian Kereta Cepat Jakarta Bandung

3 Oktober 2023 ▼



23. Pelatihan *Managing for Development Results* oleh Asian Development Bank

23 Oktober 2023 ▼



24. ASN Millennial Gathering

28 Oktober 2023 ▼



25. Peresmian BUMN School of Excellence

7-9 November 2023 ▼



26. Stewardship & Portfolio Management Training bersama Temasek di Singapura

29 November 2023 ▼



27. Event "After Office" Kementerian BUMN

5 Desember 2023 ▼



28. Apresiasi Mitra BUMN Champion 2023

13 Desember 2023 ▾



29. Peringatan Hari Ibu dan *Employee Well-Being Concern*

18 Desember 2023 ▾



30. Soft-Launching Daycare Kementerian
BUMN

BAB I

PENDAHULUAN

1



Badan Usaha Milik Negara/BUMN memiliki peran yang vital dalam mendukung perkembangan ekonomi dan sosial Indonesia, sesuai dengan ketentuan Pasal 33 Ayat 2 dan Ayat 3 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Pada Pasal tersebut pada intinya menekankan bahwa cabang-cabang produksi yang strategis untuk negara dan kebutuhan hidup masyarakat harus dikuasai oleh negara, serta sumber daya alam seperti tanah, air, dan kekayaan alam lainnya harus dikelola oleh negara untuk kemakmuran rakyat secara maksimal. Penguasaan ini tidak dimaksudkan untuk melakukan monopoli, tetapi untuk memastikan kebutuhan hidup semua warga negara Indonesia terpenuhi.

Pengurusan BUMN dilakukan oleh Menteri BUMN yang berkedudukan sebagai Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau wakil pemegang saham pada Persero dan pemilik pada Perusahaan Umum (Perum) sebagaimana tertuang pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pelimpahan Kedudukan, Tugas, dan Kewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan Perseroan (Persero), Perusahaan Umum (Perum), dan Perusahaan Jawatan (Perjan) kepada Menteri BUMN.

Sejalan dengan amanah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003, maksud dan tujuan pendirian BUMN antara lain:

1. Memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya;
2. Mengejar keuntungan;
3. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak;
4. Menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi; dan
5. Turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat.

Dalam melaksanakan amanah peraturan perundang-undangan tersebut, diperlukan adanya akuntabilitas kinerja yang baik dan memiliki budaya pelayanan yang kuat agar dapat berhasil dalam menjalankan program-program pembangunan yang strategis dan berdampak besar bagi masyarakat sehingga dapat memenuhi hakikat pendirian BUMN secara efektif. Bentuk akuntabilitas kinerja Kementerian BUMN salah satunya dapat tergambar pada Laporan Kinerja Kementerian BUMN yang setiap tahunnya ditetapkan oleh Menteri BUMN dan dilaporkan kepada Menteri Keuangan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, dan Reformasi Birokrasi (PANRB) dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Laporan kinerja mencerminkan komitmen organisasi dan pimpinan untuk menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dengan menyajikan informasi yang akurat dan terbuka kepada pemangku kepentingan. Dengan memperhatikan faktor tersebut, Kementerian BUMN berkomitmen untuk menyusun laporan kinerja yang informatif, relevan, dan bermakna bagi perkembangan dan pertanggungjawaban kinerja.

A. KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2019 tentang Kementerian BUMN, Kementerian BUMN memiliki kedudukan, tugas, dan fungsi sebagai berikut:

● KEDUDUKAN ▼

Kementerian BUMN berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kementerian BUMN dipimpin oleh Menteri BUMN dan dibantu oleh Wakil Menteri BUMN.

TUGAS

Kementerian BUMN mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang BUMN.

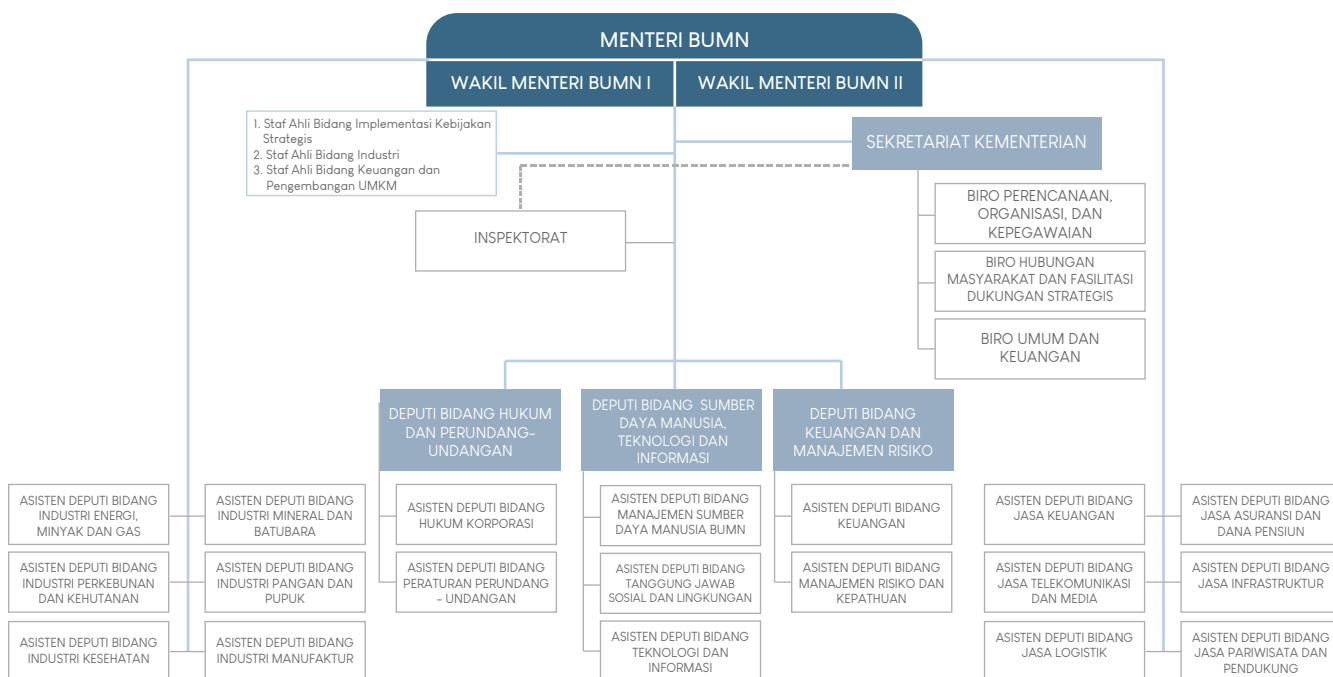
FUNGSI

Dalam melaksanakan tugasnya, Kementerian BUMN menyelenggarakan fungsi:

- Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pengembangan usaha, inisiatif bisnis strategis, penguatan daya saing dan sinergi, penguatan kinerja, penciptaan pertumbuhan berkelanjutan, restrukturisasi, pengelolaan hukum dan peraturan perundang-undangan, manajemen sumber daya manusia, teknologi dan informasi, keuangan dan manajemen risiko badan usaha milik negara;
- Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan usaha, inisiatif bisnis strategis, penguatan daya saing dan sinergi, penguatan kinerja, penciptaan pertumbuhan berkelanjutan, restrukturisasi, pengelolaan hukum dan peraturan perundang-undangan, manajemen sumber daya manusia, teknologi dan informasi, keuangan dan manajemen risiko badan usaha milik negara;
- Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
- Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Badan Usaha Milik Negara; dan
- Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara.

B. SUSUNAN ORGANISASI

Struktur Organisasi Kementerian BUMN berdasarkan Peraturan Menteri BUMN Nomor 4 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian BUMN ditetapkan sebagai berikut.



Berdasarkan Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-04/MBU/03/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian BUMN, Menteri BUMN dibantu oleh Wakil Menteri BUMN dan membawahi 4 (empat) Unit Kerja Eselon I. Adapun rincian tugas dan fungsi Wakil Menteri BUMN dan Unit Kerja sebagai berikut:

- **Wakil Menteri BUMN**

Selain membantu Menteri BUMN dalam memimpin pelaksanaan tugas Kementerian BUMN, Wakil Menteri BUMN juga melaksanakan sebagian tugas Kementerian BUMN yang meliputi:

- a. Perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan usaha, penyusunan inisiatif bisnis strategis, penguatan daya saing dan sinergi, penguatan kinerja, penciptaan pertumbuhan berkelanjutan, dan restrukturisasi badan usaha milik negara sektor Industri dan pendayagunaan portofolio perusahaan kepemilikan minoritas sektor Industri; dan
- b. Perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan usaha, penyusunan inisiatif bisnis strategis, penguatan daya saing dan sinergi, penguatan kinerja, penciptaan pertumbuhan berkelanjutan, dan restrukturisasi badan usaha milik negara sektor Jasa dan pendayagunaan portofolio perusahaan kepemilikan minoritas sektor Jasa.

Dalam melaksanakan sebagian tugas Kementerian BUMN, Wakil Menteri BUMN menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan di bidang pengembangan usaha, penyusunan inisiatif bisnis strategis, penguatan daya saing dan sinergi, penguatan kinerja, penciptaan pertumbuhan berkelanjutan, dan restrukturisasi badan usaha milik negara sektor Industri dan Jasa serta pendayagunaan portofolio perusahaan kepemilikan minoritas sektor Industri dan Jasa.
- b. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan usaha, penyusunan inisiatif bisnis strategis, penguatan daya saing dan sinergi, penguatan kinerja, penciptaan pertumbuhan berkelanjutan, dan restrukturisasi badan usaha milik negara sektor Industri dan Jasa serta pendayagunaan portofolio perusahaan kepemilikan minoritas sektor Industri dan Jasa;
- c. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan usaha, penyusunan inisiatif bisnis strategis, penguatan daya saing dan sinergi, penguatan kinerja, penciptaan pertumbuhan berkelanjutan, dan restrukturisasi badan usaha milik negara sektor Industri dan Jasa serta pendayagunaan portofolio perusahaan kepemilikan minoritas sektor Industri dan Jasa; dan
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

- **Sekretaris Kementerian BUMN**

Sekretariat Kementerian BUMN mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian BUMN.

Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat Kementerian BUMN menyelenggarakan fungsi:

- a. Koordinasi kegiatan Kementerian BUMN;
- b. Koordinasi dan Penyusunan rencana, program, dan anggaran Kementerian BUMN;
- c. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi Kementerian BUMN;
- d. Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- e. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum internal Kementerian BUMN;

- f. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa;
- g. Pengelolaan data dan informasi; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

- **Deputi Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko** ▼

Deputi Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang keuangan dan manajemen risiko BUMN.

Dalam melaksanakan tugasnya, Deputi Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan di bidang keuangan dan manajemen risiko BUMN;
- b. Koordinasi dan Sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang keuangan dan manajemen risiko BUMN;
- c. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang Keuangan dan Manajemen Risiko BUMN;
- d. Pengawasan atas kinerja, administratif, dan manajemen risiko BUMN; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

- **Deputi Bidang Hukum dan Perundang-Undangan** ▼

Deputi Bidang Hukum dan Perundang-Undangan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan hukum dan peraturan perundang-undangan BUMN.

Dalam melaksanakan tugas, Deputi Bidang Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan di bidang pengelolaan hukum dan peraturan perundang-undangan BUMN;
- b. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan hukum dan peraturan perundang-undangan BUMN;
- c. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan hukum dan peraturan perundang-undangan BUMN;
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

- **Deputi Bidang Sumber Daya Manusia, Teknologi, dan Informasi** ▼

Deputi Bidang Sumber Daya Manusia, Teknologi dan Informasi mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang manajemen sumber daya manusia, teknologi, dan informasi BUMN.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Deputi Bidang Sumber Daya Manusia, Teknologi, dan Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan di bidang manajemen sumber daya manusia, teknologi, informasi dan tanggung jawab sosial BUMN;
- b. Koordinasi dan Sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang manajemen sumber daya manusia, teknologi, informasi dan tanggung jawab sosial BUMN;

- c. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan kebijakan di bidang manajemen sumber daya manusia, teknologi, informasi dan tanggung jawab sosial BUMN;
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

C. SISTEMATIKA LAPORAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja Kementerian BUMN Tahun 2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

» BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum tugas, fungsi, dan struktur organisasi, serta mandat dan peran strategis Kementerian BUMN;

» BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan mengenai Renstra, Prioritas Nasional, Perjanjian Kinerja, dan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2023;

» BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bab ini disajikan informasi terkait pengukuran kinerja organisasi dan analisis atas capaian kinerja yang telah diperjanjikan pada tahun 2023, serta realisasi anggaran dikaitkan dengan pencapaian kinerja.

» PENUTUP

Berisi simpulan atas pencapaian kinerja, kendala, dan saran untuk perbaikan pencapaian kinerja berikutnya.

» LAMPIRAN

Berisi data-data lainnya yang diperlukan.



2

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024

Sebagai tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 memiliki peran strategis. Capaian atas RPJMN 2020-2024 akan menentukan apakah target pembangunan yang tertuang dalam RPJPN dapat tercapai, antara lain yaitu pendapatan per kapita Indonesia yang setara dengan negara-negara berpenghasilan menengah atas (*upper-middle income country/MIC*), kondisi infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.

Sesuai amanah RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Sasaran tersebut dicerminkan melalui Tema Pembangunan Nasional, yaitu Indonesia Berpenghasilan Menengah-Tinggi yang Sejahtera, Adil, dan Berkesinambungan.

Sejalan dengan sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 tersebut, Kementerian BUMN telah merumuskan visi misi Kementerian dalam suatu Rencana Strategis Kementerian BUMN Tahun 2020-2024.

VISI ▾



“Mewujudkan Kementerian BUMN yang andal, profesional, inovatif, dan berintegritas dalam pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.” Visi tersebut sekaligus menjadi manifestasi komitmen Kementerian BUMN untuk mendukung agenda nasional.

Sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo, terdapat lima hal utama yang menjadi fokus pembangunan selama 2020-2024, yaitu:

✓ Pembangunan Sumber Daya Manusia

Pembangunan dilakukan untuk menciptakan sumber daya manusia pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta didukung kerjasama industri dan talenta global.

✓ Pembangunan Infrastruktur

Fokus utama pembangunan infrastruktur adalah melanjutkan pembangunan proyek-proyek infrastruktur yang sudah ada, khususnya dalam rangka menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat.

✓ Penyederhanaan Regulasi

Untuk mendorong pembangunan, segala bentuk regulasi yang menghambat iklim bisnis dan investasi perlu disederhanakan. Salah satu pendekatan yang dipakai adalah melalui penerbitan *Omnibus Law*. Secara khusus, terdapat dua Undang-Undang yang menjadi target *Omnibus Law*, yaitu Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja dan Undang-Undang Pemberdayaan UMKM.

✓ Penyederhanaan Birokrasi

Penyederhanaan birokrasi dimaksudkan untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif dan kompetitif, yaitu dengan cara memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi.

✓ Transformasi Ekonomi

Pembangunan selama 5 (lima) tahun ke depan difokuskan untuk melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan sumber daya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sehubungan dengan arahan Presiden RI di atas, Kementerian BUMN selaku Kuasa Pemegang Saham BUMN senantiasa mengoptimalkan pembinaan BUMN agar dapat memberikan kontribusi maksimal pada pencapaian visi misi Presiden dan Wakil Presiden RI.

Rencana Strategis (Renstra) Kementerian BUMN tahun 2020 – 2024 ditetapkan berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025. Renstra Kementerian BUMN merupakan dokumen perencanaan untuk periode lima tahun dan merupakan acuan dalam perencanaan, pemrograman, penganggaran serta disusun berlandaskan tugas dan fungsi Kementerian BUMN.

MISI ▾



Untuk mewujudkan visi serta agenda pembangunan tersebut di atas, Kementerian BUMN melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden sebagai berikut:

1. Memberikan dukungan teknis dan administrasi serta analisis yang cepat, akurat dan responsif kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam bidang pembinaan dan pengawasan BUMN;
2. Meningkatkan kualitas SDM dan prasarana Kementerian BUMN;
3. Mendorong BUMN untuk berkontribusi optimal terhadap perekonomian Nasional dan memberikan nilai tambah untuk pemegang saham; dan
4. Mewujudkan pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya.

SASARAN STRATEGIS ▾



Sasaran strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Sasaran Strategis yang selanjutnya disingkat SS adalah pernyataan mengenai apa yang harus dimiliki, dijalankan, dihasilkan atau dicapai organisasi.

Dalam rangka mencapai Visi dan Misinya, Kementerian BUMN merumuskan 4 (empat) Tujuan yang menjadi dasar dalam penyusunan Sasaran Strategis Kementerian BUMN. Adapun empat tujuan tersebut adalah:

- a. Mewujudkan Kementerian BUMN Sebagai Pembina dan Pengawas BUMN yang Profesional;
- b. Mewujudkan Kemandirian dan Korporatisasi BUMN;
- c. Meningkatkan Keunggulan dan Daya Saing BUMN; dan
- d. Memaksimalkan Kontribusi BUMN Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan.

Dalam rangka mendukung pencapaian keempat tujuan tersebut, Kementerian BUMN kemudian menetapkan 9 (sembilan) SS yang merupakan kondisi yang diinginkan untuk dicapai oleh Kementerian BUMN pada tahun 2020-2024. Sembilan SS tersebut kemudian dijabarkan ke dalam 19 (sembilan belas) IKU.

MATRIKS KINERJA 2020-2024



Dalam mencapai Sasaran Strategis, Kementerian BUMN telah menyusun Matriks Kinerja yang tertuang dalam Renstra Kementerian BUMN 2020 – 2024 sebagaimana tabel berikut:

SS	IKU	Target Kinerja				
		2020	2021	2022	2023	2024
SS1 : Menciptakan SDM yang Unggul dan Profesional	Peningkatan Indeks Profesionalitas ASN	82,27	83,92	85,60	87,31	90,01
	Produktivitas tenaga kerja BUMN	3,07	3,16	3,25	3,35	3,45
	Rasio Keterwakilan perempuan dalam BOD/ BOC BUMN	9,00%	10,00%	11,00%	13,00%	15,00%
SS 2 : Menciptakan SDM yang Unggul dan Profesional	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Organisasi (SPBE)	3,00	3,10	3,20	3,30	3,40
	Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Kementerian BUMN	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
SS 3 : Meningkatnya Tata Kelola BUMN Sebagai Korporasi	Rasio BUMN dengan Tingkat Kesehatan Kategori Sehat	77,00%	79,00%	81,00%	82,00%	84,00%
	Harmonisasi Regulasi Tata Kelola BUMN	60,00%	70,00%	80,00%	90,00%	100%
	Tingkat Kepatuhan BUMN dalam Menindaklanjuti Regulasi dan Kebijakan	80,00%	85,00%	90,00%	95,00%	100%
SS 4 : Penguatan kapasitas BUMN	Jumlah BUMN dan Anak Usaha yang telah melakukan IPO	33 BUMN/ Anak	35 BUMN/ Anak	37 BUMN/ Anak	39 BUMN/ Anak	50 BUMN/ Anak
	Penyelesaian restrukturisasi hutang BUMN (RDI, SLA, hutang tidak produktif, BUMN tidaksehat)	15,00%	25,00%	50,00%	70,00%	80,00%
SS 5: Meningkatnya Daya Saing BUMN	Peningkatan pasar BUMN ke luar negeri (Jumlah Negara)	30 Negara	36 Negara	42 Negara	48 Negara	54 Negara
	Perbaikan level INDI 4.0 (Indonesia Industry 4.0 Readiness Index) BUMN/ anak	10 BUMN	13 BUMN	17 BUMN	22 BUMN	30 BUMN

SS	IKU	Target Kinerja				
		2020	2021	2022	2023	2024
SS 6: BUMN Unggul di Kancanah Internasional	Jumlah BUMN yang Masuk Peringkat Global	5 BUMN	5 BUMN	6 BUMN	6 BUMN	7 BUMN
	Pembentukan <i>Holding</i> BUMN	2 <i>Holding</i>	1 <i>Holding</i>	2 <i>Holding</i>	2 <i>Holding</i>	1 <i>Holding</i>
SS 7: Kontribusi BUMN terhadap penerimaan Negara (APBN)	Kontribusi BUMN kepada Negara (Dividen, Pajak, PNBP)	Rp365,53 triliun	Rp413,10 triliun	Rp472,72 triliun	Rp540,69 triliun	Rp682,50 triliun
SS 8: Kontribusi BUMN sebagai agen pembangunan nasional	Realisasi Belanja Modal (<i>Capex</i>) BUMN	Rp490,00 triliun	Rp532,00 triliun	Rp577,00 triliun	Rp627,00 triliun	Rp680,00 triliun
	Kontribusi BUMN pada pengembangan energi baru terbarukan	13,00%	14,70%	15,70%	16,80%	18,00%
SS 9: Kontribusi BUMN dalam peningkatan value BUMN untuk pemegang saham (Aset Negara)	<i>Net Profit</i>	Rp178,00 triliun	Rp199,00 triliun	Rp222,00 triliun	Rp248,00 triliun	Rp325,00 triliun
	Kapitalisasi Saham BUMN	Rp1.989,00 triliun	Rp2.198,00 triliun	Rp2.429,00 triliun	Rp2.684,00 triliun	Rp2.966,00 triliun

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Perjanjian Kinerja (PK) Kementerian BUMN berisikan komitmen Menteri BUMN dalam rangka pencapaian SS, IKU, dan target Kementerian BUMN sehingga Kinerja Kementerian BUMN menjadi lebih terukur. SS, IKU, dan target pada PK Kementerian BUMN Tahun 2023 diuraikan sebagai berikut:

TUJUAN I

MEWUJUDKAN KEMENTERIAN BUMN SEBAGAI PEMBINA DAN PENGAWAS BUMN YANG PROFESIONAL

- **Sasaran Strategis 1**
Menciptakan SDM yang Unggul dan Profesional

No	SS/IKU	Target
1	Peningkatan Indeks Profesionalitas ASN	84,00
2	Produktivitas Tenaga Kerja BUMN	Rp6,96 miliar/orang
3	Rasio Keterwakilan Perempuan dalam Direksi BUMN	25,00%
4	Rasio Keterwakilan Talenta Muda dalam Direksi BUMN	10,00%

- **Sasaran Strategis 2**
Menciptakan Organisasi yang Kuat, Sehat, dan Akuntabel

No ▾	SS/IKU ▾	Target ▾
5	Indeks E-Government (SPBE)	3,50
6	Opini BPK atas Laporan Keuangan Kementerian BUMN	WTP

TUJUAN II

MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN DAN KORPORATISASI BUMN

- **Sasaran Strategis 3**
Meningkatnya Tata Kelola BUMN sebagai Korporasi

No ▾	SS/IKU ▾	Target ▾
7	Rasio BUMN dengan tingkat Kesehatan Kategori Sehat	70,00%
8	Persentase penyelesaian harmonisasi regulasi tata kelola BUMN	100,00%
9	Tingkat Kepatuhan BUMN dalam menindaklanjuti Regulasi dan Kebijakan	100,00%
10	Penyelesaian Deregulasi Peraturan Menteri BUMN (Omnibus Permen Kementerian BUMN)	100,00%

- **Sasaran Strategis 4**
Penguatan Kapasitas BUMN

No ▾	SS/IKU ▾	Target ▾
11	Jumlah BUMN dan Anak Usaha yang telah melakukan IPO	37 BUMN/Anak
12	Penyelesaian Restrukturisasi Hutang BUMN (RDI/SLA, Hutang tidak produktif, BUMN tidak sehat)	Rp3,02 triliun

TUJUAN III

MENINGKATKAN KEUNGGULAN DAN DAYA SAING BUMN

- **Sasaran Strategis 5**
Meningkatnya Daya Saing BUMN

No ▾	SS/IKU ▾	Target ▾
13	Peningkatan Pasar BUMN ke Luar Negeri (Jumlah Negara)	48 Negara
14	BUMN yang telah mengimplementasikan roadmap transformasi digital / INDI 4.0	24 BUMN

- **Sasaran Strategis 6**
BUMN Unggul di Kancah Global

No ▾	SS/IKU ▾	Target ▾
15	Jumlah BUMN yang masuk peringkat Global	5 BUMN
16	Pembentukan Holding BUMN	1 Holding

TUJUAN IV

MENINGKATKAN KEUNGGULAN DAN DAYA SAING BUMN

- **Sasaran Strategis 7**
Meningkatnya Daya Saing BUMN

No ▾	SS/IKU ▾	Target ▾
17	Kontribusi BUMN Kepada Negara (Dividen, Pajak, PNBP)	Rp597,22 triliun

- **Sasaran Strategis 8**
Kontribusi BUMN Sebagai Agen Pembangunan Nasional

No ▾	SS/IKU ▾	Target ▾
18	Realisasi Belanja Modal (CAPEX)	Rp262,60 triliun
19	Kontribusi BUMN pada Pengembangan Energi Baru Terbarukan	20,77%
20	Persentase penyelesaian tahapan progress PSN untuk tahun 2023 di seluruh kluster BUMN Binaan Kementerian BUMN	100,00%
21	Persentase penyelesaian tahapan progress Proyek SDU untuk tahun 2023 di luar PSN	100,00%
22	Persentase perusahaan negara yang telah melakukan pengukuran metode <i>Social Return on Investment (SROI)</i>	60,00%
23	Persentase perusahaan negara yang telah melakukan kegiatan berkonsep <i>Creating Shared Value (CSV)</i>	70,00%

- **Sasaran Strategis 9**
Kontribusi BUMN dalam Peningkatan *Value* BUMN untuk Pemegang Saham

No ▾	SS/IKU ▾	Target ▾
24	<i>Net Profit</i>	Rp196,22 triliun
25	Kapitalisasi Saham BUMN	Rp2.215,00 triliun

BAB III
**AKUNTABILITAS
KINERJA**

3



Akuntabilitas kinerja Kementerian BUMN adalah bentuk pertanggungjawaban kinerja yang memuat realisasi dan tingkat capaian kinerja yang diperjanjikan. Pengukuran dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam PK dengan realisasinya.

A. CAPAIAN KINERJA

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah diperjanjikan. Adapun tingkat ketercapaian target-target Kementerian BUMN per Indikator disajikan sebagai berikut.

TUJUAN I

MEWUJUDKAN KEMENTERIAN BUMN SEBAGAI PEMBINA DAN PENGAWAS BUMN YANG PROFESIONAL

- **Sasaran Strategis 1**
Menciptakan SDM yang Unggul dan Profesional

No	SS/IKU	Target	Realisasi	Capaian
1	Peningkatan Indeks Profesionalitas ASN	84,00	84,65	100,77%
2	Produktivitas Tenaga Kerja BUMN	Rp6,96 miliar/orang	Rp7,61 miliar/orang	109,33%
3	Rasio Keterwakilan Perempuan dalam Direksi BUMN	25,00%	21,17%	84,68%
4	Rasio Keterwakilan Talenta Muda dalam Direksi BUMN	10,00%	9,85%	98,50%

- **Sasaran Strategis 2**
Menciptakan Organisasi yang Kuat, Sehat dan Akuntabel

No	SS/IKU	Target	Realisasi	Capaian
5	Indeks E-Government (SPBE)	3,50	4,41	120,00%*
6	Opini BPK atas Laporan Keuangan Kementerian BUMN	WTP	WTP	120,00%**

TUJUAN II

MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN DAN KORPORATISASI BUMN

- **Sasaran Strategis 3**
Meningkatnya Tata Kelola BUMN sebagai Korporasi

No	SS/IKU	Target	Realisasi	Capaian
7	Rasio BUMN dengan tingkat Kesehatan Kategori Sehat	70,00%	77,10%	110,14%
8	Persentase penyelesaian harmonisasi regulasi tata kelola BUMN	100,00%	100,00%	120,00%**
9	Tingkat Kepatuhan BUMN dalam menindaklanjuti Regulasi dan Kebijakan	100,00%	100,00%	120,00%**
10	Penyelesaian Deregulasi Peraturan Menteri BUMN (Omnibus Permen Kementerian BUMN)	100,00%	100,00%	120,00%**

- **Sasaran Strategis 4**
Penguatan Kapasitas BUMN

No ▾	SS/IKU ▾	Target ▾	Realisasi ▾	Capaian ▾
11	Jumlah BUMN dan Anak Usaha yang telah melakukan IPO	37 BUMN/Anak	37 BUMN/Anak	100,00%
12	Penyelesaian Restrukturisasi Hutang BUMN (RDI/SLA, Hutang tidak produktif, BUMN tidak sehat)	Rp3,02 triliun	Rp3,02 triliun	100,00%

TUJUAN III

MENINGKATKAN KEUNGGULAN DAN DAYA SAING BUMN

- **Sasaran Strategis 5**
Meningkatnya Daya Saing BUMN

No ▾	SS/IKU ▾	Target ▾	Realisasi ▾	Capaian ▾
13	Peningkatan Pasar BUMN ke Luar Negeri (Jumlah Negara)	48 Negara	98 Negara	120,00%*
14	BUMN yang telah mengimplementasikan roadmap transformasi digital / INDI 4.0	24 BUMN	24 BUMN	100,00%

- **Sasaran Strategis 6**
BUMN Unggul di Kancan Global

No ▾	SS/IKU ▾	Target ▾	Realisasi ▾	Capaian ▾
15	Jumlah BUMN yang masuk peringkat Global	5 BUMN	6 BUMN	120,00%
16	Pembentukan Holding BUMN	1 Holding	2 Holding	120,00%*

TUJUAN IV

MEMAKSIMALKAN KONTRIBUSI BUMN TERHADAP PEMBANGUNAN EKONOMI BERKELANJUTAN

- **Sasaran Strategis 7**
Meningkatnya Daya Saing BUMN

No ▾	SS/IKU ▾	Target ▾	Realisasi ▾	Capaian ▾
17	Kontribusi BUMN Kepada Negara (Dividen, Pajak, PNBPN)	Rp597,22 triliun	Rp459,21 triliun***	76,89%

- **Sasaran Strategis 8**
Kontribusi BUMN Sebagai Agen Pembangunan Nasional

No ▾	SS/IKU ▾	Target ▾	Realisasi ▾	Capaian ▾
18	Realisasi Belanja Modal (CAPEX)	Rp262,60 triliun	Rp182,88 triliun***	69,64%
19	Kontribusi BUMN pada Pengembangan Energi Baru Terbarukan	20,77%	91,17%	120,00%*
20	Persentase penyelesaian tahapan progress PSN untuk tahun 2023 di seluruh kluster BUMN Binaan Kementerian BUIVIN	100,00%	91,88%	91,88%
21	Persentase penyelesaian tahapan progress Proyek SDU untuk tahun 2023 di luar PSN	100,00%	91,15%	91,15%

22	Persentase perusahaan negara yang telah melakukan pengukuran metode <i>Social Return on Investment</i> (SROI)	60,00%	61,79%	102,98%
23	Persentase perusahaan negara yang telah melakukan kegiatan berkonsep <i>Creating Shared Value</i> (CSV)	70,00%	70,73%	101,04%

- **Sasaran Strategis 9**
Kontribusi BUMN dalam Peningkatan Value BUMN untuk Pemegang Saham

No	SS/IKU	Target	Realisasi	Capaian
24	Net Profit	Rp196,22 triliun	Rp231,50 triliun***	117,78%
25	Kapitalisasi Saham BUMN	Rp2.215,00 triliun	Rp2.467,89 triliun	111,42%

RATA - RATA CAPAIAN

105,83%

Keterangan

* : Apabila % capaian di atas 120%, maka akan dihitung 120%.

** : Pencapaian Realisasi Maksimal dihitung 120%

*** : Realisasi per triwulan III Tahun 2023

B.

EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Evaluasi dan analisis capaian kinerja masing-masing Sasaran Strategis (SS) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian BUMN Tahun 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut:

TUJUAN I

MEWUJUDKAN KEMENTERIAN BUMN SEBAGAI PEMBINA DAN PENGAWAS BUMN YANG PROFESIONAL

- **Sasaran Strategis 1**
Menciptakan SDM yang Unggul dan Profesional

No	SS/IKU	Target	Realisasi	Capaian
1	Peningkatan Indeks Profesionalitas ASN	84,00	84,65	100,77%
2	Produktivitas Tenaga Kerja BUMN	Rp6,96 miliar/orang	Rp7,61 miliar/orang	109,33%
3	Rasio Keterwakilan Perempuan dalam Direksi BUMN	25,00%	21,17%	84,68%
4	Rasio Keterwakilan Talenta Muda dalam Direksi BUMN	10,00%	9,85%	98,50%

1. INDEKS PROFESIONALITAS ASN ▼

Rumus Indikator Kinerja	Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023	Persen Capaian	
1	2	3	4	4/2	4/3
Asesmen Indeks Penilaian Profesionalitas ASN	83,19	84,00	84,65	101,76%	100,77%

Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN) adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan.

IP ASN diperoleh melalui evaluasi yang dilakukan oleh Deputi Bidang SDM Aparatur, Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi (PAN & RB) dan secara teknis dilaksanakan oleh Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian, Badan Kepegawaian Negara (BKN) berdasarkan Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara. Evaluasi IP ASN meliputi 4 (empat) dimensi dengan bobot yaitu:

a.	b.	c.	d.
Kualifikasi (25%)	Kompetensi (40%)	Kinerja (30%)	Disiplin (5%)

Nilai IP ASN didapat dari penjumlahan nilai tiap dimensi yang telah dikalikan dengan bobot masing-masing dimensi. Pedoman dalam perhitungan nilai tiap dimensi dan bobot masing-masing dimensi ditetapkan dalam Peraturan BKN Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara. Indeks Profesionalitas ASN merupakan hasil akhir dari penjumlahan nilai tertimbang dari seluruh dimensi. Hasil evaluasi IP ASN menggambarkan tingkat Profesionalitas ASN dengan nilai dan kategori sebagai berikut:

- | | |
|--|--|
| a. Nilai 91 – 100, kategori Sangat Tinggi; | d. Nilai 61 – 70, kategori Rendah; dan |
| b. Nilai 81 – 90, kategori Tinggi; | e. Nilai 0 – 60, kategori Sangat Rendah. |
| c. Nilai 71 – 80, kategori Sedang; | |

Adapun pada tahun 2023, terdapat penyesuaian cara perhitungan di setiap dimensi sebagaimana Surat Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian, BKN Nomor 006/B-BM.02.01/SD/C/2023 tanggal 22 Mei 2023 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2022. Penyesuaian ini salah satunya disebabkan karena adanya perubahan kebijakan pengelolaan kinerja ASN sebagaimana Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara.

Indeks profesionalitas ASN Kementerian BUMN pada tahun 2023 mengukur data yang tercatat pada Januari 2023. Jumlah pegawai yang diukur sebanyak 372 orang, terdiri dari 224 orang laki-laki dan 148 orang perempuan. Adapun nilai rata-rata pada setiap dimensi indeks profesionalitas ASN, yaitu dimensi kualifikasi sebesar 21,44 poin; dimensi kompetensi sebesar 34,42 poin; dimensi kinerja sebesar 25,83 poin; dan dimensi disiplin sebesar 4,96 poin. Nilai keseluruhan Indeks Profesionalitas ASN Kementerian BUMN untuk tahun 2023 yaitu sebesar 84,65 poin (kategori tinggi). Nilai realisasi ini lebih tinggi dari target tahun 2023 yaitu sebesar 84,00 poin, dan meningkat dari realisasi tahun 2022 yaitu sebesar 83,19 poin.

Faktor yang mendukung Pencapaian realisasi Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2023, yaitu:

- ✓ Perubahan pedoman pengukuran aspek kualifikasi dari yang sebelumnya sama untuk tiap jabatan menjadi berbeda berdasarkan syarat kualifikasi jabatan.
- ✓ Pelaksanaan program pengembangan yang mendukung pegawai untuk dapat mencapai 20 Jam Pelajaran dalam satu tahun.

Adapun tren pencapaian Indeks Profesionalitas ASN Kementerian BUMN sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 dibandingkan dengan target pada PK dan Renstra Tahun 2023 adalah sebagai berikut.

Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	2023		
			Target Renstra	Target PK	Realisasi
81,00	83,59	83,19	90,01	84,00	84,65

Selama 4 (empat) tahun terakhir, realisasi Indeks Profesionalitas ASN Kementerian BUMN memiliki tren yang meningkat, meskipun sempat terjadi penurunan pada tahun 2022 yang disebabkan adanya inpassing jabatan struktural ke jabatan fungsional pada tahun 2021. Tren yang meningkat selama 4 (empat) tahun terakhir ini menunjukkan bahwa usaha yang dilakukan oleh Kementerian BUMN dalam rangka meningkatkan profesionalitas ASN telah membuahkan hasil.

Dapat diinformasikan bahwa perbedaan target antara Renstra periode 2023 dengan Target Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dikarenakan adanya perbedaan asumsi yang digunakan saat penyusunan Target Renstra Tahun 2023 dimana pada tahun 2020 (saat penyusunan Renstra 2020-2024) masih menggunakan metode penilaian pada Peraturan yang lama dan belum mengasumsikan adanya rekrutmen ASN pada tahun 2022 yang turut andil dalam dinamika Indeks Profesionalitas ASN di Kementerian BUMN.

Pelaksanaan pengukuran Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2023 masih memiliki beberapa kendala yaitu perubahan metode pengisian data aspek kinerja dan kompetensi yang sebelumnya menggunakan SAPK BKN menjadi menggunakan SIASN Instansi dan hasil perhitungan IP ASN pada SIASN Instansi belum ter-update secara realtime. Hal-hal ini lah yang menjadi faktor yang menyebabkan pengukuran Indeks Profesionalitas ASN sempat tertunda.

Dalam pencapaian target Indeks Profesionalitas ASN di tahun 2023, Kementerian BUMN telah menargetkan 10 (sepuluh) Rencana Output (RO) dengan total anggaran sebesar Rp10 Miliar. Namun dengan adanya beberapa penyesuaian anggaran yang dilakukan, s.d. Desember 2023, Kementerian BUMN telah menyelesaikan seluruh RO dengan cukup menggunakan anggaran sebesar Rp7 Miliar sehingga efisiensi anggaran dalam pencapaian target dan output dapat dicapai.

Dengan memperhatikan kendala pengukuran yang dihadapi pada Tahun 2023, pada 2024 direncanakan akan dilakukan peningkatan terhadap program-program pencapaian Indeks Profesionalitas ASN, yaitu:

- Mencermati kebijakan yang mengatur pengukuran Indeks Profesionalitas ASN.
- Melakukan penyesuaian fokus indikator yang akan ditingkatkan dalam pencapaian tingkat profesionalitas ASN Kementerian BUMN.
- Melaksanakan program inisiatif seperti kerjasama BUMN dan Korporasi lainnya dalam rangka peningkatan pengembangan dan pelatihan Pegawai Kementerian BUMN.

2. PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA BUMN ▼

Rumus Indikator Kinerja	Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023	Persen Capaian	
1	2	3	4	4/2	4/3
Jumlah Pendapatan/Total Tenaga Kerja Tetap	Rp7,49 Milyar/Org	Rp6,96 Milyar/org	Rp7,61 Milyar/org	101,60%	109,33%

Pengukuran Produktivitas Tenaga Kerja dilakukan dengan cara membandingkan antara jumlah pendapatan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dibandingkan dengan jumlah tenaga kerja tetap pada BUMN.

Pada tahun 2023, produktivitas tenaga kerja BUMN ditargetkan sebesar Rp6,96 Milyar/Orang. Sampai dengan akhir tahun 2023, realisasi produktivitas tenaga kerja BUMN mencapai Rp7,61 Milyar/Orang atau tercapai 109,33% dari target.

Program kerja yang telah dilaksanakan dalam pencapaian produktivitas tenaga kerja BUMN pada tahun 2023 meliputi: Rekrutmen Bersama BUMN, Rekrutmen Diaspora, *Onboarding Directorship*, *Onboarding Commissioner*, *AKHLAK Culture Journey*, *CBDO School* dan lainnya.

Program-program dimaksud dilakukan di bawah koordinasi *Forum Human Capital Indonesia* sehingga masing-masing BUMN tidak perlu menyelenggarakan per entitas sehingga BUMN dapat lebih fokus dalam menjalankan operasional bisnis sesuai bidang usahanya.

Pada tahun 2024, program-program yang mendukung peningkatan kualitas SDM BUMN akan terus dilakukan melalui kolaborasi dengan FHCI dan BSE, seperti: Rekrutmen Bersama BUMN, Bakti Diaspora BUMN, MAGENTA, *Advanced Leadership Program*, *Functional Leadership Program*, dan *Thematic Learning Program*.

3. RASIO KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM DIREKSI BUMN ▼

Rumus Indikator Kinerja	Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023	Persen Capaian	
1	2	3	4	4/2	4/3
(BOD Perempuan di BUMN / Total BOD di BUMN) x 100%	15,80%	25,00%	21,17%	120,00%*	84,68%

Keterangan : Apabila % capaian di atas 120%, maka dihitung 120%*

Keterwakilan perempuan dalam jajaran Direksi BUMN merupakan salah satu parameter penciptaan lingkungan inklusif di BUMN. Dalam rangka mencapai target keterwakilan perempuan dalam jajaran Direksi BUMN, BUMN diminta untuk mengusulkan Top 20% Talentanya dengan mempertimbangkan pemenuhan target KPI terkait *Top Talent Perempuan* dan *Top Talent Muda*. Selain itu, secara intens Kementerian BUMN kembali berkoordinasi dengan Srikandi *Forum Human Capital Indonesia* (FHCI) BUMN untuk menjalankan program-program pengembangan bagi para talenta perempuan.

Pada tahun 2023, Kementerian BUMN menargetkan rasio keterwakilan perempuan dalam jajaran Direksi BUMN adalah sebesar 25%. Sampai dengan akhir tahun 2023, terdapat 58 (lima puluh delapan) orang Direksi Perempuan BUMN dari total 274 (dua ratus tujuh puluh empat) Direksi BUMN atau terealisasi sebesar 21,17%. Keterwakilan perempuan dalam jajaran Direksi BUMN menjadi prioritas Kementerian BUMN sebagai bagian dari Pengembangan Talenta (*Unleash Talent*).

Belum tercapainya target keterwakilan perempuan pada Direksi BUMN, antara lain disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

● *Management Commitment* ▼

Meskipun telah menjadi salah satu *Key Performance Indicator* bagi Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN yaitu “peningkatan *Nominated Talent Perempuan* dalam *Talent Pool* Kementerian BUMN”, sampai dengan akhir tahun 2023, hanya terdapat 20% talenta perempuan (203 orang) dari jumlah seluruh Talenta dalam *Talent Pool* Kementerian BUMN. Masih terbatasnya talenta-talenta perempuan dalam *Talent Pool* Kementerian BUMN mempengaruhi pada belum optimalnya jumlah/proporsi Direksi Perempuan BUMN. Hal mendasar yang masih perlu menjadi agenda dan komitmen bersama adalah membangun pilar-pilar talentship perempuan, yang mencakup: pola pikir (*mindset*), kapabilitas, dan lingkungan.

● *Women's Development Program* ▼

Program pengembangan talenta dan pimpinan perempuan belum menjadi program prioritas bagi sebagian besar BUMN. Program akselerasi suksesi juga belum sepenuhnya selaras dengan program *talent management* BUMN. Terobosan transformasi untuk mendorong kepemimpinan perempuan perlu dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan mengingat pengembangan talenta tidak hanya dilakukan pada manajemen puncak, namun harus dimulai secara berjenjang pada berbagai level kepemimpinan. Optimalisasi program *talent mobility* diharapkan dapat menjadi salah satu solusi dalam pemerataan sebaran talenta Perempuan di lingkungan Grup BUMN.

● Collective Enablers ▼

Kementerian BUMN berkomitmen untuk terus mendorong Grup BUMN dalam membangun budaya perusahaan yang inklusif, *zero tolerance on bullying, violence, and harassment*, serta *women and family friendly*. Salah satu kebijakan terkait hal tersebut adalah dengan menerbitkan Surat Edaran Menteri BUMN Nomor SE-3/MBU/04/2022 tentang Kebijakan Berperilaku Saling Menghargai di Tempat Bekerja (*Respectful Workplace Policy*) di Lingkungan Badan Usaha Milik Negara. Kebijakan tersebut belum diimplementasikan secara menyeluruh oleh BUMN, dan masih terdapat *room for improvement* untuk perbaikan berkelanjutan ke depan, termasuk melalui kolaborasi ekosistem Grup BUMN serta *community of practise* dalam bidang *women leadership*.

Beberapa Program dan inisiatif strategis yang telah dilaksanakan pada tahun 2023 untuk mendorong peningkatan kepemimpinan perempuan di Grup BUMN (BUMN Induk, anak dan cucu perusahaan BUMN) sebagai berikut:

1. Pembentukan Srikandi BUMN sebagai wadah profesional para pimpinan dan talenta perempuan BUMN;
2. Program pengembangan bagi talenta perempuan melalui kolaborasi dengan *global institution* (World Bank, ADB, INSEAD, dsb);
3. Penetapan kebijakan terkait *Respectful Workplace Policy*,
4. Menjadikan peningkatan *Nominated Talent* Perempuan sebagai salah satu KPI bagi Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN.

Terobosan transformasi untuk mendorong kepemimpinan perempuan tersebut perlu dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan mengingat pengembangan talenta tidak hanya dilakukan pada manajemen puncak, namun harus dimulai secara berjenjang pada berbagai jenjang kepemimpinan. Meskipun terdapat kendala, namun kepemimpinan perempuan masih terus didorong untuk dapat mencapai target yang ditetapkan, hal terpenting yang harus dipastikan adalah konsistensi pada masa yang akan datang untuk tetap mendorong talenta kepemimpinan perempuan pada masa yang akan datang.

Kebijakan dan program yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 untuk meningkatkan rasio keterwakilan perempuan dalam Direksi BUMN, antara lain adalah dengan mendorong peningkatan secara berkelanjutan eksistensi Talenta Perempuan dalam *Talent Pool* Kementerian BUMN, mengoptimalkan kolaborasi dengan mitra strategis khususnya Srikandi dan BUMN *School of Excellence* dalam penyusunan pipeline program pengembangan kepemimpinan Perempuan di Grup BUMN, meng-cascade target Direktur Perempuan ke level Anak dan Cucu Perusahaan BUMN masing-masing sebesar 15%, serta mengaktifasi *Talent Mobility Program* di grup BUMN dengan dukungan teknologi informasi yang terintegrasi.

Kementerian BUMN juga melakukan review dan kalibrasi ulang atas fokus area *Transformasi Human Capital* BUMN, termasuk di dalamnya *Fast-track Career Accelerator* untuk percepatan karir bagi talenta unggul perusahaan (HiPo) yang diintegrasikan melalui *Leadership Program*, *Talent Mobility* lintas BUMN, serta mendukung strategi *Diversity & Inclusion*.

4. RASIO KETERWAKILAN TALENTA MUDA DALAM DIREKSI BUMN ▼

Rumus Indikator Kinerja	Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023	Persen Capaian	
1	2	3	4	4/2	4/3
$\frac{\text{(BOD Talenta Muda di BUMN / Total BOD di BUMN)} \times 100\%}{100\%}$	9,20%	10,00%	9,85%	107,06%	98,50%

Kementerian BUMN menargetkan keterwakilan Talenta Muda dalam jajaran Direksi BUMN dengan tujuan untuk memberikan kesempatan bagi generasi muda untuk memimpin dan mendorong perubahan di BUMN. Kepemimpinan Talenta Muda dalam Direksi BUMN menjadi energi penggerak kemajuan & transformasi BUMN dengan tuntutan dunia usaha yang semakin kompetitif.

Pengukuran indikator kinerja ini dilakukan dengan membandingkan jumlah Direksi yang berusia ≤42 tahun dan yang diangkat pada saat berusia ≤42 tahun dibandingkan dengan Jumlah seluruh Direksi BUMN.

Pada tahun 2023, Kementerian BUMN menargetkan rasio keterwakilan Talenta Muda dalam jajaran Direksi BUMN adalah sebesar 10%. Talenta Muda yang dimaksud dalam indikator ini adalah Direksi BUMN yang berusia ≤42 tahun dan yang diangkat pada saat berusia ≤42 tahun. Sampai dengan akhir tahun 2023, terdapat 27 orang Talenta Muda Direksi BUMN dari total 274 Direksi BUMN atau terealisasi sebesar 9,85%.

Capaian keterwakilan Talenta Muda dalam jajaran Direksi BUMN salah satunya didukung oleh *Program Talent & Succession Management* yang berkelanjutan. Sejak tahun 2020, Kementerian BUMN telah melakukan penjangkaran talenta dengan meminta setiap BUMN untuk mengusulkan Top 20% BOD-1 kepada Kementerian BUMN. Dalam penyampaian talenta tersebut, BUMN diminta untuk mempertimbangkan pemenuhan target KPI terkait *Top Talent* Perempuan dan *Top Talent* Muda sebagaimana ditetapkan dalam Aspirasi Pemegang Saham.

Pada tahun 2023, Kementerian BUMN menargetkan rasio keterwakilan Talenta Muda dalam jajaran Direksi BUMN adalah sebesar 10%. Sampai dengan akhir tahun 2023, terdapat 27 orang Direksi BUMN dari total 274 Direksi BUMN atau terealisasi sebesar 9,85%.

Belum tercapainya target keterwakilan talenta muda pada Direksi BUMN, antara lain dikarenakan masih terbatasnya talenta-talenta muda dalam *Talent Pool* Kementerian BUMN. Pada tahun 2023, jumlah *Nominated Talent* Muda hanya terdapat 18% talenta muda (164 orang) dari seluruh *Nominated Talent* dalam *Talent Pool* Kementerian BUMN. Di samping itu, program akselerasi karir pegawai juga belum berjalan secara optimal dan merata pada seluruh BUMN. Program akselerasi suksesi belum sepenuhnya selaras dengan program *talent management* BUMN. Diperlukan adanya tambahan talenta muda dalam Top 20% Talenta BOD-1 pada setiap BUMN, sehingga calon kandidat sebagai Direksi yang diusulkan BUMN semakin lengkap dalam memenuhi kebutuhan suksesi Direksi BUMN, termasuk di dalamnya Direktur Muda BUMN.

Program kerja yang telah dilakukan pada tahun 2023 untuk mendukung capaian keterwakilan Talenta Muda dalam jajaran Direksi BUMN salah satunya didukung oleh *Program Talent & Succession Management* yang berkelanjutan. Setiap BUMN diminta untuk mengusulkan Top 20% BOD-1 kepada Kementerian BUMN. Dalam penyampaian talenta tersebut, BUMN diminta untuk mempertimbangkan pemenuhan target KPI terkait *Top Talent* Perempuan dan *Top Talent* Muda sebagaimana ditetapkan dalam Aspirasi Pemegang Saham/Pemilik Modal untuk penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP).

Pada tahun 2024, Program-program yang akan dilaksanakan untuk meningkatkan rasio keterwakilan talenta muda dalam Direksi BUMN, antara lain dengan mendorong peningkatan secara berkelanjutan eksistensi Talenta Muda dalam *Talent Pool* Kementerian BUMN, mengoptimalkan kolaborasi dengan mitra strategis khususnya BUMN Muda, BSE, dan Rumah BUMN dalam penyusunan *pipeline* program pengembangan kepemimpinan muda di Grup BUMN, menurunkan target Direktur Muda ke level Anak dan Cucu Perusahaan BUMN masing-masing sebesar 10%, serta mengaktivasi *Talent Mobility Program* di grup BUMN dengan dukungan teknologi informasi yang terintegrasi.

Kementerian BUMN juga melakukan review dan kalibrasi ulang atas fokus area Transformasi *Human Capital* BUMN, termasuk di dalamnya *Fast-track Career Accelerator* untuk percepatan karir bagi talenta unggul perusahaan (HiPo) yang diintegrasikan melalui *Leadership Program*, *Talent Mobility* lintas BUMN, serta mendukung strategi *Diversity & Inclusion*.

Sasaran Strategis 2

Menciptakan organisasi yang kuat, sehat dan akuntabel

No	SS/IKU	Target	Realisasi	Capaian
5	Indeks E-Government (SPBE)	3,50	4,41	120,00%*
6	Opini BPK atas Laporan Keuangan Kementerian BUMN	WTP	WTP	120,00%**

Keterangan

* : Apabila % capaian di atas 120%, maka akan terhitung 120%.

** : Pencapaian Nilai Maksimal, maka akan terhitung 120%

5. INDEKS E-GOVERNMENT (SPBE) ▼

Rumus Indikator Kinerja	Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023	Persen Capaian	
1	2	3	4	4/2	4/3
Hasil Asesmen SPBE	3,84	3,50	4,41	114,84%	120,00%*

Keterangan

* : Apabila % capaian di atas 120%, maka akan terhitung 120%.

SPBE berfungsi untuk mengukur akuntabilitas kinerja organisasi dalam penerapan teknologi informasi di Kementerian BUMN. Penerapan SPBE dinilai dengan metode tingkat kematangan SPBE yang merupakan kerangka kerja untuk mengukur derajat kematangan penerapan SPBE yang ditinjau dari kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE. Formula yang digunakan menggunakan nilai rata-rata dari setiap aspek/indikator penilaian tingkat kematangan teknologi informasi di Kementerian BUMN.

Tingkat kematangan SPBE terdiri atas 5 (lima) level, dimana masing-masing level menunjukkan karakteristik kematangan tertentu pada kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE. Penilaian Pemantauan SPBE didasarkan pada informasi yang diberikan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah melalui kegiatan penilaian mandiri dan penilaian dokumen. Domain dan aspek SPBE sebagai berikut:

DOMAIN DAN ASPEK	TOTAL BOBOT ▼
DOMAIN 1 - Kebijakan SPBE	13%
Aspek 1 - Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	13%
DOMAIN 2 - Tata Kelola SPBE	25%
Aspek 2 - Perencanaan Strategis	10%
Aspek 3 - Teknologi Informasi dan Komunikasi	10%
Aspek 4 - Penyelenggaraan SPBE	5%
DOMAIN 3 - Manajemen SPBE	16,5%
Aspek 5 - Penerapan Manajemen SPBE	12%
Aspek 6 - Audit TIK	4,5%
DOMAIN 4 - Layanan SPBE	16,5%
Aspek 7 - Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	12%
Aspek 8 - Layanan Publik	4,5%

Pada tahun 2023 Kementerian BUMN mendapat Skor SPBE sebesar 4,41 dengan predikat Memuaskan atau tercapai 126% (dari target 3,5 Poin). Secara umum Indeks (skor) SPBE Kementerian BUMN di atas rata-rata SPBE Kementerian/Instansi lainnya. Adapun dari nilai indeks tersebut mencerminkan tingkat kematangan penerapan SPBE yang ditinjau dari kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE.

Program yang telah dilakukan oleh Kementerian BUMN dalam peningkatan Indeks SPBE pada tahun 2023, yaitu:

• Domain Kebijakan ▼

- | | |
|---|--|
| 1 | Kementerian BUMN telah menetapkan kebijakan internal sebagai dasar penyelenggaraan SPBE di Kementerian BUMN, kebijakan ini diselaraskan dengan amanat dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE yaitu Penetapan Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-41/MBU/S/O6/2023 tentang Penyelenggaraan SPBE. |
| 2 | Kementerian BUMN juga melakukan review dan evaluasi atas kebijakan terkait SPBE. |

• Domain Tata Kelola ▼

- | | |
|----|--|
| 1. | Monitoring dan Reviu serta penyerahan lisensi sistem informasi arsitektur SPBE. |
| 2. | Pembinaan Penyusunan Arsitektur SPBE To-Be pada Instansi Pusat. |
| 3. | <i>Benchmarking</i> Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi. |
| 4. | Rencana dan Anggaran SPBE unit kerja di Kementerian BUMN masuk ke dalam anggaran unit pengelola TIK yaitu Asisten Deputi Bidang Teknologi dan Informasi (Asdep TI). Selain itu, rencana dan anggaran SPBE Kementerian BUMN telah terpadu dan dapat dikendalikan oleh Biro Perencanaan, Organisasi dan Kepegawaian yaitu unit yang menjalankan fungsi perencanaan dan penganggaran, serta telah dilakukan reviu dan evaluasi secara periodik. |

• Domain Manajemen SPBE ▼

- | | |
|----|--|
| 1. | Aspek Penerapan Manajemen SPBE <ul style="list-style-type: none">a. Menetapkan Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-149/MBU/07/2022 tentang Pedoman Manajemen SPBE.b. Menetapkan <i>Standart Operational Procedure</i> (SOP) Tata Kelola Teknologi Informasi Kementerian BUMN.c. Menyusun Profil Risiko SPBE Kementerian BUMN.d. Menetapkan Tim Satu Data Kementerian BUMN yang melibatkan setiap unit kerja di Kementerian BUMN.e. Penerapan Aplikasi <i>Yammer</i> sebagai platform Manajemen Pengetahuan di Kementerian BUMNf. Penerapan Layanan <i>Helpdesk</i> Sistem Informasi Kementerian BUMNg. Perbaikan Layanan SPBE sesuai Hasil Survey Kepuasan Layanan Teknologi Informasi Kementerian BUMN. |
| 2. | Aspek Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) <p>Kementerian BUMN melaksanakan audit aplikasi dan infrastruktur SPBE mengacu pada ketentuan BRIN dengan menggunakan audit tools BRIN, serta melaksanakan audit keamanan infrastruktur dan keamanan aplikasi berdasarkan ketentuan BSSN.</p> |

• Domain Layanan SPBE ▼

1. Berfokus pada Manajemen Pengendalian Keamanan Informasi dilakukan melalui strategi Keamanan Informasi yang ditetapkan oleh Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/ Pemerintah Daerah dengan pembentukan Kementerian BUMN *Computer Security Incident Respon Team* (Kementerian BUMN-CSIRT).
2. Telah dilakukan pemutakhiran profil risiko keamanan Teknologi Informasi Kementerian BUMN yang terdiri dari identifikasi risiko dan rencana mitigasinya.
3. Pemenuhan kompetensi Sumber Daya Manusia telah diupayakan yang merupakan bagian dari Kompetensi Digitalisasi, yaitu salah satu kompetensi fundamental yang harus dimiliki oleh seluruh pegawai Kementerian BUMN sesuai dengan level jabatannya.
4. Evaluasi dan *Enhancement* Aplikasi Khusus Kementerian BUMN (Aplikasi SATU BUMN Layanan EGRC, Aplikasi Portal Publik Modul Survey Publik, Sinadine, Portal Human Capital, *Enterprises Service Bus* (ESB) dst).

Pelaksanaan pengukuran SPBE Tahun 2023 masih memiliki beberapa kendala yaitu:

- » Tantangan dalam menjaga keamanan jaringan dan sistem di lingkungan Kementerian BUMN meliputi deteksi dan pencegahan serangan malware, pemantauan aktivitas mencurigakan, serta pembaruan dan patching sistem secara teratur untuk mengatasi kerentanan keamanan.
- » Sistem dan *platform* yang tidak terintegrasi dengan baik, yang dapat menghambat aliran informasi dan kolaborasi antar unit kerja.
- » Kebutuhan dalam strategi komunikasi dan pengelolaan perubahan yang efektif, termasuk melibatkan pegawai dalam proses transformasi, memberikan pelatihan yang sesuai, dan membangun kepercayaan dan dukungan untuk perubahan tersebut.
- » Dalam menghadapi transformasi digital, selain sistem, juga perlu dikembangkan kapabilitas pegawai agar dapat mengimplementasikan strategi yang telah dibuat.

Program kerja yang direncanakan pada tahun 2024 akan dilakukan peningkatan terhadap program-program SPBE yaitu :

Prioritas Perbaikan Tahun 2024

1

Pelaksanaan SPBE 2024

- Pembuatan Arsitektur SPBE 2024 (to-be);
- Penyusunan Tim SPBE 2024;
- Penyusunan Program Kerja SPBE 2024;
- *Kick Off* Penyelenggaraan SPBE 2024;
- Pelaksanaan SPBE 2024;
- Asesmen SPBE 2024.

2

Pelaksanaan Audit TIK 2024

- Melakukan evaluasi hasil audit Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) 2023 meliputi Audit Infrastruktur SPBE, Audit Aplikasi SPBE, Audit Keamanan SPBE, Dokumentasi Pelaksanaan Audit TIK telah sesuai dengan pedoman;
- Melakukan perbaikan hasil audit TIK 2023 berupa Pelaksanaan Audit TIK dilakukan oleh auditor TIK/Sistem Informasi eksternal yang memiliki sertifikasi auditor TIK/Sistem Informasi.

3

Penyusunan Pedoman Manajemen SPBE 2024

4

Penyusunan Katalog Layanan TIK 2024

Prioritas Perbaikan Tahun 2024

5

Evaluasi Hasil SPBE 2023

- Perlunya peran serta dukungan dan komitmen pimpinan untuk dapat memberikan arahan kebijakan dan koordinasi penerapan SPBE di lingkungan Kementerian BUMN;
- Menetapkan SK Proses Bisnis Kementerian BUMN sesuai standar;
- Melengkapi referensi seluruh domain arsitektur SPBE dan mengunggah ke dalam sistem ABACUS Kementerian PANRB;
- Melaksanakan tugas/program kerja Tim Koordinasi SPBE sesuai perencanaan, serta mengkomunikasikan dengan unit kerja terkait;
- Melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil audit infrastruktur, aplikasi dan keamanan SPBE serta melakukan perbaikan penerapan Infrastruktur, aplikasi dan keamanan SPBE.

6. OPINI BPK ATAS LAPORAN KEMENTERIAN BUMN ▼

Rumus Indikator Kinerja	Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023	Persen Capaian	
1	2	3	4	4/2	4/3
Opini BPK	WTP	WTP	WTP	120,00%*	120,00%*

Keterangan : * Pencapaian Realisasi Maksimal, maka dihitung 120%

Dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan negara secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab, perlu dilakukan pemeriksaan berdasarkan standar pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan/ BPK. Pemeriksaan dimaksud adalah pemeriksaan atas laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN.

Setelah pemeriksaan selesai dilakukan, maka BPK menyusun Laporan Hasil Pemeriksaan yang memuat opini sebagai bentuk pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, terdapat 4 (empat) jenis opini yang diberikan oleh BPK atas Pemeriksaan atas Laporan Keuangan yaitu:

Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
unqualified opinion

Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa, menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia;

Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
qualified opinion

Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas entitas tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan;



Opini Tidak Wajar *adversed opinion*

Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia;



Pernyataan Menolak Memberikan Opini atau Tidak Memberikan Pendapat *disclaimer of opinion*

Menyatakan bahwa Auditor tidak menyatakan pendapat atas laporan apabila lingkup audit yang dilaksanakan tidak cukup untuk membuat suatu opini.

Adapun kriteria yang digunakan dalam pemberian opini oleh BPK dalam pemeriksaan atas laporan keuangan yaitu:

- Kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan;
- Kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*);
- Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; dan
- Efektivitas sistem pengendalian intern.

Laporan Keuangan Kementerian BUMN Tahun Anggaran 2022 telah mendapatkan opini WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sebagaimana tertuang dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2022 dengan Nomor: 30.a/LHP/XV/O5/2023 tanggal 24 Mei 2023.

Adapun capaian realisasi Opini BPK atas Laporan Keuangan Kementerian BUMN dalam beberapa tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	2023		
			Target Renstra	Target PK	Realisasi
WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Selama 4 (empat) tahun terakhir, Opini BPK atas Laporan Keuangan dapat dipertahankan dengan predikat WTP dan menjadikan Kementerian BUMN salah satu instansi Kementerian/ Lembaga Pemerintahan yang mampu memperoleh opini WTP selama 16 (enam belas) tahun berturut-turut sejak tahun 2007.

Pencapaian tersebut tentunya merupakan hasil kerja sama dan koordinasi yang efektif dari seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian BUMN. Tentunya hal tersebut, masih memerlukan upaya yang berkesinambungan dan komitmen dalam rangka peningkatan pelaksanaan pengelolaan keuangan. Selanjutnya, memperhatikan capaian opini WTP pada tahun 2023 dan kompleksitas indikator penilaian atas pemeriksaan laporan keuangan, perlu dilakukan evaluasi dalam rangka mempertahankan capaian WTP tersebut antara lain:

- Meningkatkan kompetensi pegawai secara menyeluruh khususnya dalam pengelolaan keuangan negara;
- Memastikan proses pengelolaan keuangan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- Menyusun laporan keuangan dengan mengacu pada ketentuan yang ditetapkan Kementerian Keuangan serta menyampaikan tepat waktu; dan
- Menyelesaikan tindak lanjut atas hasil pemeriksaan sebelumnya dengan dokumen pengungkapan yang cukup.

Program kerja yang telah dilaksanakan pada tahun 2023 untuk pencapaian Opini WTP Laporan Keuangan Kementerian BUMN sebagai berikut:

- a. Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian BUMN yang baik dengan mengacu pada standar akuntansi pemerintah dan pemenuhan terhadap kriteria penilaian serta menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian BUMN secara tepat waktu kepada Kementerian Keuangan;
- b. Pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang bersih dan transparan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan;
- c. Pelaksanaan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan yang efektif dan akuntabel sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh regulator;
- d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi setiap bulan dalam rangka memastikan kualitas dari pelaksanaan anggaran; dan
- e. Peningkatan kompetensi secara berkesinambungan terhadap pegawai di lingkup Biro Umum dan Keuangan Kementerian BUMN.

Adapun program kerja yang akan direncanakan pada tahun 2024 untuk mempertahankan opini WTP Laporan Keuangan Kementerian BUMN sebagai berikut:

- a. Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian BUMN berpedoman pada standar akuntansi pemerintah dan perkembangan kebijakan terkini yang diterbitkan Kementerian Keuangan serta menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian BUMN kepada Kementerian Keuangan tepat waktu.
- b. Memperkuat sistem pengendalian internal melalui pelaksanaan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) serta koordinasi secara intensif dengan Inspektorat Kementerian BUMN selaku APIP dan mitra kerja yang berkontribusi dalam penyusunan laporan keuangan.
- c. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan yang efektif dan akuntabel terutama indikator Deviasi Halaman III DIPA yang masih memerlukan perbaikan, dengan penyusunan kalender kegiatan unit kerja dan melakukan monitoring pelaksanaannya serta memastikan penyerapan anggaran sesuai dengan output yang direncanakan.
- d. Peningkatan tata kelola Barang Milik Negara (BMN).
- e. Melakukan evaluasi atas pengelolaan keuangan secara berkesinambungan antara lain didasarkan atas rekomendasi temuan dari BPK maupun Inspektorat sehingga dapat meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan secara berkelanjutan.
- f. Meningkatkan kompetensi organ Pengadaan Barang dan Jasa, Organ Kuasa Pengguna Anggaran dan pegawai pengelola kegiatan dan administrasi pada seluruh unit kerja Kementerian BUMN.

TUJUAN II

MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN DAN KORPORATISASI BUMN

Sasaran Strategis 3

Meningkatnya Tata Kelola BUMN sebagai Korporasi

No	SS/IKU	Target	Realisasi	Capaian
7	Rasio BUMN dengan tingkat Kesehatan Kategori Sehat	70,00%	77,10%	110,14%

No	SS/IKU	Target	Realisasi	Capaian
8	Persentase penyelesaian harmonisasi regulasi tata kelola BUMN	100,00%	100,00%	120,00%*
9	Tingkat Kepatuhan BUMN dalam menindaklanjuti Regulasi dan Kebijakan	100,00%	100,00%	120,00%*
10	Penyelesaian Deregulasi Peraturan Menteri BUMN (Omnibus Permen Kementerian BUMN)	100,00%	100,00%	120,00%*

Keterangan : * Pencapaian Realisasi Maksimal, maka dihitung 120%

7. RASIO BUMN DENGAN TINGKAT KESEHATAN KATEGORI SEHAT

Rumus Indikator Kinerja	Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023	Persen Capaian	
1	2	3	4	4/2	4/3
Jumlah BUMN berkategori minimal Sehat (A) dibagi dengan keseluruhan BUMN untuk tahun buku 2022.	76,60%	70,00%	77,10%	100,65%	110,14%

Rasio BUMN dengan Tingkat Kesehatan Kategori Sehat terealisasi sebesar 77,10% atau lebih tinggi dari targetnya yang ditetapkan sebesar 70,00%. Secara umum terdapat perbaikan kinerja BUMN disebabkan karena beberapa hal, antara lain:

1. Portofolio BUMN semakin fokus, ramping dan strategis; fondasi tata kelola Kementerian BUMN dan fondasi tata kelola BUMN sudah dicanangkan dan diimplementasikan, dan fondasi keuangan Portofolio BUMN yang tumbuh dengan struktur pendanaan yang sehat juga sudah terbentuk.
2. Kondisi Ekonomi Makro: Keadaan ekonomi secara keseluruhan mempengaruhi kinerja BUMN. Terdapat kenaikan beberapa komoditas seperti minyak, gas, dan komoditas lain yang mempengaruhi kinerja BUMN.

Pada tahun 2023 telah dilakukan monitoring dan updating atas data realisasi tingkat Kesehatan BUMN audited tahun buku 2022 sebagaimana tabel berikut:

No	Nama Perusahaan/BUMN	Skor Tingkat Kesehatan	Grade
1	PT Pertamina (Persero)	93,95	AA
2	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	101,92	AAA
3	PT Mineral Industri Indonesia (Persero)	95,00	AA
4	PT Perkebunan Nusantara III (Persero)	82,30	AA
5	Perum Perhutani	70,80	A
6	PT Pupuk Indonesia (Persero)	94,00	AA
7	Perum BULOG	81,00	A
8	PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)	54,51	BBB
9	PT Bio Farma (Persero)	70,00	A
10	PT LEN Industri (Persero)	73,00	A
11	PT Krakatau Steel (Persero) Tbk	63,80	BBB
12	PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)	89,00	AA
13	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	PK-1	AAA
14	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	PK-2	AA

No ▼	Nama Perusahaan/BUMN ▼	Skor Tingkat Kesehatan ▼	Grade ▼
15	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	PK-2	AA
16	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	PK-2	AA
17	PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)	118,22	AAA
18	PT Asuransi Jiwasraya (Persero)	18,00	CC
19	PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)	65,00	BBB
20	PT Asabri (Persero)	89,00	AA
21	PT Taspen (Persero)	90,00	AA
22	PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk	91,50	AA
23	PT Danareksa (Persero)	72,00	A
24	Perum Percetakan Uang Republik Indonesia	87,00	AA
25	Perum Percetakan Negara Republik Indonesia	26,00	CCC
26	Perum Lembaga Kantor Berita Nasional Antar	92,00	AA
27	PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)	83,50	AA
28	Perum Jasa Tirta II	87,25	AA
29	PT Brantas Abipraya (Persero)	75,25	A
30	PT Jasa Marga (Persero) Tbk	78,50	A
31	PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	75,75	A
32	Perum Perumnas	66,00	A
33	PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	77,00	A
34	PT Hutama Karya (Persero)	64,50	BBB
35	PT Adhi Karya (Persero) Tbk	64,24	BBB
36	PT Waskita Karya (Persero) Tbk	60,00	BBB
37	PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	62,25	BBB
38	PT Kereta Api Indonesia (Persero)	88,00	AA
39	PT Industri Kereta Api (Persero)	50,75	BB
40	PT Pelabuhan Indonesia (Persero)	87,50	AA
41	PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero)	79,50	A
42	PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero)	81,65	A
43	PT Pos Indonesia (Persero)	80,50	AA
44	Perum Damri	68,90	A
45	Perum LPPNPI	85,50	AA
46	PT Aviastri Pariwisata Indonesia (Persero)	71,00	A
47	PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk	53,00	BBB

Kendala atau Tantangan yang dihadapi dalam Pencapaian Target Kinerja Tahun 2023 yaitu:

- Beberapa BUMN mengalami penurunan tingkat kesehatan dari tahun sebelumnya. Turunnya tingkat kesehatan (misalnya Perum PFN dan PT Reasuransi Indonesia Utama) antara lain disebabkan kinerja perusahaan dari sisi pendapatan turun dan mengalami kerugian serta dalam proses restrukturisasi.
- Kendala teknis lainnya dalam hal pelaporan, dimana data realisasi tingkat kesehatan BUMN terlambat disampaikan oleh BUMN melalui Portal Silaba, sehingga menyebabkan tidak optimalnya pemantauan dan rekapitulasi tingkat kesehatan BUMN khususnya pada periode Triwulan II sampai dengan Triwulan IV.

Program kerja yang telah dilaksanakan pada tahun 2023 sebagai berikut:

- Dilakukan perubahan Kebijakan terkait penilaian tingkat kesehatan BUMN, dimana sebelumnya menggunakan KEP-100/MBU/2002, diubah menjadi dinilai menggunakan Peringkat (*rating*) yang didasarkan pada Pemeringkatan. Pengaturan ini disampaikan di dalam PER-2/MBU/O3/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara.
- Dilakukan pengaturan terkait lembaga rating dan tata cara pelaporan tingkat kesehatan.
- Dilakukan standarisasi penilaian *rating* yang dilakukan oleh lembaga pemeringkat di Nasional dan Internasional.

Program kerja yang akan dilaksanakan pada Tahun 2024 sebagai berikut:

- Melaksanakan monitoring terkait pelaporan tingkat kesehatan BUMN.
- Mengembangkan sistem basis data untuk mengawasi dan melaporkan manajemen risiko dan kesehatan finansial BUMN dengan memanfaatkan teknologi informasi yang terintegrasi dengan sistem pelaporan elektronik di Kementerian BUMN.
- Menjalankan pemantauan, analisis dan evaluasi berkala atas kesehatan finansial BUMN yang dilaporkan melalui sistem pelaporan elektronik di Kementerian BUMN.

8. PERSENTASE PENYELESAIAN HARMONISASI REGULASI TATA KELOLA BUMN ▾

Rumus Indikator Kinerja	Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023	Persen Capaian	
1	2	3	4	4/2	4/3
Self Assessment Deputy Bidang Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan	100,00%	100,00%	100,00%	120,00%*	120,00%*

Keterangan : * Pencapaian Realisasi Maksimal, maka dihitung 120%

Kementerian BUMN melalui Asisten Deputy Bidang Peraturan Perundang-Undangan memiliki lingkup tugas penyusunan peraturan perundang-undangan terkait pembinaan, pengurusan dan pengawasan BUMN yang bersifat eksternal. Penyusunan peraturan eksternal terdiri dari penyusunan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan Instruksi Presiden, Rancangan Peraturan Menteri dari Kementerian/Lembaga. Tingkat pengukuran IKU adalah sebagai berikut:

% Pencapaian ▼	Uraian Tahapan IKU ▼	Rentang Kembali ▼
0-20%	Proses penyiapan bahan penyusunan peraturan eksternal	Controllable
21-40%	Proses pembahasan draft peraturan eksternal di internal Kedeputian Hukum dan Perundang-undangan	
41-50%	Proses pembahasan draft peraturan eksternal antar Eselon I di Kementerian BUMN	
51-60%	Usulan atas <i>draft</i> peraturan eksternal disampaikan kepada Menteri BUMN	
61-70%	<i>Draft</i> peraturan eksternal selesai diharmonisasi oleh Kementerian Hukum dan HAM	
71-90%	<i>Draft</i> peraturan eksternal ditetapkan oleh Presiden atau pimpinan K/L terkait	Uncontrollable
91-100%	Peraturan eksternal dilakukan pengundangan	

Pada Tahun 2023, IKU Persentase Penyelesaian Harmonisasi Regulasi Tata Kelola BUMN ditargetkan sebesar 100%. Terdapat beberapa tahapan penyusunan peraturan perundang-undangan yang *controllable* bagi Kementerian BUMN yaitu proses penyusunan sampai dengan harmonisasi peraturan perundang-undangan. Adapun proses penetapan dan pengundangan dimaksud uncontrollable bagi Kementerian BUMN. Capaian penyelesaian harmonisasi regulasi tata kelola BUMN pada Tahun 2023 adalah 100% dari target 100%. Tingginya capaian realisasi target peraturan eksternal dikarenakan proses pembahasannya mendapatkan dukungan dari Kementerian/Lembaga terkait.

Peraturan eksternal yang telah diundangkan adalah:

No	Peraturan Perundang-Undangan ▼	Tanggal Pengundangan ▼
1	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang	31 Maret 2023
2	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan	8 Agustus 2023
3	Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara	31 Oktober 2023
4	Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2023 tentang Pembiayaan Proyek Melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara	3 April 2023
5	Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	5 April 2023
6	Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2023 tentang Penggabungan Perusahaan Umum (Perum) Pengangkutan Penumpang Jakarta ke dalam Perusahaan Umum (Perum) DAMRI	6 Juni 2023

No	Peraturan Perundang-Undangan ▼	Tanggal Pengundangan ▼
7	Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2023 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perum Produksi Film Negara Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)	10 Agustus 2023
8	Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2023 tentang Perubahan atas PP Nomor 41 Tahun 1970 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Bina Karya Menjadi Perusahaan Perseroan	25 September 2023
9	Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2023 tentang tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina	3 Oktober 2023
10	Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian	10 November 2023
11	Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2023 tentang tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Len Industri (Tunai dan Non Tunai)	27 Desember 2023
12	Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2023 tentang tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Brantas Abipraya	27 Desember 2023
13	Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2023 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT ASDP Indonesia Ferry	29 Desember 2023
14	Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2023 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Rajawali Nusantara Indonesia	29 Desember 2023
15	Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2023 tentang tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Aviassi Pariwisata Indonesia	29 Desember 2023
16	Peraturan Presiden No 17 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital di Bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	20 Februari 2023
17	Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2023 tentang Perencanaan Terpadu Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial	30 Mei 2023
18	Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2023 tentang Percepatan Swasembada Gula Nasional dan Penyediaan Bioetanol Sebagai Bahan Bakar Nabati (Biofuel)	16 Juni 2023
19	Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional	16 Juni 2023
20	Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Pemanfaatan Jamu	14 September 2023

No	Peraturan Perundang-Undangan ▼	Tanggal Pengundangan ▼
21	Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2023 tentang Strategi Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia	26 September 2023
22	Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 Tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria	3 Oktober 2023
23	Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital untuk Mencapai Keterpaduan Layanan Digital Nasional	18 Desember 2023
24	Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kebun Raya	27 Desember 2023
25	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial Pada Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus	28 Februari 2023
26	Peraturan Menteri Koperasi dan UMKM Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Minyak Makan Merah Berbasis Koperasi	13 Maret 2023
27	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2003 tentang Kegiatan Usaha Klinik di Kawasan Ekonomi Khusus	12 April 2023
28	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30 Tahun 2023 tentang Fasilitas Asuransi Pertanian	7 Agustus 2023
29	Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penyediaan Alat Memasak Berbasis Listrik Bagi Rumah Tangga.	2 Oktober 2023
30	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2023 tentang Produktivitas, Nilai Tambah, dan Daya Saing Produk Tanaman Perkebunan	15 November 2023
31	Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pemanfaatan Biomassa sebagai Campuran Bahan Bakar pada Pembangkit Listrik Tenaga Uap	30 November 2023
32	Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2023 tentang Dukungan Penyelenggaraan FIFA U-17 World Cup 2023	19 September 2023

Program kerja yang telah dilaksanakan pada tahun 2023 sebagai berikut:

1. Peningkatan kompetensi tata cara penyusunan peraturan perundang-undangan
2. Melakukan pendalaman proses bisnis BUMN yang bersangkutan/terkait dalam peraturan, berdiskusi dan berkoordinasi dengan unit teknis terkait di Kementerian BUMN maupun Kementerian/Lembaga terkait, dan
3. Memantau progres penyusunan peraturan perundang-undangan tersebut.

Pelaksanaan harmonisasi regulasi tata kelola BUMN masih memiliki beberapa kendala antara lain koordinasi antar Kementerian/Lembaga yang kurang baik dan beberapa proses penyusunan peraturan perundang-undangan hanya melibatkan Kementerian BUMN secara terbatas sehingga berpotensi tidak tertampungnya usulan dan kepentingan Kementerian BUMN/BUMN. Oleh karena itu koordinasi antar Kementerian/Lembaga dan monitoring proses penyusunan peraturan perlu ditingkatkan.

Dengan memperhatikan kendala pengukuran yang dihadapi pada tahun 2023, pada 2024 direncanakan akan dilakukan peningkatan terhadap program-program pencapaian penguatan aspek legal dan dukungan aspek legal pengelolaan BUMN, yaitu:

- » Peningkatan kompetensi tata cara penyusunan peraturan perundang-undangan dan produk hukum Kementerian BUMN terkait pengelolaan BUMN;
- » Penguatan koordinasi dengan unit dan/atau Kementerian/Lembaga terkait penyusunan peraturan perundang-undangan, kriteria nasional JDIH, serta indeks reformasi hukum ;
- » Monitoring dan evaluasi proses penyusunan peraturan perundang-undangan terkait BUMN dan penyusunan produk hukum Kementerian BUMN terkait pengelolaan BUMN;
- » Peningkatan, optimalisasi, dan pemeliharaan fitur dan layanan website JDIH Kementerian BUMN;
- » Peningkatan kompetensi dan kapabilitas fungsi legal dalam penyusunan suatu peraturan perundang-undangan;
- » Pendalaman pemahaman kepentingan dan proses bisnis BUMN dalam suatu peraturan perundang-undangan; dan
- » Penguatan SDM melalui kegiatan-kegiatan seperti *Focus Group Discussion* dan *Sharing Session*.

9. TINGKAT KEPATUHAN BUMN DALAM MENINDAKLANJUTI REGULASI DAN KEBIJAKAN ▼

Rumus Indikator Kinerja	Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023	Persen Capaian	
1	2	3	4	4/2	4/3
Self Assessment Deputy Bidang Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan	100,00%	100,00%	100,00%	120,00%*	120,00%*

Keterangan : * Pencapaian Realisasi Maksimal, maka dihitung 120%

Tingkat kepatuhan BUMN dalam menindaklanjuti regulasi dan kebijakan merupakan informasi mengenai kuantitas kepatuhan seluruh BUMN dalam melaksanakan dan menindaklanjuti peraturan perundang-undangan, ketentuan dan kebijakan.

Tingkat kepatuhan BUMN diperoleh dari ukuran jumlah BUMN dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan, ketentuan dan kebijakan dibagi dengan jumlah seluruh BUMN. Tujuannya untuk meningkatkan pengelolaan kualitas pengurusan perusahaan dengan meminimalisir terjadinya ketidakpatuhan atas penerapan GCG.

Kementerian BUMN melalui Asisten Deputy Bidang Hukum Korporasi bertugas mengevaluasi dan melaksanakan pemantauan di bidang pengelolaan hukum Badan Usaha Milik Negara sehingga penegakan hukum dan pengelolaan BUMN dapat terkendali dengan baik. Dari *self assessment* terhadap rekap permasalahan BUMN yang ada, terdapat 52 permasalahan yang ditangani pada periode 2023. Selanjutnya sebanyak 7 permasalahan telah selesai ditindaklanjuti melalui pendalaman dan pendampingan, dan sisanya masih dalam proses. Berdasarkan laporan yang masuk, seluruh BUMN masih tergolong patuh dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan, ketentuan dan kebijakan, sehingga realisasi tercapai 100%.

Program kerja yang dilaksanakan pada tahun 2023, dilakukan beberapa tahapan kegiatan antara lain dengan melakukan pendalaman tata kelola BUMN sesuai dengan Anggaran Dasar BUMN, Keputusan Menteri BUMN terkait Pengangkatan dan/atau Pemberhentian Direksi dan/atau Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, serta Rancangan Peraturan Pemerintah mengenai kebijakan hukum aksi korporasi.

Program kerja yang akan dilaksanakan pada 2024 untuk peningkatan terhadap program-program pencapaian tingkat kepatuhan BUMN dalam menindaklanjuti regulasi dan kebijakan, yaitu:

- a. Penetapan Surat Edaran (SE) Standarisasi Dokumen Perjanjian BUMN sebagai bentuk mitigasi risiko dalam Perjanjian Kerjasama, Perjanjian Pengadaan Barang dan Jasa serta Perjanjian *Engineering, procurement and Construction* (EPC).
- b. Peningkatan kapabilitas fungsi legal dalam penyusunan strategi penanganan perkara hukum.
- c. Penguatan kapabilitas dan pemberdayaan fungsi Satuan Pengawasan Internal dan meningkatkan fungsi mitigasi risiko.
- d. Penyusunan Kurikulum Insan BUMN dan pelaksanaan pelatihan dibidang hukum sebagai upaya penguatan kompetensi SDM dalam menjalankan fungsi bidang hukum untuk mencegah terjadinya permasalahan hukum.
- e. Penguatan SDM melalui kegiatan-kegiatan *Focus Group Discussion*, *Mini Sharing Session*, *Mentoring*, dan Konsultasi yang dilaksanakan dalam level teknis di setiap klaster maupun tiap BUMN.
- f. Penyusunan petunjuk teknis Pelaksanaan Penyelesaian Perselisihan antar BUMN/Anak Perusahaan BUMN/Perusahaan Terafiliasi BUMN pada Kementerian BUMN dalam rangka pembinaan BUMN serta pelaksanaan tata kelola dan peningkatan kinerja BUMN.
- g. Mengoptimalkan upaya pensertifikatan dan pengamanan aset BUMN serta peningkatan koordinasi dengan Aparat Penegak Hukum (APH) dan Kementerian/Lembaga terkait.
- h. Optimalisasi fungsi pengawasan pengelolaan keuangan pada setiap BUMN dan penerapan standar akuntansi yang berlaku umum.

10. PENYELESAIAN DEREGULASI PERATURAN MENTERI BUMN (Omnibus Peraturan Menteri BUMN)

Rumus Indikator Kinerja	Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023	Persen Capaian	
1	2	3	4	4/2	4/3
Self Assessment Deputi Bidang Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan	100,00%	100,00%	100,00%	120,00%*	120,00%*

Keterangan : * Pencapaian Realisasi Maksimal, maka dihitung 120%

Kementerian BUMN melalui Asdep Bidang Peraturan Perundang-undangan memiliki lingkup tugas penyusunan peraturan perundang-undangan terkait pembinaan, pengurusan dan pengawasan BUMN yang bersifat internal. Penyusunan peraturan internal terkait dengan penyusunan Rancangan Peraturan Menteri BUMN. Tingkat pengukuran IKU adalah sebagai berikut:

% Pencapaian ▼	Uraian Tahapan IKU ▼	Rentang Kembali ▼
0-20%	Proses penyiapan bahan penyusunan Peraturan Menteri BUMN	Controllable
21-40%	Proses pembahasan <i>draft</i> Peraturan Menteri BUMN di internal Kedeputian Hukum dan Perundang-undangan	
41-50%	Proses pembahasan <i>draft</i> Peraturan Menteri BUMN antar Eselon I di Kementerian BUMN	
51-60%	Usulan atas <i>draft</i> peraturan eksternal disampaikan kepada Menteri BUMN	
61-70%	<i>Draft</i> final Peraturan Menteri BUMN disampaikan kepada Menteri BUMN	

% Pencapaian ▼	Uraian Tahapan IKU ▼	Rentang Kembali ▼
61-70%	Draft Peraturan Menteri BUMN selesai diharmonisasi oleh Kementerian Hukum dan HAM	Controllable
71-90%	Draft final Peraturan Menteri BUMN ditetapkan oleh Presiden atau pimpinan K/L terkait	Uncontrollable
91-100%	Peraturan Menteri BUMN dilakukan pengundangan	

Dalam Tahun 2023, IKU Penyelesaian Deregulasi Peraturan Menteri BUMN (*Omnibus Permen Kementerian BUMN*) ditargetkan sebesar 100,00%. Terdapat beberapa tahapan penyusunan peraturan perundang-undangan yang *controllable* bagi Kementerian BUMN yaitu proses penyusunan sampai dengan harmonisasi peraturan perundang-undangan. Adapun proses penetapan dan pengundangan dimaksud *uncontrollable* bagi Kementerian BUMN. Capaian penyelesaian deregulasi Peraturan Menteri BUMN (*Omnibus Permen Kementerian BUMN*) pada Tahun 2023 telah tercapai 100,00% dari target 100,00%. Tingginya capaian realisasi target dikarenakan banyaknya peraturan Menteri BUMN yang merupakan *concern* dari Menteri BUMN, sehingga proses penetapannya berjalan dengan lancar.

Peraturan eksternal yang telah diundangkan adalah:

a.	b.	c.
Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-1/MBU/03/2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara;	Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara; dan	Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara.

Program kerja yang telah dilaksanakan pada tahun 2023 diawali dengan menginventarisasi dan mengevaluasi kebijakan di Kementerian BUMN yang mengatur BUMN, selanjutnya dilakukan rangkaian rapat penyusunan dan pembahasan substansi Peraturan Menteri BUMN, *public hearing*, proses harmonisasi dengan Kemenkumham, proses penetapan dan pengundangan. Proses penyusunan Peraturan Menteri BUMN ini melibatkan banyak *stakeholder* dari unit teknis Kementerian BUMN, BUMN, dan Kementerian/Lembaga terkait yang dikoordinir oleh Asdep Bidang Peraturan Perundang-undangan.

Pada 2024 direncanakan akan dilakukan peningkatan terhadap program-program pencapaian penguatan aspek legal dan dukungan aspek legal pengelolaan BUMN, yaitu:

- Peningkatan kompetensi tata cara penyusunan peraturan perundang-undangan dan produk hukum Kementerian BUMN terkait pengelolaan BUMN;
- Penguatan koordinasi dengan unit dan/atau Kementerian/Lembaga terkait penyusunan peraturan perundang-undangan, kriteria nasional JDIH, serta indeks reformasi hukum ;
- Monitoring dan evaluasi proses penyusunan peraturan perundang-undangan terkait BUMN dan penyusunan produk hukum Kementerian BUMN terkait pengelolaan BUMN;
- Peningkatan, optimalisasi, dan pemeliharaan fitur dan layanan website JDIH Kementerian BUMN;
- Peningkatan kompetensi dan kapabilitas fungsi legal dalam penyusunan suatu peraturan perundang-undangan;
- Pendalaman pemahaman kepentingan dan proses bisnis BUMN dalam suatu peraturan perundang-undangan;
- Penguatan SDM melalui kegiatan-kegiatan seperti *Focus Group Discussion* dan *Sharing Session*.

● **Sasaran Strategis 4**
Penguatan Kapasitas BUMN

No	SS/IKU	Target	Realisasi	Capaian
11	Jumlah BUMN dan Anak Usaha yang telah melakukan IPO	37 BUMN/Anak	37 BUMN/Anak	100,00%
12	Penyelesaian Restrukturisasi Hutang BUMN (RDI/SLA, Hutang tidak produktif, BUMN tidak sehat)	Rp3,02 triliun	Rp3,02 triliun	100,00%

11. JUMLAH BUMN DAN ANAK USAHA YANG TELAH MELAKUKAN IPO ▼

Rumus Indikator Kinerja	Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023	Persen Capaian	
1	2	3	4	4/2	4/3
Data Silaba	36 BUMN/Anak	37 BUMN/Anak	37 BUMN/Anak	102,78%	100,00%

Sampai dengan tahun 2023, jumlah BUMN dan Anak Usaha yang telah melakukan Initial Public Offering (IPO) berjumlah 37 perusahaan dari target 37 perusahaan atau tercapai 100%, dengan detail sebagai berikut:

No	Perusahaan	Kode	Tanggal IPO
1	Solusi Bangun Indonesia Tbk	SMCB	10 Agustus 1997
2	Semen Indonesia (Persero) Tbk	SMGR	8 Juli 1991
3	Timah Tbk	TINS	19 Oktober 1995
4	Telkom Indonesia (Persero) Tbk	TLKM	15 November 1995
5	Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.	BBNI	25 November 1996
6	Aneka Tambang Tbk.	ANTM	27 November 1997
7	Indofarma Tbk.	INAF	17 April 2001
8	Kimia Farma Tbk.	KAEF	04 Juli 2001
9	Bukit Asam Tbk.	PTBA	23 Desember 2002
10	Bank Mandiri (Persero) Tbk.	BMRI	14 Juli 2003
11	Bank Raya Indonesia Tbk.	AGRO	08 Agustus 2003
12	Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.	BBRI	10 November 2003
13	Perusahaan Gas Negara Tbk.	PGAS	15 Desember 2003
14	Adhi Karya (Persero) Tbk.	ADHI	18 Maret 2004
15	Wijaya Karya (Persero) Tbk.	WIKA	29 Oktober 2007
16	Jasa Marga (Persero) Tbk.	JSMR	12 November 2007
17	Elnusa Tbk.	ELSA	06 Februari 2008
18	Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.	BBTN	17 Desember 2009
19	PP (Persero) Tbk.	PPTP	9 Februari 2010
20	Krakatau Steel (Persero) Tbk.	KRAS	10 November 2010
21	Garuda Indonesia (Persero) Tbk.	GIAA	12 Februari 2011
22	Waskita Karya (Persero) Tbk.	WSKT	19 Desember 2012
23	Semen Baturaja (Persero) Tbk.	SMBR	28 Juni 2013
24	Wijaya Karya Beton Tbk.	WTON	08 April 2014

No	Perusahaan	Kode	Tanggal IPO
25	PP Properti Tbk.	PPRO	19 Mei 2015
26	Waskita Beton Precast Tbk.	WSBP	20 September 2016
27	Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk.	GMFI	10 Oktober 2017
28	PP Presisi Tbk.	PPRE	24 November 2017
29	Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk.	WEGE	30 November 2017
30	Jasa Armada Indonesia Tbk.	IPCM	22 Desember 2017
31	Bank Syariah Indonesia Tbk.	BRIS	09 Mei 2018
32	Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk.	TUGU	17 Mei 2018
33	Indonesia Kendaraan Terminal Tbk.	IPCC	09 Juli 2018
34	Phapros Tbk.	PEHA	26 Desember 2018
35	Dayamitra Telekomunikasi Tbk.	MTEL	12 November 2021
36	Adhi Commuter Properti Tbk.	ADCP	23 Februari 2022
37	PT Pertamina Geothermal Energy Tbk	PGEO	24 Februari 2023

Jumlah BUMN/Anak yang telah melakukan IPO pada bursa saham sampai pada tahun 2023 adalah sebanyak 37 Perusahaan, di mana pada tahun 2023 terdapat penambahan satu perusahaan dari grup PT Pertamina (Persero) yang melakukan IPO yaitu PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGEO) pada tanggal 24 Februari 2023 dengan harga Rp875 per saham. PGEO merupakan perusahaan yang bergerak di bidang eksplorasi, eksploitasi, dan produksi panas bumi.

Komitmen perusahaan untuk meningkatkan kapitalisasi pasar atau nilai perusahaan dari PT Pertamina (Persero) itu sendiri serta komitmen untuk melakukan pengembangan kapasitas pembangkit panas bumi sehingga dapat mengakses pasar yang lebih luas di masa mendatang menjadi hal yang penting tercapainya IPO PGEO. IPO PGEO diharapkan dapat meningkatkan permodalan dalam pengembangan kapasitas pembangkit panas bumi dalam rangka mewujudkan tujuan nol emisi karbon atau *net zero emission* di 2060.

Jumlah BUMN dan Anak Usaha yang telah melakukan IPO pada bursa saham selama 4 (empat) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

TAHUN	2020	2021	2022	2023
Jumlah BUMN dan Anak Usaha	34	35	36	37

Selama 4 (empat) tahun terakhir, jumlah BUMN dan Anak Usaha yang telah melakukan IPO pada bursa saham terus mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan BUMN senantiasa melakukan ekspansi bisnis dan terus berupaya meningkatkan kinerja perusahaan.

Pada tahun 2023, telah dilakukan IPO PGEO yang merupakan salah satu dari 88 program strategis Kementerian BUMN. Hal-hal yang telah dilakukan sehingga tercapainya target ini diantaranya Kementerian BUMN melakukan *monitoring* berkala dan memberikan masukan terkait aspek korporasi yang dilakukan perusahaan sehingga sasaran strategis IPO PGEO terealisasi dengan baik. Selain itu, perusahaan telah melakukan berbagai upaya dalam menjaga dan meningkatkan kinerja perusahaan yang baik sehingga dapat menarik minat investor.

Program kerja 2023 yang terlaksana dengan efektif sebagai berikut:

- Kementerian BUMN selalu melakukan *monitoring* perkembangan proyek IPO yang dilaporkan PT Pertamina (Persero) secara berkala (per bulan).

- b. Kementerian BUMN turut aktif dalam mengikuti *weekly meeting* proyek IPO PGE untuk mengetahui perkembangan proyek.
- c. Kementerian BUMN mendukung atas upaya-upaya pencapaian target hingga terealisasinya listing PGEO di Bursa Saham pada 24 Februari 2023 dengan proceed +/- USD 600 Juta

Kedepannya, Kementerian BUMN akan terus meningkatkan proses perencanaan dan pengawalan proses IPO BUMN dengan melakukan:

- a. Meningkatkan kualitas penyusunan Program Privatisasi Tahunan BUMN yang didalamnya terdapat rencana IPO BUMN dengan memuat minimal mengenai daftar perusahaan, metode privatisasi, jenis serta rentangan jumlah saham yang akan dijual.
- b. Melaksanakan evaluasi dan pengkajian atas usulan IPO yang disampaikan oleh BUMN.
- c. Melakukan monitoring berkala terhadap realisasi dan proses pelaksanaan IPO BUMN.
- d. Memonitor penggunaan dana hasil IPO sesuai dengan peruntukannya seperti untuk investasi pengembangan kapasitas tambahan operasional, investasi pengembangan kemampuan digital, analitik, dan manajemen *reservoir* untuk mendukung *production, operation & maintenance excellence*, pengembangan utilisasi *co-generation technology* maupun untuk mendanai proyek strategis lainnya di perusahaan.
- e. Memonitor kinerja Perusahaan yang IPO dan memastikan agar pergerakan harga saham tetap stabil atau meningkat.

12. PENYELESAIAN RESTRUKTURISASI HUTANG BUMN ▼

(RDI/SLA, Hutang tidak produktif BUMN tidak sehat)

Rumus Indikator Kinerja	Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023	Persen Capaian	
1	2	3	4	4/2	4/3
Penyelesaian Restrukturisasi Hutang BUMN (RDI/SLA, Hutang tidak produktif, BUMN tidak sehat)	83,33%	Rp3,02 Triliun	Rp3,02 Triliun	n.a	100,00%

Restrukturisasi RDI/SLA pada BUMN dilakukan dengan melakukan konversi hutang RDI/SLA menjadi Penyertaan Modal Negara (PMN) Non Tunai dalam bentuk ekuitas. Konversi hutang RDI/SLA menjadi PMN bertujuan untuk memperkuat struktur permodalan demi mendukung perkembangan bisnis dengan memperkuat cash flow holding sehingga dapat melakukan investasi secara langsung pada anggota holding. Selain itu, adanya PMN Non Tunai diharapkan dapat memperbaiki rasio keuangan BUMN terutama dari sisi *debt-to-equity ratio*, likuiditas, dan solvabilitas sehingga mampu meningkatkan kapasitas leverage perusahaan.

Pengukuran indikator kinerja dilakukan dengan cara menghitung nilai konversi RDI/SLA yang telah masuk pada APBN 2023 dibandingkan dengan realisasi nilai yang telah dikonversi.

Pada tahun 2023, PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) dan PT Len Industri (Persero) telah menyelesaikan proses konversi hutang RDI/SLA melalui PMN Non Tunai TA 2023 sebesar masing-masing Rp2.565 Miliar dan Rp456 Miliar dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 63 Tahun 2023 tentang Penambahan PMN Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Len Industri pada tanggal 27 Desember 2023 dan PP Nomor 66 Tahun 2023 tentang Penambahan PMN RI ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Rajawali Nusantara Indonesia pada tanggal 29 Desember 2023. Pencairan dana PMN Non Tunai ke rekening PT Len Industri (Persero) telah dilakukan pada tanggal 29 Desember 2023 dan ke rekening

PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) telah dilakukan pada tanggal 30 Desember 2023. Penyelesaian target IKU tahun 2023 telah terealisasi seluruhnya sesuai target dengan total nilai Rp3,02 Triliun.

Keberhasilan tercapainya kinerja didukung dengan melakukan proses kerja yang telah dilakukan oleh Kementerian BUMN diantaranya koordinasi intensif dengan stakeholders terkait, khususnya DJKN Kementerian Keuangan.

Proses pencairan PMN Non Tunai Tahun Anggaran 2023 ini tidak terlepas dari kendala dan tantangan, diantaranya yaitu diperlukannya pendalaman antara Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dengan Kementerian Keuangan sehingga menyebabkan mundurnya jadwal realisasi pencairan/penerbitan PP (Peraturan Pemerintah).

Program kerja yang telah dilaksanakan pada tahun 2023, dalam melaksanakan proses konversi hutang RDI/SLA menjadi PMN Non Tunai sebagai berikut:

- Pembahasan Kajian PMN Tahun Anggaran 2023 *Holding* Pangan dan Pertahanan, baik secara internal Kementerian BUMN dengan BUMN maupun dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan;
- Rapat Panitia Antar Kementerian (PAK) terkait Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP);
- Pembahasan konversi hutang RDI/SLA menjadi PMN Non Tunai dengan DPR;
- Rapat Pleno Harmonisasi RPP;
- Permohonan penetapan RPP serta Penyampaian Naskah RPP kepada Kementerian Sekretariat Negara;
- Penerbitan PP; dan
- Pencairan dana PMN Non Tunai TA 2023 ke rekening PT Len Industri (Persero) dan PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero).

Program kerja yang akan direncanakan pada tahun 2024, terdapat rencana konversi Piutang Negara Eks BPPN menjadi PMN Non Tunai pada PT Len Industri (Persero) sebesar Rp649,23 Miliar. Penyelesaian Piutang Negara menjadi PMN ini merupakan tindak lanjut persetujuan surat Menteri Keuangan Nomor S-815/MK.06/2022 tanggal 3 Oktober 2022 dan telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2024.

Saat ini, Kementerian BUMN telah melakukan pembahasan teknis Rancangan Kajian dan RPP secara intensif dengan DJKN Kementerian Keuangan, sehingga substansi kajian sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN PER-2/MBU/03/2023 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.06/2022. Kedepannya, Kementerian BUMN akan tetap mengawal proses penerbitan PP PMN Non Tunai hingga proses pencairan dengan intensif.

TUJUAN III

MENINGKATKAN KEUNGGULAN DAN DAYA SAING BUMN

13. PENINGKATAN PASAR BUMN KE LUAR NEGERI

Rumus Indikator Kinerja	Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023	Persen Capaian	
1	2	3	4	4/2	4/3
Jumlah Negara Tujuan Ekspor minimal USD10.000	117 Negara	48 Negara	98 Negara	83,76%	120,00%*

Keterangan : * Apabila % capaian diatas 120%, maka akan terhitung 120%

BUMN *Go Global* dimulai sejak 17 Juli 2020 melalui Nota Kesepahaman antara Kementerian BUMN dan Kementerian Luar Negeri. Strategi ini merupakan pengembangan dari peningkatan nilai dan penguatan value chain yang merupakan perluasan nilai dari Lima Prioritas BUMN.

BUMN *Go Global* memiliki tujuan untuk memperkenalkan produk BUMN agar diserap oleh pasar global, menyatukan kekuatan BUMN di luar negeri sehingga menciptakan efisiensi operasional dan memperbaiki supply chain dengan melakukan investasi atau akuisisi perusahaan di luar negeri. Sasaran strategisnya adalah peningkatan daya saing BUMN melalui indikator kinerja berupa peningkatan pasar BUMN ke Luar Negeri diukur berdasar jumlah negara tujuan ekspor.

Aktivitas ekspor BUMN memiliki potensi yang cukup tinggi terlihat dari tren peningkatan jumlah negara tujuan BUMN dengan nilai transaksi diatas USD10,000 pada periode 2018 sampai 2023 yang disajikan dalam tabel sebagai berikut:

TAHUN	2020	2021	2022	2023
Jumlah Negara Tujuan	50	127	107	98

Pada tahun 2023, jumlah negara tujuan ekspor BUMN adalah sebanyak 98 (sembilan puluh delapan) negara, melampaui target yang ditetapkan yaitu sebanyak 48 (empat puluh delapan) negara. Berdasarkan ringkasan data di atas, negara tujuan ekspor BUMN berasal dari negara lintas benua yaitu Asia, Amerika, Australia, Afrika dan Eropa. Dari sisi sektor aktivitas ekspor BUMN juga tergolong beragam yaitu minerba (mineral dan batu bara), energi minyak dan gas, kesehatan, manufaktur, pertahanan, konstruksi, perkebunan serta pangan dan pupuk.

Terdapat beberapa tantangan utama yang dihadapi dalam pencapaian peningkatan pasar BUMN ke Luar Negeri dalam rangka peningkatan daya saing BUMN dan strategi BUMN *Go Global* terdiri dari:

- Persaingan harga yang sangat ketat di pasar internasional, mendorong BUMN untuk terus berinovasi dan meningkatkan efisiensi agar tetap memiliki daya saing.
- Partner / Mitra di negara tujuan yaitu kesulitan mendapatkan partner lokal yang bonafide dan terpercaya.
- Kualitas, spesifikasi, dan sertifikasi produk serta *manufacturing* yang perlu ditingkatkan untuk memenuhi standar internasional.
- Pengaruh kondisi politik luar negeri yang tidak stabil berpengaruh terhadap pelaksanaan proyek dan realisasi ekspor.
- Pendanaan yaitu terbatasnya akses pendanaan untuk ekspansi global.
- Marketing Intelligence* dan *Network* yaitu rendahnya informasi dan jaringan global supply chain.

Dalam pencapaian peningkatan pasar BUMN ke Luar Negeri telah dilakukan langkah-langkah selama tahun 2023 terdiri dari:

- Keikutsertaan BUMN dalam lelang yang diselenggarakan oleh organisasi internasional (antara lain klaster Industri Kesehatan pada kegiatan UNICEF dan PAHO) dan negara kerjasama bilateral, serta berpartisipasi dalam kegiatan pameran dagang internasional.
- Optimasi *feedstock*, melaksanakan kegiatan blending sebagai bottom product di luar fasilitas kilang untuk mendapatkan produk yang valuable dan bersaing pada Klaster Energi, Minyak, dan Gas.

3. Mengikuti pertemuan bisnis bilateral/multilateral yang difasilitasi oleh Kementerian Luar Negeri dan/atau Kementerian Teknis untuk membangun jaringan kerjasama internasional.
4. Membangun pemetaan produk unggulan dan peluang pasar internasional untuk mengoptimalkan portofolio produk.

Dalam rangka mendukung BUMN Go Global dan meningkatkan potensi pasar BUMN ke Luar Negeri pada tahun 2024, BUMN akan terus berupaya untuk meningkatkan daya saingnya melalui beberapa hal diantaranya:

- ✓ Memberikan arahan kepada BUMN untuk terus berupaya meningkatkan daya saingnya melalui beberapa hal diantaranya:
 1. Pendalaman proses baik dari segi faktor internal maupun eksternal seperti *resource*, solusi, sertifikasi, kualifikasi, *key partner technology*, serta *partner* untuk *marketing* dan *sales*.
 2. Meningkatkan kompetensi dan *strategic partnership internasional*.
 3. Peningkatan *channeling stakeholder* baik melalui *workshop*, seminar, FGD, dan menghadiri berbagai pameran/pameran di luar negeri untuk perolehan mitra kerja sama.
- ✓ Menjalin kerjasama dan koordinasi dengan berbagai Kementerian dan Lembaga terkait yang dapat mendukung peningkatan daya saing BUMN ke luar negeri.

14. BUMN YANG TELAH MENGIMPLEMENTASIKAN ROADMAP TRANSFORMASI DIGITAL / INDI 4.0

Rumus Indikator Kinerja	Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023	Persen Capaian	
1	2	3	4	4/2	4/3
BUMN yang telah mengimplementasikan roadmap transformasi digital/INDI 4.0	12 BUMN/anak	24 BUMN/anak	24 BUMN/anak	120,00%*	100,00%

Keterangan : * Apabila % capaian diatas 120%, maka akan terhitung 120%

Sesuai Aspirasi Pemegang Saham/Pemilik Modal untuk Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2023 pada BUMN, tercantum bahwa BUMN yang belum melaksanakan Asesmen Transformasi Digital (INDI 4.0) di tahun 2022 wajib melaksanakan di tahun 2023.

Bagi BUMN yang belum mencapai level 4 (menerapkan transformasi digital) wajib menyusun dan mengimplementasikan rencana pemenuhan gap, sedangkan BUMN yang telah menerapkan transformasi digital wajib melaporkan implementasi transformasi digital menuju BUMN 4.0 pada Laporan Manajemen Triwulanan BUMN dan Laporan Manajemen Tahunan. Sehubungan hal tersebut, Kementerian BUMN melakukan monitoring dan evaluasi pada BUMN yang telah mengimplementasikan *roadmap/rekomendasi* perbaikan level INDI 4.0 di tahun 2022. Tujuan IKU tersebut adalah untuk mengakselerasi BUMN dalam bertransformasi digital/Industry 4.0

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi Kementerian BUMN, berikut daftar BUMN yang telah mengimplementasikan roadmap/rekomendasi perbaikan level INDI 4.0 pada tahun 2023:

No	BUMN
1	PT Asabri (Persero)
2	PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)
3	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

No	BUMN
4	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
5	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
6	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
7	Perum Peruri
8	PT Semen Indonesia (Persero) Tbk
9	PT Waskita Karya (Persero) Tbk
10	PT Jasa Marga (Persero)
11	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
12	PT Bio Farma (Persero)
13	Perum Bulog
14	Perum Perhutani
15	PT Kereta Api Indonesia (Persero)
16	PT ASDP Indonesia Ferry (Persero)
17	Perum LPPNPI
18	PT LEN Industri (Persero)
19	PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk
20	PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)
21	Biro Klasifikasi Indonesia
22	Perum Perumnas
23	PT Pegadaian
24	PT Pupuk Indonesia (Persero)

Program kerja pada tahun 2023 yang telah dilaksanakan untuk mengimplementasikan *roadmap*/ rekomendasi perbaikan level INDI 4.0, yaitu:

- Penyampaian surat kepada BUMN perihal tindak lanjut pemenuhan gap untuk perbaikan level INDI 4.0 BUMN.
- Melakukan monitoring dan evaluasi atas penyampaian *roadmap*/rekomendasi pemenuhan gap BUMN serta *progress* implementasinya secara berkala.

Pada prinsipnya program asesmen INDI 4.0 di BUMN grup telah berjalan dengan baik, namun terdapat kendala yaitu terbatasnya jumlah lembaga asesor berdampak pada lamanya penyusunan laporan hasil asesmen INDI 4.0 BUMN ketika mendapatkan kontrak asesmen dari beberapa BUMN grup dalam waktu berdekatan. Sehingga berdampak pada keterlambatan pemenuhan target penyusunan *roadmap* pemenuhan gap serta implementasi oleh BUMN grup. Selain itu belum terdapat standar *roadmap* pemenuhan gap transformasi *digital/industry 4.0* bagi BUMN.

Dengan memperhatikan kendala pengukuran yang dihadapi pada Tahun 2023, pada 2024 direncanakan akan dilakukan peningkatan terhadap program BUMN yang telah mengimplementasikan *roadmap*/rekomendasi perbaikan level INDI 4.0 yaitu:

- Sosialisasi Aspirasi Pemegang Saham terkait Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun Anggaran 2024 kepada BUMN agar menindaklanjuti hasil asesmen INDI 4.0, dengan ketentuan bagi BUMN yang telah menerapkan *transformasi digital/industry 4.0* agar melaporkan hasil implementasi. Bagi BUMN yang belum menerapkan transformasi *digital/industry 4.0* agar menyusun rencana dan pemenuhan gap sesuai rekomendasi / area

- of improvement dengan memperhatikan tren industri global yang relevan. Selanjutnya mendorong BUMN agar menyampaikan laporan hasil implementasi atau rencana pemenuhan gap melalui Laporan Manajemen Triwulanan dan Tahunan;
- Memberikan standar/guideline atas roadmap pemenuhan gap BUMN dalam rangka akselerasi transformasi digital/ Industry 4.0; dan
 - Melakukan monitoring dan evaluasi penyusunan dan penyampaian hasil implementasi roadmap/action plan BUMN dalam bertransformasi digital/industry 4.0.

Sasaran Strategis 6

BUMN Unggul di Kancah Global

No	SS/IKU	Target	Realisasi	Capaian
15	Jumlah BUMN yang masuk peringkat Global	5 BUMN	6 BUMN	120,00%
16	Pembentukan Holding BUMN	1 Holding	2 Holding	120,00%*

Keterangan : * Apabila % capaian diatas 120%, maka akan terhitung 120%

15. JUMLAH BUMN YANG MASUK PERINGKAT GLOBAL

Rumus Indikator Kinerja	Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023	Persen Capaian	
1	2	3	4	4/2	4/3
Jumlah BUMN yang masuk Peringkat Dunia seperti Global Fortune 500 dan Forbes 2000	5 BUMN	5 BUMN	6 BUMN	120,00%	120,00%

BUMN yang masuk peringkat global seperti *Forbes Global 2000* dan *Fortune Global 500* menjadi pencapaian Indikator Kinerja ini. *Forbes Global 2000*, diterbitkan oleh majalah *Forbes*, melakukan pemeringkatan 2000 perusahaan publik dunia dengan melihat 4 (empat) aspek yaitu *sales*, *profit*, *assets*, dan *market value*. *Fortune Global 500* merupakan sebuah daftar tahunan yang disusun dan diterbitkan oleh majalah *Fortune* yang memeringkatkan 500 perusahaan umum dan milik pemerintah teratas, diperingkatkan berdasarkan total pendapatan yang tertuang di dalam laporan keuangan perusahaan pada tahun fiskal sebelumnya.

Pada tahun 2023, jumlah BUMN yang masuk peringkat Global adalah sebanyak 6 (enam) BUMN, yang melebihi target kinerja sejumlah 5 (lima) BUMN. BUMN yang masuk peringkat Global pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Forbes Global 2000

- PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. – peringkat 308
- PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. – peringkat 418
- PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. – peringkat 788
- PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. – peringkat 931
- PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. – peringkat 1572

Fortune Global 500

PT Pertamina (Persero) – peringkat 141

Pencapaian kinerja dapat diraih karena melakukan transformasi kinerja yang secara konsisten menunjukkan tren positif sebagai bagian dari upaya menjaga dan memperbaiki kinerja usaha yang dilakukan secara berkelanjutan dengan manajemen risiko yang terukur.

Kendala dan tantangan yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja tahun 2023, diantaranya yaitu:

Fortune Global 500

- a. Bagi BUMN klaster Jasa Keuangan, adanya pengetatan likuiditas dan kebijakan kenaikan suku bunga dalam jangka yang panjang sehingga menyebabkan peningkatan *cost of funds* pada masing-masing bank.
- b. Adanya bencana El-Nino di Indonesia yang berdampak pada kualitas aset dengan adanya restrukturisasi pinjaman, sehingga (*Non Performing Loan*) NPL menjadi tinggi.
- c. Pandemi COVID-19 yang telah berdampak signifikan terhadap kinerja operasional maupun kinerja keuangan perusahaan.

Stabilitas kondisi geopolitik yang berpengaruh terhadap beberapa hal, namun tidak terbatas pada peningkatan harga, termasuk harga bahan bakar, harga bahan baku pesawat, hingga kelangkaan *parts* dan *components*.

BUMN yang masuk peringkat global di tahun 2023 sama dengan tahun sebelumnya dengan peringkat yang mengalami peningkatan serta terdapat tambahan 1 (satu) BUMN yang baru masuk ke dalam peringkat global. Adapun rincian BUMN dan peringkat yang masuk ke dalam kedua pemeringkatan tersebut selama beberapa tahun terakhir yaitu:

Kategori	BUMN	Peringkat			
		2020	2021	2022	2023
Forbes Global 2000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	347	362	349	308
	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.	495	507	489	418
	PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk.	708	762	745	788
	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.	1.053	1.742	1.153	931
	PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.	-	-	-	1.572
Fortune Global 500	PT Pertamina (Persero)	-	287	223	141

Meningkatnya peringkat global BUMN di tahun 2023 menunjukkan BUMN telah berhasil bangkit dari pandemi, serta dapat terus tumbuh dan semakin tangguh. Hal ini juga menjadi pengakuan atas transformasi kinerja sebagai bagian dari upaya perbaikan kinerja usaha yang dilakukan secara berkelanjutan, optimalisasi layanan, serta transformasi digital. Transformasi menjadi langkah strategis untuk beradaptasi dengan perubahan bisnis, bergerak lebih lincah dan lebih cepat, serta fokus untuk pengembangan bisnis yang lebih luas dan agresif. Selain itu, *synergy value* BUMN dan anak perusahaan juga telah dilakukan. Sinergi ini mampu memperkuat layanan terutama yang berbasis digital, mendorong inovasi, serta meningkatkan pengalaman bagi konsumen.

PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. masuk pertama kali dalam daftar *Forbes Global 2000* pada tahun 2023. Perusahaan melakukan program restrukturisasi secara komprehensif yang terdiri dari restrukturisasi operasional yang dimulai sejak tahun 2022, yang bertujuan untuk memperbaiki struktur biaya perusahaan, serta restrukturisasi keuangan yang bertujuan untuk memperbaiki neraca perusahaan. Keberhasilan program restrukturisasi tersebut, perusahaan membukukan keuntungan restrukturisasi utang sebesar USD4,2 Miliar per 31 Desember 2022 yang membuat laba bersih setelah pajak pada tahun tersebut menjadi positif USD3,74 Miliar atau sebesar Rp55 Triliun.

Pada tahun 2024, BUMN akan terus berkomitmen untuk menciptakan nilai, baik dari aspek ekonomi maupun sosial bagi masyarakat Indonesia. BUMN akan terus melanjutkan transformasinya dalam memperkuat ekosistem layanan serta strategi yang akan ditempuh dengan mendorong efisiensi untuk memperkuat jaringan bisnis serta mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan. Program penyehatan perusahaan yang telah dilakukan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. akan terus dijalankan serta terus berupaya untuk meningkatkan kapasitas operasional melalui penambahan jumlah armada dan fokus melakukan penerbangan pada rute-rute yang dinilai menguntungkan.

Ke depannya, hal-hal yang akan dilakukan Kementerian BUMN untuk mendukung BUMN di kancah global:

- Kementerian BUMN terus berkomitmen untuk mendorong BUMN dalam menciptakan nilai, baik dari aspek ekonomi maupun sosial bagi masyarakat Indonesia.
- Memberikan arahan strategis kepada BUMN untuk terus melanjutkan transformasinya dalam memperkuat ekosistem layanan serta strategi yang akan ditempuh dengan mendorong efisiensi untuk memperkuat jaringan bisnis serta mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan.
- Melakukan monitoring secara berkala atas program penyehatan perusahaan yang telah dilakukan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. akan terus dijalankan serta terus berupaya untuk meningkatkan kapasitas operasional melalui penambahan jumlah armada dan fokus melakukan penerbangan pada rute-rute yang dinilai menguntungkan.
- Menerbitkan Aspirasi Pemegang Saham/Pemilik Modal untuk Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan dimana di dalamnya memuat mengenai aspirasi untuk dapat melakukan ekspansi yang berkesinambungan yang diharapkan dapat meningkatkan posisi BUMN di kancah global.

16. PEMBENTUKAN HOLDING BUMN ▼

Rumus Indikator Kinerja	Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023	Persen Capaian	
1	2	3	4	4/2	4/3
Jumlah Holding yang terbentuk	4 Holding	1 Holding	2 Holding	50,00%	120,00%*

Keterangan : * Apabila % capaian diatas 120%, maka akan terhitung 120%

Realisasi *holding* yang terbentuk pada tahun 2023 terdapat 2 (dua) *Holding* dari target tahun 2023 sejumlah 1 (satu) *holding*. *Holding* baru yang terbentuk di tahun 2023 adalah:

- Penggabungan melalui pengalihan saham PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (ITDC – Indonesia Tourism Development Corporation) ke dalam *Holding* Aviata – Injourney sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2023. Ini merupakan kelanjutan dari pembentukan *Holding* BUMN Pariwisata dan Pendukung (*Injourney*) yang telah terbentuk tahun 2021.
- Penggabungan atau peleburan Perum Pengangkutan Djakarta (PPD) ke dalam Perum Damri sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2023. Penggabungan BUMN Transportasi Jalan Damri-PPD, akan menciptakan nilai tambah yang dihasilkan dari rencana inisiatif strategis dan transformasi bisnis.

Dalam upaya pembentukan *holding* BUMN, sejumlah kegiatan telah dilaksanakan pada tahun 2023 yaitu:

- a. Koordinasi yang intensif antara Kementerian BUMN dan BUMN yang akan menjadi bagian dari holding tersebut. Kegiatan tersebut melibatkan pemantauan dan pembandingan terhadap standar pembentukan holding, rapat untuk mendalami dan membahas materi penelitian mengenai holding, diskusi kelompok terfokus (FGD), serta kerjasama dengan konsultan untuk membantu merumuskan rencana pembentukan holding BUMN.
- b. Penyusunan Rumusan Kebijakan Pembentukan Holding BUMN. Langkah penyusunan kebijakan pembentukan holding BUMN yang melibatkan koordinasi antara Kementerian BUMN, Kementerian/Lembaga terkait, dan BUMN yang akan menjadi anggota *holding*. Kegiatan ini mencakup rapat untuk mendalami dan membahas materi penelitian mengenai holding, diskusi kelompok terfokus (FGD), serta rapat koordinasi antar Kementerian (PAK) dan rapat harmonisasi Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP). Upaya tersebut bertujuan untuk merinci kebijakan-kebijakan yang diperlukan dalam pembentukan *holding* BUMN.

Kendala atau Tantangan yang dihadapi dalam Pencapaian Target Kinerja Tahun 2023 adalah Proses pembentukan *Holding* BUMN berbasis sektoral merupakan rangkaian langkah yang melibatkan tahapan-tahapan kritis dan memerlukan sebuah pengkajian yang komprehensif. Dalam proses ini, koordinasi lintas instansi menjadi esensial, dan hal ini menjadikan waktu yang dibutuhkan relatif lebih lama. Keberhasilan dalam pembentukan *Holding* BUMN sangat bergantung pada dukungan dan persetujuan Pemerintah. Dukungan ini mencakup koordinasi yang efektif di antara Kementerian yang terlibat serta pelaksanaan yang tepat waktu dan tanpa hambatan dalam penyusunan dan penetapan Peraturan Pemerintah (PP) sebagai dasar hukum yang mendasari pembentukan *Holding* BUMN. Dalam konteks ini, kerjasama antar instansi dan kepatuhan terhadap jadwal yang ditetapkan menjadi kunci dalam memastikan kelancaran dan kesuksesan proses ini.

Program yang akan dilakukan pada tahun 2024 yaitu:

- a. Melakukan peningkatan efisiensi koordinasi di antara Kementerian BUMN, Kementerian/Lembaga terkait, dan BUMN yang akan menjadi bagian holding.
- b. Mengoptimalkan proses pembahasan atau pemahaman mendalam mengenai materi penelitian terkait holding. Ini mencakup kegiatan seperti diskusi kelompok terfokus (FGD-Focus Group Discussion) dan bekerja sama dengan konsultan untuk membantu merumuskan rencana pembentukan Holding BUMN.

TUJUAN IV

MEMAKSIMALKAN KONTRIBUSI BUMN TERHADAP PEMBANGUNAN EKONOMI BERKELANJUTAN

- **Sasaran Strategis 7**
Meningkatnya Daya Saing BUMN

No	SS/IKU	Target	Realisasi	Capaian
17	Kontribusi BUMN Kepada Negara (Dividen, Pajak, PNBP)	Rp597,22 triliun	Rp459,21 triliun*	76,89%

Keterangan : * Data per triwulan III Tahun 2023

17. KONTRIBUSI BUMN KEPADA NEGARA (DIVIDEN, PAJAK, PNPB) ▼

Rumus Indikator Kinerja	Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023	Persen Capaian	
1	2	3	4	4/2	4/3
Data Internal Kementerian BUMN	Rp548,00 Triliun	Rp597,22 Triliun	Rp459,21* Triliun	83,79%	76,89%

Keterangan *Data per Triwulan III Tahun 2023

Realisasi kontribusi BUMN kepada Negara dalam bentuk dividen, pajak dan PNPB Lainnya per triwulan III tahun 2023 sebesar Rp459,21 triliun atau telah tercapai 76,89% dari *target full year* 2023, serta terdapat peningkatan kontribusi dividen yang merupakan dividen tertinggi BUMN sejauh ini. Hal ini utamanya didorong oleh adanya kondisi perekonomian Indonesia yang stabil, penguatan harga komoditas, pemulihan kegiatan ekonomi serta adanya langkah perbaikan portofolio melalui restrukturisasi korporasi.

Perkembangan realisasi kontribusi BUMN dalam 4 (empat) tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Uraian (Rp Triliun) ▼	2020	2021	2022	2023
Dividen	44	30	40	81
Pajak	247	278	410	315*
PNPB Lainnya	86	87	98	63**
TOTAL	377	395	548	469

*) Data realisasi triwulan III Tahun 2023 (70% dari total BUMN)

**) Data realisasi triwulan III Tahun 2023

Program kerja yang telah dilakukan sepanjang tahun 2023 dalam mendorong pencapaian target yaitu:

- Menyusun kebijakan dividen BUMN dengan mempertimbangkan kinerja BUMN.
- Monitoring realisasi dividen dan koordinasi intensif dengan Kementerian Keuangan guna meng-update data setoran dividen.
- Mendorong BUMN untuk melaporkan realisasi kontribusi setiap triwulan pada platform Sistem Informasi Manajemen Kementerian BUMN.

Program yang akan dilakukan pada tahun 2024 yaitu :

- Memperbarui kebijakan dividen BUMN
- Monitoring realisasi dividen dan koordinasi intensif dengan Kementerian Keuangan guna meng-update data setoran dividen.
- Mendorong BUMN untuk melaporkan realisasi kontribusi setiap triwulan pada platform Sistem Informasi Manajemen Kementerian BUMN.

● Sasaran Strategis 8

Kontribusi BUMN Sebagai Agen Pembangunan Nasional

No ▼	SS/IKU ▼	Target ▼	Realisasi ▼	Capaian ▼
18	Realisasi Belanja Modal (CAPEX)	Rp262,60 triliun	Rp182,88 triliun*	69,64%
19	Kontribusi BUMN pada Pengembangan Energi Baru Terbarukan	20,77%	91,17%	120,00%**
20	Persentase penyelesaian tahapan progress PSN untuk tahun 2023 di seluruh kluster BUMN Binaan Kementerian BUIVIN	100,00%	91,88%	91,88%

21	Persentase penyelesaian tahapan progress Proyek SDU untuk tahun 2023 di luar PSN	100,00%	91,15%	91,15%
22	Persentase perusahaan negara yang telah melakukan pengukuran metode <i>Social Return on Investment</i> (SROI)	60,00%	61,79%	102,98%
23	Persentase perusahaan negara yang telah melakukan kegiatan berkonsep <i>Creating Shared Value</i> (CSV)	70,00%	70,73%	101,04%

Keterangan *Data per Triwulan III Tahun 2023

** Apabila % capaian diatas 120%, maka akan terhitung 120%

18 DATA BELANJA MODAL (CAPEX- CAPITAL EXPENDITURE) ▼

Rumus Indikator Kinerja	Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023	Persen Capaian	
1	2	3	4	4/2	4/3
Data Internal Kementerian BUMN	Rp258,70 Triliun	Rp262,60 Triliun	Rp182,77* Triliun	70,69%	69,64%

Keterangan *Data per Triwulan III Tahun 2023

Capex menjadi aspek penting dalam strategi keuangan BUMN. Ini mencerminkan Investasi jangka panjang yang diperlukan untuk memperoleh, memperbaiki, atau memelihara aset fisik dan non fisik yang krusial bagi operasi bisnis. Dengan Capex yang tepat, BUMN dapat meningkatkan efisiensi operasional, baik dengan memperbarui teknologi, meningkatkan kapasitas produksi, atau mematuhi regulasi pemerintah. Selain itu, Capex juga mendukung pertumbuhan bisnis dengan memungkinkan perluasan fasilitas atau investasi dalam aset yang dapat memberikan keunggulan kompetitif bagi BUMN.

Capex BUMN per triwulan III tahun 2023 sebesar Rp182,88 Triliun atau telah tercapai 69,64% dari target keseluruhan Capex BUMN tahun 2023. Capex terbesar tahun 2023 masih didominasi oleh BUMN Klaster Energi Minyak dan Gas yakni PT Pertamina (Persero) dan PT PLN (Persero).

Dalam pencapaian realisasi Capex tahun 2023 tersebut, Kementerian BUMN telah mendorong BUMN untuk melaksanakan proyek-proyek investasi dengan tetap melanjutkan pengembangan lapangan. Untuk memaksimalkan proyek tersebut, program-program yang dapat dilakukan diantaranya:

● Strengthen Core ▼

yakni investasi yang dilakukan di kegiatan yang mendukung bisnis utama perusahaan, namun tidak terbatas pada eksplorasi dan pengembangan bisnis.

● New Green Bussiness ▼

yakni investasi yang dilakukan dalam rangka mendukung penerapan ESG dalam upaya kinerja yang berkelanjutan. Diharapkan operasional bisnis BUMN dapat mengutamakan keseimbangan lingkungan, keseimbangan sosial, serta tetap memperhatikan tata Kelola perusahaan yang baik.

● Digitalization to support business and operational ▼

merupakan investasi yang dilakukan dalam bidang digital dalam rangka untuk mendukung proses bisnis, operasi, dan keberlanjutan perusahaan.

Perbandingan realisasi Capex BUMN selama 4 (empat) tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Capex (Rp T)	2020	2021	2022	TW III 2023
Infrastruktur	209,00	276,60	219,10	156,31
Non Infrastruktur	145,80	38,70	39,60	26,57
Total Capex	354,80	317,30	258,70	182,88

Adapun beberapa hal ataupun program yang dilakukan oleh Kementerian BUMN dalam peningkatan Kontribusi BUMN sebagai Agen Pembangunan Nasional dalam hal realisasi belanja modal pada tahun 2023, yaitu:

- Perbaikan proses perencanaan atas pengusulan capex dengan mempertimbangkan urgensi, prioritas, dan kemampuan keuangan BUMN.
- Monitoring secara berkala terhadap capaian kinerja BUMN dan secara periodik meminta BUMN melaporkan belanja modal serta evaluasinya.

Program kerja yang telah dilakukan akan terus dijalankan pada tahun 2024, yaitu:

- Menerbitkan Aspirasi Pemegang Saham/Pemilik Modal untuk Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan di mana didalamnya memuat mengenai rencana belanja modal (capex) BUMN.
- Untuk proyeksi masa depan, BUMN perlu mempertimbangkan tren investasi yang ada, serta melakukan analisis mendalam tentang faktor-faktor yang dapat mempengaruhi alokasi capex di masa mendatang, termasuk pertumbuhan ekonomi, perubahan regulasi, dan dinamika pasar industri yang relevan.
- Monitoring secara berkala terhadap capaian kinerja BUMN dan secara periodik meminta BUMN melaporkan belanja modal serta evaluasinya.

19 KONTRIBUSI BUMN PADA PENGEMBANGAN ENERGI BARU TERBARUKAN

Rumus Indikator Kinerja	Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023	Persen Capaian	
1	2	3	4	4/2	4/3
Data Internal Kementerian BUMN	36,90%	20,77%	91,17%	120,00%*	120,00%*

Keterangan : * Apabila % capaian diatas 120%, maka akan dihitung 120%

Kementerian BUMN mendukung capaian kinerja Nasional yang tertuang pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKPT) Tahun 2022, Kementerian BUMN juga turut memberikan dukungan berupa pengembangan energi baru terbarukan yang terbagi ke dalam beberapa BUMN dengan uraian kapasitas terpasang tambahan sebagai berikut:

- » Realisasi tambahan kapasitas terpasang EBT pada PT Pertamina (Persero) sebesar 16,29 MW;
- » Realisasi Tambahan Kapasitas EBT oleh PT PLN (Persero) tahun 2023 sebesar 343,40 MW; dan
- » Realisasi Tambahan Kapasita EBT oleh PT LEN Industri (Persero) tahun 2023 sebesar 5,00 MW.

Total kapasitas tambahan terpasang Pembangkit EBT BUMN pada tahun 2023 sebesar 364,69 MW. Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa kontribusi tambahan kapasitas terpasang BUMN terhadap tambahan kapasitas terpasang nasional tahun 2023 sebesar 400 MW adalah 91,17% atau apabila dibandingkan dengan target Kementerian BUMN adalah tercapai sebesar 432,23% dari target 20,77% pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

PT Pertamina (Persero) mendapatkan Tambahan kapasitas terpasang pembangkit EBT sebesar 16,29 MW. Pencapaian EBT tersebut terbesar dikontribusi oleh Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Rumbai (groundmounted) sebesar 5,7 MW, PLTS RU III Plaju sebesar 2,25 MW dan PLTS Rokan Fase-I (Dumai) sebesar 1,99 MW.

PT PLN (Persero) mendapatkan tambahan kapasitas terpasang pembangkit EBT sebesar 343,66 MW. Pencapaian EBT tersebut terbesar dikontribusi oleh PLTP Unit 4 Sorik Marapi Geothermal Power ORC33 sebesar 11 MW, PLTP Unit 4 Sorik Marapi Geothermal Power ORC31 sebesar 10 MW dan PLTA IPP Krueng Isep Ekspansi sebesar 10 MW.

PT Len Industri (Persero) melalui *Independent Power Producer* (IPP) PLTS Kupang yang telah didirikan sejak tahun 2015 memiliki kapasitas produksi per tahunnya sebesar 5MWp. Adapun pada tahun 2023, PT Len Industri (Persero) memberikan kontribusi kapasitas terpasang sebesar 26,56 MW atau sedikit menurun dari tahun sebelumnya (2022) sebesar 32,96 MW. Namun demikian, IPP PLTS Kupang telah berhasil memproduksi energi listrik sebanyak 5.881,67 MWh atau mengalami pertumbuhan 31,11% dari realisasi produksi energi listrik pada tahun 2022.

Program/Aksi yang telah dilakukan untuk pencapaian target tahun 2023 antara lain:

- a. Melakukan *monitoring* yang lebih komprehensif terhadap progress pembangkit yang akan dan sedang dibangun secara berkala.
- b. Melakukan *monitoring* taktis melalui *site visit* di pembangkit-pembangkit EBT yang sedang dibangun.
- c. Monitoring penyelesaian *Engineering Procurement Construction* (EPC) PLTS di masing-masing *Subholding* PT Pertamina (Persero).
- d. Percepatan *originasi project pipeline*, mendorong peningkatan *captive market* untuk penambahan kapasitas terpasang di lingkungan Pertamina.

Program/aksi yang akan dilakukan pada tahun 2024 untuk memastikan peningkatan kualitas kontribusi EBT BUMN yaitu:

- a. Melakukan *monitoring* terhadap progres pembangkit EBT secara berkala.
- b. Pemberian dukungan terkait koordinasi perizinan dan regulasi.
- c. Melakukan *monitoring* taktis melalui *site visit* pada pembangkit-pembangkit EBT.
- d. Revitalisasi mesin, peralatan, dan infrastruktur sipil seperti tiang listrik untuk meningkatkan produksi listrik.
- e. Percepatan proses alih aset PLTS Kupang dari PT LEN ke PT SEI (Anak PT LEN) agar berfokus pada *Renewable Energy*.

20 PERSENTASE PENYELESAIAN TAHAPAN PROGRESS PSN TAHUN 2023
DI SELURUH KLUSTER BUMN BINAAN KEMENTERIAN BUMN

Rumus Indikator Kinerja	Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023	Persen Capaian	
1	2	3	4	4/2	4/3
% Realisasi Penyelesaian tahapan progres PSN/ Target Penyelesaian Proyek PSN	n.a	100,00%	91,88%	n.a	91,88%

Proyek Strategis Nasional (PSN) adalah proyek yang dilaksanakan oleh Pemerintah, yang memiliki sifat strategis untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah.

BUMN berperan penting dalam memberikan dukungan terhadap Pemerintah dalam pembangunan proyek PSN sehingga diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, kesejahteraan masyarakat dan pembangunan di daerah.

Adapun proyek-proyek yang masuk dalam proyek strategis nasional itu antara lain, proyek pembangunan infrastruktur jalan tol; proyek jalan nasional atau strategis nasional non-tol; proyek sarana dan prasarana kereta api antarkota; proyek kereta api dalam kota; proyek revitalisasi bandara; pembangunan bandara baru; proyek pembangunan bandara strategis lain; pembangunan pelabuhan baru dan pengembangan kapasitas; pembangunan kilang minyak; proyek pipa gas atau terminal LPG, dan lain-lain.

Perhitungan target IKU Persentase penyelesaian tahapan Progress PSN untuk Tahun 2023 di seluruh kluster BUMN Binaan Kementerian BUMN adalah dengan membandingkan rata-rata progress PSN Tahun 2023 di seluruh kluster BUMN Binaan Kementerian BUMN dengan target penyelesaian yaitu 100%.

Realisasi Persentase penyelesaian tahapan Progress PSN untuk Tahun 2023 di seluruh kluster BUMN Binaan Kementerian BUMN sebesar 91,88% dari target 100%. Adapun rekapitulasi detail Progres PSN untuk Tahun 2023 di seluruh kluster BUMN Binaan Kementerian BUMN tersaji dalam lampiran. Ketidaktercapaian target dikarenakan kendala mundurnya pekerjaan proyek, kendala pencarian *strategic partner* sebagai upaya *sharing cost* dalam pembangunan proyek, proses pendanaan yang mengalami kemunduran dan kendala lainnya yang menyebabkan keterlambatan penyelesaian proyek secara keseluruhan.

Adapun *Highlight* beberapa Progress PSN Tahun 2023 di seluruh kluster BUMN Binaan Kementerian BUMN sebagai berikut:

» Program Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan – PT PLN (Persero)

Untuk mempercepat Pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan Pemerintah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional mengatur terdapat PSN kepada PT PLN (Persero) untuk melaksanakan Program Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan. Untuk merealisasikan PSN tersebut, Pemerintah memberikan penugasan kepada PT PLN (Persero) untuk melaksanakan Program 35.000 MW meliputi Pembangunan pembangkit, transmisi dan gardu induk.

Dalam pelaksanaan untuk formula tercapainya Persentase Penyelesaian Tahapan Progres PSN untuk Tahun 2023 pada PT PLN (Persero) sebagai berikut:

- Pembangkit dinyatakan sudah selesai apabila sudah *Commercial on Date* (COD) / Sertifikat Laik Operasi (SLO);

- Transmisi dinyatakan sudah selesai apabila sudah memperoleh Sertifikat Laik Operasi (SLO);
- Gardu Induk dinyatakan sudah selesai apabila sudah memperoleh Sertifikat Laik Operasi (SLO).

Realisasi Persentase Penyelesaian tahapan Progres PSN untuk tahun 2023 PT PLN (Persero) rata-rata sebesar 97,23% dari target 100%, dengan rincian sebagai berikut:

- Program Infrastruktur Ketenagalistrikan (Pembangkit) dengan progres realisasi 97,44%;
- Program Infrastruktur Program Infrastruktur Ketenagalistrikan (Transmisi) dengan progres realisasi sebesar 94,53%;
- Program Infrastruktur Ketenagalistrikan (Gardu Induk) dengan progres realisasi sebesar 99,71%.

» Kilang Minyak Tuban

Kilang Minyak Tuban (Ekspansi) merupakan salah satu PSN dengan Nomor 187 berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional.

Cakupan Kilang Minyak Tuban Ekspansi atau *Grass Root Refinery* Tuban (GRR Tuban) yang dilakukan oleh PT Kilang Pertamina Internasional/"PT KPI" (*SH Refining & Petrochemical Pertamina*) dan Rosneft dengan mendirikan *Joint Venture* (JV) di tahun 2016 dengan tujuan untuk meningkatkan produksi BBM berkapasitas 300.000 barel/hari dan *Olefin Cracker* berkapasitas 1.000 KTPA untuk mencapai ketahanan energi.

Capaian target milestone pada tahun 2023 untuk GRR Tuban sebesar 97,5%, dengan penjelasan sebagai berikut:

- EPC Tender tercapai 100% dari target 2023 dengan penjelasan sebagai berikut:
 - a. *Registration & Pre-qualification of participants* pada Q2 2023
 - *Pre-qualification* (PQ) telah dilaksanakan pada tanggal 4 Oktober 2022
 - Pengunduhan dokumen PQ telah dilaksanakan pada 9 Januari 2023
 - Evaluasi PQ telah selesai dilakukan dan hasil PQ telah diumumkan pada 29 Agustus 2023.
 - b. *ITB launching, clarification, dan proposal submission* pada Q4 2023
Penyampaian ITB ke *Pre-Qualified Bidder (EPC Main Package)* release pada 30 November 2023.
- *Final Investment Decision* (FID) dengan pencapaian sebagai berikut:
 - a. *Submission* pada Q2 2023 tercapai 100% dari target.
FID *submission* mulai dijalankan sejak bulan September 2023
 - b. FID pada Q4 2023 In progress FID. Adapun hal-hal yang telah dilakukan menuju FID, yaitu:
 - Pengumuman shortlisted bidders pada tanggal W5 Agustus 2023;
 - Telah dilakukan FGD persiapan check list FID pada tanggal 23-24 November 2023.

» Jalan Tol Trans Sumatera Tahap I

Pencapaian Tahun 2023 Jalan Tol Trans Sumatera Tahap I dengan realisasi sebagai berikut:

- Uji Laik Fungsi/Operasi Tahun 2023, ditargetkan terdapat total 6 seksi pada Jalan Tol Trans Sumatera Tahap I (“JTTS Tahap I”), yang memperoleh dokumen Sertifikat Laik Operasi (SLO) yang diterbitkan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Jalan Tol Ruas Sp. Indralaya – Prabumulih
 - b. Jalan Tol Ruas Sigli – Banda Aceh Seksi Blang Bintang – Kutobaro
 - c. Jalan Tol Ruas Sigli – Banda Aceh Seksi Kutobaro – Baitussalam
 - d. Jalan Tol Ruas Indrapura – Kisaran Seksi Indrapura – Lima Puluh
 - e. Jalan Tol Ruas Binjai – Pangkalan Brandan Seksi Stabat – Kuala Bingai
 - f. Jalan Tol Ruas Binjai – Pangkalan Brandan Seksi Kuala Bingai – Tanjung Pura
 Realisasi yang didapatkan dari rencana tersebut seluruhnya **tercapai**.

- Akumulasi Seksi (Gate to Gate) yang telah memperoleh Sertifikat Laik Operasi dari seluruh JTTS Tahap I, ditargetkan adalah sampai dengan Akhir 2023 diperoleh 40 Seksi (Gate to Gate). Namun pada realisasinya didapatkan 39 Seksi (Gate to Gate), dimana **ketidaktercapaian** adalah pada Jalan Tol Seksi Bangkinang – Pangkalan.

- Ekuivalen Panjang Ruas Tol Terbangun Tahun 2023 untuk Jalan Tol Trans Sumatera Tahap I adalah sepanjang 50,4 Km.

Namun realisasi untuk Panjang Ruas Tahun 2023 untuk Jalan Tol Trans Sumatera Tahap I adalah sepanjang 47,6 km. Ketidaktercapaian ini terjadi pada Jalan Tol Ruas Indrapura – Kisaran, Jalan Tol Ruas Bangkinang – Pangkalan, Jalan Tol Ruas Binjai – Langsa, Jalan Tol Sigli – Banda Aceh

Terkait ketercapaian target Uji Laik Fungsi dan Operasi Tahun 2023 pada Jalan Tol Trans Sumatera Tahap I, didasarkan seperti lahan yang sudah bebas pada semester I tahun 2023 untuk 6 Seksi yang ditargetkan. Selain itu rencana – rencana kerja yang disiapkan oleh Penyedia Jasa (Kontraktor) dapat terealisasi, sehingga Sertifikat Uji Laik Operasi untuk 6 Seksi tersebut diperoleh hingga akhir tahun 2023.

Ketidaktercapaian pada target Akumulasi Seksi (Gate to Gate) yang telah memperoleh Sertifikat Laik Operasi dari seluruh JTTS Tahap I dan target Ekuivalen Panjang Ruas Tol Terbangun Tahun 2023 untuk JTTS Tahap I, didasarkan oleh faktor-faktor sebagai berikut:

- Realisasi Pembebasan Lahan yang tidak sesuai dengan Rencana. Progres Pembebasan Lahan pada Ruas-Ruas yang ditargetkan, terdapat keterlambatan realisasi pembebasan lahannya, disebabkan antara lain:
 - a. Melewati Kawasan Hutan;
 - b. Terdapat daerah yang memiliki struktur sosial berupa tanah adat.
- Terdapat potensi kenaikan biaya konstruksi akibat kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan besi.

- Intensitas Hujan, Intensitas hujan yang cukup tinggi di beberapa Ruas tersebut, sehingga mengurangi produktivitas pekerjaan, seperti pekerjaan timbunan tanah.

Program kerja yang telah dilaksanakan pada tahun 2023 untuk pencapaian Progress PSN Tahun 2023 di seluruh kluster BUMN Binaan Kementerian BUMN adalah sebagai berikut:

- Melakukan monitoring taktis melalui *site visit* pada proyek Pembangunan Proyek PSN yang dibangun oleh BUMN Binaan Kementerian BUMN secara berkala.
- Melakukan monitoring dengan BUMN terkait secara berkala untuk membahas kendala teknis, isu pendanaan dan hal lain yang bersifat strategis untuk mendukung penyelesaian Proyek PSN oleh BUMN Binaan Kementerian BUMN sesuai dengan tata kelola yang baik
- Kementerian BUMN telah melakukan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga lain untuk membahas isu strategis dalam penyelesaian pembangunan PSN yang dibangun oleh BUMN Binaan Kementerian BUMN.

Program kerja yang direncanakan pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- Monitoring secara berkala untuk akselerasi penyelesaian pembangunan proyek PSN yang akan diselesaikan pada tahun 2024.
- Kementerian BUMN akan tetap berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga lain untuk membahas penyelesaian progress PSN pada tahun 2024.
- Monitoring kinerja keuangan dan operasional BUMN tetap terjaga dengan baik dalam melaksanakan penugasan dari Pemerintah untuk pembangunan proyek PSN.

21 PERSENTASE PENYELESAIAN TAHAPAN PROGRESS PROYEK SDU UNTUK TAHUN 2023 DI LUAR PSN

Rumus Indikator Kinerja	Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023	Persen Capaian	
1	2	3	4	4/2	4/3
% Realisasi Penyelesaian tahapan progres Proyek SDU/ Target Penyelesaian Proyek SDU	n.a	100,00%	91,15%	n.a	91,15%

Strategic Delivery Unit (SDU) merupakan unit yang dibentuk oleh Menteri BUMN dalam rangka mengawal dan mendorong percepatan penyelesaian proyek yang menjadi prioritas dan bersifat strategis pada BUMN. Memperhatikan sifat strategis dari proyek SDU tersebut, maka Persentase Penyelesaian tahapan Progres Proyek SDU Tahun 2023 turut dimuat pada Perjanjian Kementerian BUMN Tahun 2023 untuk memastikan monitoring secara berkala proyek tersebut berjalan dengan baik.

Dengan memperhatikan terdapat Proyek SDU yang turut melaksanakan Proyek Strategis Nasional (PSN) Tahun 2023, maka proyek yang termasuk dalam PSN kemudian dikeluarkan dari

penghitungan atas IKU ini untuk kemudian dimasukkan dalam IKU "Persentase Progress penyelesaian PSN".

Penghitungan target atas IKU ini diperoleh dengan membandingkan antara persentase rata-rata progress SDU (non-PSN) yang terealisasi dengan target persentase penyelesaiannya yaitu 100%. Adapun penghitungan persentase progress penyelesaian proyek SDU tersebut dengan cara merinci langkah/tahap yang telah diselesaikan, kemudian dilakukan proporsi persentase progress. Ilustrasi penghitungan realisasi progress Proyek SDU sebagai berikut:

ILUSTRASI PERHITUNGAN PRESENTASE RATA-RATA PROGRES PENYELESAIAN PROYEK SDU NON PSN

A. Proyek Unlock Value

Tahap 1 (Selesai)
Tahap 2 (Selesai)
Tahap 3 (Selesai)
Tahap 4 (Selesai)
Tahap 5 (Selesai)

Progres
4/5 = 80%

% Progress Rata-Rata
(80% + 90%) : 2 =

85%

B. Proyek Jalan Tol

Realisasi 45 km
Target 50 km

Progres
45/50 = 90%

Rincian capaian penyelesaian Proyek SDU non PSN tahun 2023 adalah sebagai berikut:

No	BUMN - Proyek SDU	% Penyelesaian
1	Perhutani : Hutan Sosial	100,00%
2	Pertamina : Hilir Unlock Value	100,00%
3	Mind ID : Inalum Operating Unlock Value	100,00%
4	Mind ID : Inalum Akuisisi Saham Vale	100,00%
5	Biofarma : Biofarma Unlock Value	100,00%
6	Telkom : Data Center Strategic Partnership	100,00%
7	Damri Merger BUMN transportasi	100,00%
8	Pertamina : Pengembangan Kilang – RDMP RU V dan Lawe-Lawe	97,67%
9	Krakatau Steel : Pembuatan Perusahaan Patungan Besi Baja Baru (Rockcheck)	100,00%
10	Himbara : Mitra Transaksi Indonesia Strategic Partnership (EDC & Payment Gateway)	30,66%
11	Pupuk Indonesia : Reformasi Subsidi Pupuk di 2023	100,00%
12	Mind ID : Pembangunan Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR)	100,00%
13	MIND ID : Pembangunan Smelter Freeport	90,50%
14	Pertamina : Akuisisi Blok Minyak dan Gas Sektor Hulu – PJBG	100,00%
15	MIND ID : Unlock Value	100,00%
16	Hutama Karya : Jalan Tol Lintas Sumatera Fase 1 : 1.600 KM	100,00%
17	Jasa Marga : Optimalisasi Value Trans Java Road	80,00%
18	Mind ID : Pengembangan Rare Earth – Front End Engineering Design (FEED)	100,00%
19	Danareksa dan PPA : Holding Danareksa dan pembubaran 7 BUMN	100,00%
Rata-Rata		91,15%

Realisasi persentase rata-rata progres penyelesaian proyek SDU Tahun 2023 tercapai sebesar 91,15% atau lebih rendah dari yang ditargetkan, yaitu 100%. Dimana faktor yang menentukan ketidaktercapaian tersebut antara lain adanya arahan terkait perubahan prioritas, pengaruh bawaan dari COVID-19, serta faktor lainnya.

Dalam mencapai target persentase penyelesaian proyek SDU Tahun 2023, BUMN melalui pembinaan Tim Keasdepan Teknis Kementerian BUMN telah melaksanakan hal sebagai berikut:

- a. Monitoring dan Evaluasi Progres Proyek SDU secara berkala guna memastikan penyelesaian.
- b. Mendorong percepatan penyelesaian Proyek SDU melalui berbagai aksi, contohnya percepatan originasi project pipeline, perjanjian kerja sama, pembahasan bersama dengan stakeholder terkait, dan sebagainya.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pencapaian proyek SDU di tahun 2024, adapun hal yang akan dilaksanakan:

- a. Meningkatkan efektivitas pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Proyek SDU secara berkala.
- b. Meningkatkan dukungan koordinasi percepatan proyek SDU.
- c. Mendorong pembentukan *Task Force/Dedicated Team* yang diperlukan untuk percepatan pelaksanaan proyek SDU.
- d. Meningkatkan efektivitas pelaksanaan proyek SDU dengan aksi-aksi utama seperti pelaksanaan kerja sama, pembahasan bersama stakeholder, dan sebagainya.

22. PERSENTASE PERUSAHAAN NEGARA YANG TELAH MELAKUKAN PENGUKURAN METODE SOCIAL RETURN ON INVESTMENT (SROI) ▼

Rumus Indikator Kinerja	Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023	Persen Capaian	
1	2	3	4	4/2	4/3
Data Internal Kementerian BUMN	n.a	60,00%	61,79%	n.a	102,98%

Social Return on Investment (SROI) adalah metode yang digunakan untuk mengukur keberhasilan suatu program sosial lingkungan. SROI membantu Perusahaan untuk memahami nilai sosial dari program melalui penilaian yang terstruktur dan mendalam. SROI adalah sebuah perhitungan hasil untuk mengukur dan memperhitungkan nilai investasi modal pada kegiatan sosial yang bertujuan untuk mengurangi ketidaksetaraan dan degradasi lingkungan serta meningkatkan kesejahteraan dengan memasukkan biaya dan manfaat sosial, lingkungan, dan ekonomi.

Pengukuran Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) BUMN melalui SROI telah dituangkan dalam *Key Performance Indicator* (KPI) Tahun 2023, bahwa indikator penilaian adalah melakukan pengukuran dampak terhadap Program TJSL BUMN menggunakan metode SROI. BUMN ditargetkan untuk menilai minimal 3 (tiga) Program TJSL BUMN dengan menggunakan metode SROI. Rumus dalam pengukuran SROI adalah perbandingan antara nilai manfaat yang diterima dibandingkan dengan nilai investasi atau besaran biaya program yang diberikan perusahaan. Keberhasilan Program TJSL BUMN menggunakan metode SROI ditunjukkan apabila hasil perbandingan senilai ≥ 1 , yaitu nilai dampak yang dihasilkan atas pelaksanaan program sama dengan atau lebih besar dari biaya atas pelaksanaan program.

Realisasi perusahaan yang melakukan perhitungan SROI atas Program TJSL BUMN di Tahun 2023 sebanyak 76 Perusahaan atau 61,79% dari total sebanyak 123 Perusahaan. Adapun Indikator ini merupakan indikator baru dan belum ada pada tahun sebelumnya.

Program kerja yang telah dilakukan pada tahun 2023 untuk mendorong ketercapaian target BUMN yang melakukan pengukuran SROI, Kementerian BUMN menginisiasi penyelenggaraan Bimbingan Teknis (BIMTEK) dan Workshop Pengukuran Dampak program TJSL dengan metode SROI. Pelaksanaan workshop SROI dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kompetensi dan membekali kemampuan pegawai TJSL BUMN dalam menghitung dampak investasi sosial secara akurat terhadap program TJSL di masing-masing BUMN/anak BUMN. Workshop tersebut telah sukses dilaksanakan pada tahun 2023 yang terbagi pelaksanaannya pada 2 batch dengan total peserta 150 pegawai dari >56 BUMN dan anak perusahaan BUMN.

Contoh penilaian SROI pada Program TJSL BUMN di Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

No	Nama Program	Nilai SROI	Dampak
1	Jasa Raharja <i>Road Safety Innovation</i>	4,36	- Melahirkan 10 inovasi terkait pencegahan dan penurunan kecelakaan lalu lintas - Sebanyak 100 mahasiswa mendapatkan pengetahuan tentang kesadaran permasalahan kecelakaan lalu lintas - Melibatkan 20 Universitas untuk memberikan kontribusi inovasi terkait masalah kecelakaan lalu lintas
2	Program Pengembangan Desa Ekowisata Kulati	1,95	- Mengurangi sampah plastik sebanyak 200 kg/bulan - Kelangkaan solar pada masa pandemic dikarenakan pasokan solar terhenti di pulau Tomia, akan tetapi nelayan desa kulati masih dapat berlayar dikarenakan mesin phylolisis yang mengubah sampah menjadi solar 40 liter/hari - Habitat ikan di desa kulati bertambah sehingga nelayan dapat menghasilkan 10 kg dalam sehari
3	Pemberdayaan Disabilitas dan Ahli Waris Korban Kecelakaan Lalu Lintas	2	- Memberikan keterampilan usaha atau meningkatkan penghasilan kepada 50 ahli waris korban laka lantans - Mendapatkan penghasilan tambahan sebesar ± Rp 2 juta/bulan - Mendapatkan keterampilan penjualan online di dua marketplace, gofood dan shopee food

PENINGKATAN SARANA DIGITAL MASYARAKAT

• Deskripsi Program

Komitmen Telkom dalam mendukung bidang Pendidikan digital di Indonesia secara berkesinambungan dengan menyampaikan bantuan berupa **Sarana Digitalisasi Pendidikan**

• Tujuan

- > Menyelenggarakan **Pendidikan dan Pembelajaran yang inklusif** bagi masyarakat dengan pemanfaatan teknologi digital
- > Membantu masyarakat dalam **pembelajaran mandiri**

• Indikator TPB

- > 4.4.1.(a) Proporsi remaja usia (15-24 tahun) dan dewasa (usia 15-59 tahun) dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)
- > 4.a.1* Proporsi sekolah dengan akses terhadap: internet untuk tujuan pengajaran, komputer untuk tujuan pengajaran

Rujukan : Metadata indikator TPB Indonesia, Pilar Sosial, Bapenas 2020

• Deliverables

- > **Bantuan device** (komputer)
- > **Bantuan akses internet** (network)
Bantuan akses internet belajar dengan menggunakan indihome/ Orbit, dan biaya bulanan selama 1 tahun (atau 6 bulan), perangkat Wifi, dan CPE yang diperlukan
- > **Bantuan Materi Pendidikan** (aplikasi)
Materi/ konten interaktif pendidikan berbasis Cloud sehingga bisa diakses menggunakan internet pada aplikasi Pijar

• Dokumentasi



• Capaian

364 Titik Sekolah dari target 200 titik sekolah (▲ 182%) berupa dukungan infrastruktur digital : komputer, akses internet, dan login access (Pijar Sekolah)

• Dampak

- > Pelaksanaan Program Peningkatan Sarana Digital Masyarakat telah memberikan dampak kepada **18.200 jiwa** (remaja dan deasa) penerima manfaat
- > Nilai **Social Return of Investment** program ini adalah 1 : 1,29

Program kerja yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 sebagai berikut:

- Melakukan pemetaan dan evaluasi atas penilaian mandiri SROI oleh seluruh BUMN. Kegiatan pemetaan dan evaluasi ini akan dilaksanakan sekitar periode Akhir Semester I 2024 sebagai bentuk pemantauan atas realisasi pengukuran SROI oleh BUMN.
- Menginisiasi pelaksanaan *Forum Group Discussion* (FGD) antara BUMN dengan ahli profesional serta *benchmark* pengukuran SROI pada perusahaan global.
- Monitoring dan evaluasi Program TJSL yang akan dianalisis dan pelaksanaan perhitungan SROI menggunakan independen assessor pada Program TJSL BUMN tertentu. Rencana ini merupakan inisiasi baru dan telah dituangkan dalam alokasi anggaran Asisten Deputi Bidang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebesar Rp1,5 Miliar yang saat ini masih dalam proses pengajuan penetapan alokasi anggaran

23. PERSENTASE PERUSAHAAN NEGARA YANG TELAH MELAKUKAN KEGIATAN BERKONSEP CREATING SHARED VALUE (CSV) ▼

Rumus Indikator Kinerja	Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023	Persen Capaian	
1	2	3	4	4/2	4/3
Data Internal Kementerian BUMN	n.a	70,00%	70,73%	n.a	101,04%

Kementerian BUMN telah mendorong BUMN dalam pelaksanaan Program TJSL BUMN menggunakan pendekatan CSV. BUMN tidak hanya berkewajiban untuk beroperasi secara bertanggungjawab, tapi juga memiliki kesempatan yang besar untuk dapat menciptakan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

Pendekatan CSV adalah ketika perusahaan yang menciptakan nilai bersama melalui penanganan sosial sebagai bagian dari strategi inti perusahaan untuk mencapai kapitalisasi pasar yang lebih tinggi dan keunggulan kompetitif yang bertahan lama.

Karakteristik dari program dengan pendekatan CSV adalah:

a.	Memberikan manfaat bagi perusahaan dan masyarakat	c.	Inovasi yang menghasilkan efisiensi
b.	Membangun keunggulan kompetitif dengan memasukan kebutuhan sosial	d.	Terintegritas dengan strategi bisnis perusahaan

RECONCEIVING PRODUCT AND MARKET

Merekonstruksi Produk dan Pasar
Intinya melakukan inovasi produk dan menciptakan pasar baru, pasar yang belum tersentuh saat ini dapat dijangkau

Contoh :

- Pengendalian program memilah sampah menabung emas
- PLN memanfaatkan Faba untuk bangun rumah
- Pertamina program Pinky Movement

REDEFINING PRODUCTIVITY THE VALUE CHAIN

Meredefinisikan ulang produktifitas dalam rantai nilai
perusahaan dapat memperbaiki kualitas dan kuantitas secara biaya distribusi

Contoh :

Pendanaan kepada 6 BUMDes di sekitar pabrik Rembang, untuk menguatkan program kemitraan dan menjadi bagian dari supply chain perusahaan dan membentuk kelembagaan yaitu PT SMOR

ENABLING LOCAL CLUSTER DEVELOPMENT

Melibatkan masyarakat dalam pengembangan dan pemberdayaan komunitas untuk membentuk bisnis perusahaan

Contoh :

- Pertamina Lubricant: Enduro Student Program
- Program coconet PT Antam
- Pengembangan petani minyak Atsiri PT Kimia Farma

Pada tahun 2023, terdapat 87 Perusahaan atau 70,73% dari total sebanyak 123 Perusahaan, telah merealisasikan Program TJSL BUMN dengan pendekatan CSV dengan total realisasi pendanaan sebesar Rp309 Miliar. Beberapa contoh Program TJSL BUMN yang dijalankan dengan pendekatan CSV pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- » PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. – Program Wirausaha Muda Mandiri (WMM);
- » PT Kimia Farma – Program Bina Industri Desa Olis Center;
- » PT Jasa Raharja – Program Jasa Raharja Road Safety Innovation;
- » PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. – Desa BRlliaN

Kementerian BUMN mendorong pencapaian pelaksanaan Program TJSL BUMN dengan konsep CSV telah menuangkan target CSV dalam *Key Performance Indicator* (KPI) Program TJSL BUMN di Tahun 2023.

Hal yang dilakukan pada tahun 2023, Kementerian BUMN melakukan monitoring realisasi Program TJSL BUMN dengan pendekatan CSV. Monitoring atau pengawasan dilakukan dalam beberapa bentuk yaitu:

- » Pendataan realisasi Program TJSL dengan pendekatan CSV secara periodik.
- » Kunjungan dengan menemui para penerima manfaat untuk mengetahui secara langsung dampak dan nilai yang diterima oleh masyarakat atas adanya program.

Program kerja yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 sebagai berikut:

- a. Pada tahun 2024, Kementerian BUMN bersama Forum TJSL akan mengadakan pelatihan peningkatan kemampuan dalam membentuk Program TJSL dengan pendekatan CSV.
- b. Forum TJSL disini dikarenakan Forum TJSL merupakan *strategic partner* dari Asisten Deputi Bidang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, sebagai perpanjangan tangan untuk mewujudkan rencana dalam pengembangan Program TJSL di BUMN. Pelatihan ini diikuti oleh pimpinan atau tim pelaksana Program TJSL di BUMN

Sasaran Strategis 9

Kontribusi BUMN dalam Peningkatan Value BUMN untuk Pemegang Saham

No	SS/IKU	Target	Realisasi	Capaian
24	Net Profit	Rp196,22 triliun	Rp231,50 triliun*	117,78%
25	Kapitalisasi Saham BUMN	Rp2.215,00 triliun	Rp2.467,89 triliun	111,42%

Keterangan : * Data per Triwulan III Tahun 2023

24. NET PROFIT

Rumus Indikator Kinerja	Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023	Persen Capaian	
1	2	3	4	4/2	4/3
Data Internal Kementerian BUMN	Rp308,99 Triliun	Rp196,22 Triliun	Rp231,50 Triliun*	74,92%	117,97%

Keterangan : * Data per Triwulan III Tahun 2023

Net profit merupakan salah satu tolok ukur utama kesehatan keuangan suatu perusahaan. *Net profit* yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan memiliki keuntungan yang baik dan kondisi keuangan yang sehat. *Net profit* dapat membantu *stakeholders* untuk menilai posisi keuangan yang dimiliki dibandingkan dengan bisnis serupa lainnya. *Net profit* juga melihat kekurangan bisnis atau juga dapat mengembangkan rencana pertumbuhan bisnis yang lebih terukur dan terarah.

Sejak tahun 2021, Kementerian BUMN telah melakukan proses konsolidasi Laporan Keuangan seluruh BUMN yang menghasilkan Laporan Keuangan Gabungan BUMN melalui platform Sistem Informasi Manajemen Kementerian BUMN yang telah direviu oleh Kantor Akuntan Publik. Laporan Keuangan Gabungan BUMN tersebut telah memperhitungkan proses eliminasi transaksi pihak berelasi antar BUMN. Pengukuran nilai *net profit* diambil dari Sistem Informasi Manajemen Kementerian BUMN untuk data laporan keuangan *unaudited* BUMN.

Realisasi *net profit* BUMN per triwulan III tahun 2023 sebesar Rp231,50 triliun atau telah tercapai 117,97% dibandingkan dengan *target full year* 2023 seiring dengan peningkatan kinerja pada sebagian besar klaster pada tahun 2023. Hal ini didorong oleh adanya kondisi perekonomian Indonesia yang mulai stabil, menguatnya kurs Rupiah, pemulihan kegiatan ekonomi serta adanya langkah perbaikan portofolio melalui restrukturisasi korporasi.

Dalam mencapai kinerja *net profit* yang melebihi target, kendala dan tantangan tidak luput dari hal yang perlu dihadapi, diantaranya proses restrukturisasi perusahaan yang masih terus berjalan, penurunan beberapa harga komoditas dan harga minyak dunia, penurunan *demand* sehingga menurunkan volume penjualan.

Perbandingan realisasi *net profit* BUMN selama 4 (empat) tahun terakhir adalah sebagai berikut:

(Rp Triliun)	2020	2021	2022	TW III 2023
<i>Net Profit</i> Tanpa Eliminasi	41,04	126,86	341,10	256,45
<i>Net Profit</i> Dengan Eliminasi	13,29	124,71	308,99	231,50

Berikut program yang telah dilakukan dalam pencapaian target 2023 yaitu:

- Menerbitkan Aspirasi Pemegang Saham/Pemilik Modal kepada BUMN untuk Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2023 yang di dalamnya terdapat aspirasi untuk dapat melakukan ekspansi yang berkesinambungan dengan parameter ekspansi EBITDA, CFO, *Net Profit* dan Dividen.
- Melakukan kajian/pendalaman atas draft Kontrak Manajemen Tahun 2023 yang memuat target *Key Performance Indicator* Direksi BUMN secara kolegal untuk memastikan pencapaian sasaran-sasaran strategis BUMN, meningkatkan efektivitas pengendalian kinerja BUMN, memastikan BUMN beroperasi pada koridor risiko yang dapat ditoleransi yang ditetapkan sebelumnya, mengoptimalkan upaya kapitalisasi potensi BUMN, mengakselerasi pertumbuhan kinerja BUMN, dan menilai kinerja Direksi BUMN secara adil (*fair*).
- Melakukan monitoring kinerja BUMN secara triwulanan.
- Melakukan kajian/pendalaman atas aksi korporasi yang dilakukan BUMN.

Program kerja yang telah dilakukan akan terus dijalankan pada tahun 2024, yaitu:

- a. Menerbitkan Aspirasi Pemegang Saham/Pemilik Modal untuk Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2024 yang di dalamnya terdapat aspirasi untuk dapat melakukan ekspansi yang berkesinambungan dengan parameter ekspansi EBITDA, CFO, Net Profit dan Dividen.
- b. Melakukan kajian/pendalaman atas Kontrak Manajemen Tahun 2024 yang memuat target Key Performance Indicator Direksi BUMN secara kolegal untuk memastikan pencapaian sasaran-sasaran strategis BUMN, meningkatkan efektivitas pengendalian kinerja BUMN, memastikan BUMN beroperasi pada koridor risiko yang dapat ditoleransi yang ditetapkan sebelumnya, mengoptimalkan upaya kapitalisasi potensi BUMN, mengakselerasi pertumbuhan kinerja BUMN, dan menilai kinerja Direksi BUMN secara adil (*fair*).
- c. Melakukan monitoring kinerja BUMN secara triwulanan.
- d. Melakukan kajian/pendalaman atas aksi korporasi yang dilakukan BUMN.

25. KAPASITAS SAHAM BUMN ▼

Rumus Indikator Kinerja	Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023	Persen Capaian	
1	2	3	4	4/2	4/3
Data Internal Kementerian BUMN	Rp2.201 Triliun	Rp2.215 Triliun	Rp2.467,89 Triliun	112,12%	111,41%

Kapitalisasi Saham BUMN dan Anak BUMN pada akhir tahun 2023 tercatat sebesar Rp2.467,89 Triliun, lebih tinggi Rp252,89 triliun dibandingkan target sebesar Rp2.215 Triliun. BUMN telah berkontribusi besar di bidang pasar modal dengan kontribusi kapitalisasi pasar pada tahun 2023 dengan mencapai 21% dari total kapitalisasi pasar di BEI. Terdapat 4 (empat) emiten BUMN yang masuk dalam 10 (sepuluh) emiten dengan kapitalisasi pasar terbesar, yaitu PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk., dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Transformasi kinerja yang terus dilakukan secara berkelanjutan menjadi hal yang penting bagi perusahaan untuk dapat menjaga dan meningkatkan perbaikan kinerja.

Tantangan yang dihadapi BUMN dalam pencapaian target kapitalisasi pasar tahun 2023, antara lain kerentanan pasar akibat ketidakpastian global dan kondisi pasca pandemi yang juga berpengaruh pada perlambatan aktivitas ekonomi global serta adanya peningkatan tensi geopolitik serta adanya perubahan dalam regulasi industri atau kebijakan.

Hingga tahun 2023, terdapat 37 BUMN dan Anak BUMN yang telah terdaftar pada bursa saham di mana sepanjang tahun 2023 terdapat penambahan satu Anak BUMN yang melakukan IPO yaitu PT Pertamina Geothermal Energy Tbk. sehingga peningkatan kinerja BUMN sepanjang tahun 2023 dan penambahan jumlah BUMN serta Anak BUMN yang IPO dapat meningkatkan kapitalisasi saham BUMN tahun 2023. Adapun realisasi kapitalisasi saham BUMN dan Anak BUMN pada tahun 2023 meningkat Rp266,89 Triliun dari akhir tahun sebelumnya sebesar Rp2.201 Triliun atau menjadi Rp2.467,89 Triliun di akhir tahun 2023.

Pada tahun 2023 yang merupakan kondisi pasca pandemi COVID-19, Kementerian BUMN telah mendorong BUMN untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan tata kelola (*governance*). Selain itu, Kementerian BUMN telah senantiasa mengawal program transformasi kinerja serta berbagai program restrukturisasi yang telah dilakukan BUMN yang dinilai krusial memberikan kontribusi pada perekonomian Indonesia dan berpengaruh pada kapitalisasi

saham BUMN. Kementerian BUMN juga mendorong BUMN Tbk untuk melakukan penerapan prinsip *Environmental, Social dan Governance* (ESG) dan melakukan pengungkapan ESG yang diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan investor dan menggerakkan kapitalisasi pasar. Ke depannya, hal-hal yang akan dilakukan Kementerian BUMN yaitu:

- Penyampaian surat kepada BUMN perihal tindak lanjut pemenuhan gap untuk perbaikan level INDI 4.0 BUMN.
- Mendorong BUMN melakukan penerapan prinsip *Environmental, Social dan Governance* (ESG) dinilai dapat menjadi motor dalam menggerakkan kapitalisasi pasar.
- Melakukan monitoring kinerja kapitalisasi saham BUMN secara triwulanan.
- Melakukan kajian/pendalaman atas aksi korporasi yang dilakukan BUMN yang dapat mempengaruhi kinerja saham BUMN.
- Melakukan kajian/pendalaman atas Kontrak Manajemen Tahun 2024 yang mungkin akan memuat target *Key Performance Indicator* Direksi BUMN secara kolegal untuk memastikan pencapaian sasaran-sasaran strategis BUMN, meningkatkan efektivitas pengendalian kinerja BUMN, memastikan BUMN beroperasi pada koridor risiko yang dapat ditoleransi yang ditetapkan sebelumnya, mengoptimalkan upaya kapitalisasi potensi BUMN, mengakselerasi pertumbuhan kinerja BUMN, dan menilai kinerja Direksi BUMN secara adil (*fair*).

C.

REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN BUMN

Pagu anggaran Kementerian BUMN tahun 2023 ditetapkan sebesar Rp241.525.168.000,-. Realisasi anggaran Kementerian BUMN sampai dengan 31 Desember 2023 tercatat sebesar Rp238.074.180.645,- atau sebesar 98,57% dengan rincian sebagai berikut:

No	Unit Kerja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Wakil Menteri BUMN	12.685.205.000	12.652.485.132	99,74%
2	Sekretariat Kementerian BUMN	171.308.084.000	168.364.953.714	98,28%
3	Deputi Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko	19.184.699.000	18.931.396.793	98,68%
4	Deputi Bidang Hukum dan Perundang-Undangan	3.211.619.000	3.181.159.838	99,05%
5	Deputi Bidang Sumber Daya Manusia, Teknologi, dan Informasi	35.135.561.000	34.944.185.168	99,46%
TOTAL		241.525.168.000	238.074.180.645	98,57%

Perbandingan capaian realisasi anggaran 4 (empat) tahun terakhir (2020 – 2023) adalah sebagai berikut:

No	Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2020	266.392.551.000	260.130.543.993	97,65%
2	2021	193.047.600.000	190.942.482.059	98,91%
3	2022	198.426.521.000	196.555.127.045	99,06%
4	2023	241.525.168.000	238.074.180.645	98,57%

Selama 4 (empat) tahun terakhir, Kementerian BUMN secara konsisten memiliki capaian realisasi anggaran di atas 97,00%. Hal ini menunjukkan bahwa komitmen Kementerian BUMN dalam mengimplementasikan Program Berbasis Anggaran berjalan secara efektif. Penggunaan Anggaran Kementerian BUMN Tahun 2023 mendukung capaian output yang bersifat strategis pada tahun 2023, antara lain:

- a. Legal Opinion atas Pelaksanaan Hukum Korporasi BUMN;
- b. Laporan Keuangan Gabungan BUMN;
- c. Rumusan Kebijakan Penetapan Dividen BUMN;
- d. Direksi dan Dewan Komisaris atan Dewan Pengawas BUMN Group yang ditetapkan sesuai ketentuan; dan
- e. Kebijakan Penguatan Daya Saing dan Penugasan BUMN.



4

BAB IV PENUTUP

PENUTUP

Laporan Kinerja Kementerian BUMN Tahun 2023 menyajikan berbagai keberhasilan maupun tantangan dalam mencapai sasaran strategis Kementerian BUMN tahun 2023 dan perkembangan tahun-tahun sebelumnya yang tercermin pada capaian Indikator Kinerja Utama (IKU).

Secara umum capaian sasaran strategis menunjukkan perkembangan yang signifikan, meskipun terdapat indikator yang belum mencapai target yang diharapkan. Hal tersebut disebabkan beberapa indikator kinerja membutuhkan komitmen, keterlibatan, dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dunia usaha dan civil society. Capaian kinerja Kementerian BUMN tahun 2023 dapat dinyatakan “berhasil”, karena 19 (sembilan belas) dari 25 (dua puluh lima) Target IKU Kinerja Sasaran Strategis tercapai 100% atau lebih dari 100%, dengan rincian:

- a. Sebanyak 12 IKU berhasil terealisasi di atas 100% dari target;
- b. Sebanyak 7 IKU berhasil terealisasi tepat 100% dari target;
- c. Sebanyak 6 IKU terealisasi di bawah 100% dari target.

Selama tahun 2023, Kementerian BUMN sebagai Pembina BUMN telah berhasil mendorong peningkatan kinerja BUMN khususnya pasca pandemik COVID-19. Hal ini tercermin pada perolehan laba bersih BUMN tahun 2023 (data per Triwulan III Tahun 2023) mencapai sebesar Rp231,50 Triliun atau 117,97% dari target yang telah ditetapkan. Realisasi dividen BUMN untuk Negara pada tahun 2023 berhasil mencapai Rp81 Triliun, meningkat Rp40 Triliun dari realisasi dividen tahun buku 2022.

Sebagai agen pembangunan nasional, BUMN berpartisipasi aktif untuk mendukung Pemerintah dalam pengembangan ekonomi dan pembangunan nasional. Salah satunya BUMN berperan aktif dalam penyelesaian proyek-proyek strategis nasional antara lain Program Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan, Kilang Minyak Tuban, Jalan Tol Trans Sumatera Tahap I, dan lain-lain.

Pada tahun 2024, Kementerian BUMN akan semakin meningkatkan kualitas pembinaan dan pengawasan BUMN dengan berpedoman pada visi misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. BUMN Indonesia diharapkan dapat terus meningkatkan kualitas kinerja dan menjadi BUMN yang maju baik di level domestik maupun di level internasional.

LAMPIRAN



KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Jl. Medan Merdeka Selatan No. 13 Jakarta 10110 Indonesia
Telp. 021-29935678 | Fax. 021-29935740 | www.bumn.go.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU LAPORAN KINERJA KEMENTERIAN BUMN TAHUN ANGGARAN 2023

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Kementerian BUMN untuk Tahun Anggaran 2023 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Kementerian BUMN.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Jakarta, 29 Februari 2024
Inspektur,

Suprianto
NIP 196511151986031001

**KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA**Jl. Medan Merdeka Selatan No. 13 Jakarta 10110 Indonesia
Telp. 021-29935678 | Fax. 021-29935740 | www.bumn.go.id**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA****PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Erick Thohir

Jabatan : Menteri BUMN

Pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 30 Desember 2022

**MENTERI
BADAN USAHA MILIK NEGARA**


ERICK THOHIR



KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Jl. Medan Merdeka Selatan No. 13 Jakarta 10110 Indonesia
Telp. 021-29935678 | Fax. 021-29935740 | www.bumn.go.id

**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2023**

Unit Organisasi : Kementerian Badan Usaha Milik Negara
Tahun Anggaran : 2023

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2023
A. Mewujudkan Kementerian BUMN Sebagai Pembina dan Pengawas BUMN yang Profesional			
1	Menciptakan SDM yang Unggul dan Profesional	1) Peningkatan Indeks Profesionalitas ASN	84,00 (Tinggi)
		2) Produktivitas Tenaga Kerja BUMN	Rp6,96 M/Org
		3) Rasio Keterwakilan Perempuan dalam Direksi BUMN	25%
		4) Rasio Keterwakilan Talenta Muda dalam Direksi BUMN	10%
2	Menciptakan organisasi yang kuat, sehat dan akuntabel	5) Indeks <i>E-Goverment</i> (SPBE)	3,50 (Indeks)
		6) Opini BPK atas Laporan Keuangan Kementerian BUMN	WTP
B. Mewujudkan Kemandirian dan Korporatisasi BUMN			
3	Meningkatnya Tata Kelola BUMN sebagai korporasi	7) Rasio BUMN dengan tingkat Kesehatan Kategori Sehat	70%
		8) Persentase Penyelesaian Harmonisasi Regulasi Tata Kelola BUMN	100%
		9) Tingkat Kepatuhan BUMN dalam menindaklanjuti Regulasi dan Kebijakan	100%
		10) Penyelesaian Deregulasi Peraturan Menteri BUMN (Omnibus Permen Kementerian BUMN)	100%
4	Penguatan Kapasitas BUMN	11) Jumlah BUMN dan Anak Usaha yang telah melakukan IPO	37 BUMN/Anak
		12) Penyelesaian Restrukturisasi Hutang BUMN (RDI/SLA, Hutang tidak produktif, BUMN tidak sehat)	Rp3,02 Triliun



KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Jl. Medan Merdeka Selatan No. 13 Jakarta 10110 Indonesia
Telp. 021-29935678 | Fax. 021-29935740 | www.bumn.go.id

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2023
C. Meningkatkan Keunggulan dan Daya Saing BUMN			
5	Meningkatnya Daya Saing BUMN	13) Peningkatan Pasar BUMN ke Luar Negeri (Jumlah Negara)	48 Negara
		14) BUMN yang telah mengimplementasikan roadmap transformasi digital / INDI 4.0	24 BUMN
6	BUMN Unggul di Kancan Global	15) Jumlah BUMN yang Masuk Peringkat Global	5 BUMN
		16) Pembentukan <i>Holding</i> BUMN	1 <i>Holding</i>
D. Memaksimalkan Kontribusi BUMN Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan			
7	Kontribusi BUMN Terhadap Penerimaan Negara	17) Kontribusi BUMN Kepada Negara (Dividen, Pajak, PNBP)	Rp597,22 Triliun
8	Kontribusi BUMN Sebagai Agen Pembangunan Nasional	18) Realisasi Belanja Modal (CAPEX)	Rp262,60 Triliun
		19) Kontribusi BUMN pada Pengembangan Energi Baru Terbarukan	20,77%
		20) Persentase penyelesaian tahapan progress PSN untuk tahun 2023 di seluruh kluster BUMN Binaan Kementerian BUMN	100%
		21) Persentase penyelesaian tahapan progress Proyek SDU untuk tahun 2023 di luar PSN.	100%
		22) Persentase perusahaan negara yang telah melakukan pengukuran metode <i>Social Return on Investment</i> (SROI)	60%
		23) Persentase perusahaan negara yang telah melakukan kegiatan berkonsep <i>Creating Shared Value</i> (CSV)	70%
9	Kontribusi BUMN dalam Peningkatan <i>Value</i> BUMN untuk Pemegang Saham	24) Net Profit	Rp196,22 Triliun
		25) Kapitalisasi Saham BUMN	Rp2.215 Triliun



KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Jl. Medan Merdeka Selatan No. 13 Jakarta 10110 Indonesia
Telp. 021-29935678 | Fax. 021-29935740 | www.bumn.go.id

Program

Anggaran

1. Program Pengembangan dan Pengawasan BUMN	Rp 79.737.620.000,00
2. Program Dukungan Manajemen	Rp180.666.874.000,00
Total Anggaran	Rp260.404.494.000,00

Jakarta, 30 Desember 2022

**MENTERI
BADAN USAHA MILIK NEGARA**


ERICK THOHIR 

Progress Penyelesaian PSN 2023 seluruh Cluster BUMN Binaan Kementerian BUMN

No	Unit	Proyek Strategis Nasional	Milestone yang dilaksanakan pada tahun 2023	Target yang Selesai di Tahun 2023	Progress Tahun 2023	
1	Asisten Deputi Bidang Industri Energi, Minyak dan Gas	PT Pertamina (Persero)				
		1. Kilang Minyak Tuban (Ekspansi)	EPC Tender	- Registration & Pre-qualification of Participants (Q2 2023)	100%	
				- ITB Launching, Clarification, Proposal Submission (Q4 2023)	100%	
				- Submission (Q2 2023)	100%	
				Final Investment Decision (FID)	- FID (Q4 2023)	90%
		2. Upgrading Kilang Eksisting				
		a. RDMP RU IV Cilacap	TOR BED	- Partnership (Q2 2023)	90%	
				- TOR Pre-FS	100%	
		b. Pengembangan Kilang RDMP RU V Balikpapan dan Lawe-lawe	EPC (Engineering, Procurement & Construction) Lawe-lawe	- Operational Acceptance (OA) Tahap 1 - Pipa Transfer Line 20" (Q2 2023)	100%	
			Early Works	- EPC Modifikasi Tanki (Q4 2023)	93%	
		c. RDMP RU II Dumai	TOR (Term of Reference) BED (Basic Engineering Design)	- Partnership (Q3 2023)	100%	
		d. RDMP RU III Plaju	TOR BED	- Partnership (Q2 2023)	90%	
				- TOR BED (Q3 2023)	90%	
		3. Upgrading Kilang Eksisting (RDMP) dan Industri Petrokimia Balongan				
		a. RDMP RU VI Balongan – Phase 1	Ramp Up & Normal Operasi	- Ramp Up & Normal Operasi (Q2 2023)	100%	
				- Performance Test (Q2 2023)	100%	

No	Unit	Proyek Strategis Nasional	Milestone yang dilaksanakan pada tahun 2023	Target yang Selesai di Tahun 2023	Progress Tahun 2023
				- Due Diligence (Q2 2023)	100%
				- Operational Acceptance (Q2 2023)	100%
		b. Petrochemical Jawa Barat (RDMP Balongan Phase-3)	JV (Joint Venture) Key Terms Agreement & Agreement Signing	- JV Key Terms Agreement & (Q4 2023)	95%
				- Agreement Signing (Q4 2023)	90%
		c. Polypropylene Balongan	PDP (Personal Development Plan) Development Sch B	- BEDP (Basic Education Design Package) Part B (Q2 2023)	100%
			DFC (Dual Feed Competition) Bidding	- FEED (Front End Engineering Design) Execution (Q2 2023)	95%
				- FID (Q3 2023)	50%
		d. Olefin Trans-Pacific Petrochemical Indotama	Dual Basic Design (DBC)	- BED + FEED Execution by 2 Contractor (Q3 2023)	100%
			Development of Engineering Estimate (EE)	- OE (Owner Estimate) (Q3 2023)	100%
			FID	- FID Prep. + Approval (Q4 2023)	96% (FID Prep.)
			EPC	- Prep. + Submission Comm. Proposal EPC (Q4 2023)	100%
				- Penetapan Pemenang (Q4 2023)	90%
				- Contract Alignment + Contract Award EPC (Q4 2023)	90%

No	Unit	Proyek Strategis Nasional	Milestone yang dilaksanakan pada tahun 2023	Target yang Selesai di Tahun 2023	Progress Tahun 2023
		4. Konstruksi Tanki Penyimpanan LPG Indonesia bagian Timur	EPC TLPB Bima dan Kupang	- EPC TLPB Bima selesai (Q2 2023) - EPC TLPB Kupang selesai (Q3 2023)	99,60% 63,05%
		5. Pengembangan Lapangan Abadi Wilayah Kerja Masela	Kajian <i>Feasibility Study</i> (FS)	Selesai FS (Q4 2023)	100%
		6. Pengembangan Lapangan Unitisasi Gas Jambaran-Tiung Biru	<i>On Stream</i> 100%	Project Acceptance (Q3 2023)	99,32%
		7. Pembangunan Jaringan Gas Kota	Pemasangan Jaringan Gas ke Rumah Tangga (Jargas Mandiri)	- Target Pemasangan Jargas 2023 sebanyak 400.000 SRT (Q4 2023)	72,00%
		8. Gasifikasi Batu Bara di Tanjung Enim*	<i>Contract Effective Date</i>	- <i>Contract Effective Date Target</i> (Q2 2023)	95%
		9. Pembangunan Bahan Bakar Hijau (<i>Green Diesel Bio Refinery Revamping</i> dan Hidrogenasi CPO RU IV Cilacap, <i>Green Refinery</i> RU III Plaju, Katalis Merah Putih Pupuk Kujang Cikampek)			
		a. <i>Green Refinery</i> Cilacap	Perizinan AMDAL (Analisis Dampak Lingkungan) dan TUKS (Terminal Untuk Kepentingan Sendiri)	- Perizinan AMDAL dan TUKS selesai (Q4 2023)	90%
			Penyusunan New BEDP	- Pekerjaan BEDP dan penyiapan Update FEED (Q4 2023)	100%
			Pre ID Demolish	- Evaluasi dan Persetujuan Pre ID (Q3 2023)	95%

No	Unit	Proyek Strategis Nasional	Milestone yang dilaksanakan pada tahun 2023	Target yang Selesai di Tahun 2023	Progress Tahun 2023
		b. <i>Green Refinery</i> RU III Plaju	<i>Feasibility Study</i> (FS) & FID	- FS & FID selesai (Q2 2023)	95%
		c. Hidrogenisasi CPO RU IV Cilacap	Pengadaan ISBL <i>Package Palm Oil Hydrotreating Demo Plant</i>	- Selesai ISBL <i>Demo Plant</i> Q4 2023	95%
		d. Katalis Merah Putih*	COD	- Peresmian dan <i>Commercial on Date</i> (Q4 2023)	100%
		PT PLN (PERSERO)			
		PEMBANGKIT			
		Program Infrastruktur Ketenagalistrikan			
		a. PLTU MT Meulaboh (Nagan Raya) #3 MT	Konstruksi	Juli	100,00%
		b. PLTBm Deli Serdang	Konstruksi	Juli	99,94%
		c. PLTP Sokoria (FTP-2)	Konstruksi	Juli	100,00%
		d. PLTU MT Sumsel-8	Konstruksi	September	100,00%
		e. PLTM Harjosari	Konstruksi	September	87,86%
		f. PLTM Bayu	Konstruksi	September	100,00%
		g. PLTM Besai Kemu	Konstruksi	Oktober	100,00%
		h. PLTU Lombok (FTP-2)	Konstruksi	November	81,74%
		i. PLTU Timor	Konstruksi	November	100,00%
		j. PLTU Sofifi	Konstruksi	November	99,07%
		k. PLTU MT Meulaboh (Nagan Raya) #4 MT	Konstruksi	Desember	100,00%
		l. PLTU MT Sumsel-1	Konstruksi	Desember	99,07%
		m. PLTM Cibuni	Konstruksi	Desember	100,00%
		n. PLTM Kanzy-1	Konstruksi	Desember	100,00%
		o. PLTA Peusangan 1	Konstruksi	Desember	93,96%

No	Unit	Proyek Strategis Nasional	Milestone yang dilaksanakan pada tahun 2023	Target yang Selesai di Tahun 2023	Progress Tahun 2023
		TRANSMISI			
		Program Infrastruktur Ketenagalistrikan			
		a. Bayah/Cemindo Gemilang-Malimping	Konstruksi	150 kV	100,00%
		b. Cawang Baru-Taman Rasuna	Pra-Konstruksi	150 kV	100,00%
		c. Suralaya-Peni	Konstruksi	150 kV	100,00%
		d. Cilegon-Mitsui-Peni	Konstruksi	150 kV	100,00%
		e. Depok II (GIS) – inc. Tx. Cimanggis-Rawadenok (Depok III)	Pra-Konstruksi	150 kV	100,00%
		f. Traksi Halim-Bekasi II / Pinggir Kali / Summarecon (sirkuit II)	Konstruksi	150 kV	100,00%
		g. Traksi Halim-Poncol Baru II (sirkuit II)	Konstruksi	150 kV	100,00%
		h. Kalisari-Surabaya Selatan	Konstruksi	150 kV	100,00%
		i. Kedinding-Tx. Bangkalan	Konstruksi	150 kV	100,00%
		j. Priok-Tx. Kemayoran	Pra-Konstruksi	150 kV	96,00%
		k. Muara Karang-Duri Kosambi	Konstruksi	500 kV	51,80%
		l. Muara Tawar-Inc. (Bekasi - Plumpang Kandang Sapi)	Konstruksi	150 kV	70,39%
		m. Traksi Padalarang Baru II / Ngamprah / Walini-Cirata	Konstruksi	150 kV	100,00%

No	Unit	Proyek Strategis Nasional	Milestone yang dilaksanakan pada tahun 2023	Target yang Selesai di Tahun 2023	Progress Tahun 2023
		n. Traksi Padalarang Baru II / Ngamprah / WaliniPadalarang Baru	Konstruksi	150 kV	100,00%
		o. Manna-Bintuhan	Konstruksi	150 kV	72,00%
		p. Muara Enim (tx)-Gumawang	Konstruksi	275 kV	89,30%
		q. Muara Enim-Muara Enim (tx) (incomer 1/arah lumut balai)	Konstruksi	275 kV	100,00%
		r. Muara Enim-Muara Enim (tx) (incomer 2/arah Gumawang)	Konstruksi	275 kV	43,84%
		s. Pendopo-Inc. 2 pi (Gn.Megang-Prabumulih)	Konstruksi	150 kV	100,00%
		t. Perbaungan-Kuala Namu	Pra-Konstruksi	150 kV	100,00%
		u. Likupang-Pandu	Pra-Konstruksi	150 kV	100,00%
		v. Namrole-Namlea	Pra-Konstruksi	70 kV	100,00%
		w. PLTU Sampit-Kuala Pambuang	RLB	150 kV	100,00%
		x. PLTU Sampit-Kuala Pambuang	Konstruksi	150 kV	100,00%
		y. Sangatta-Maloy	Pra-Konstruksi	150 kv	100,00%
		z. Bukuan - KFI	SLO	150 kv	100,00%
		aa. Rancaekek-Sunyaragi	Konstruksi	150 kV	96,00%
		bb. Tapan-Muko-Muko	Konstruksi	150 kV	100,00%

No	Unit	Proyek Strategis Nasional	Milestone yang dilaksanakan pada tahun 2023	Target yang Selesai di Tahun 2023	Progress Tahun 2023
		cc. Tawaeli-Talise 150 kV	Konstruksi	150 kV	100,00%
		dd. Traksi Karawang-Heksa / AUA / AMI / Taman Mekar	Konstruksi	150 kV	100,00%
		ee. Traksi Karawang-Jui Shin Indonesia	Konstruksi	150 kV	100,00%
		ff. Tolinggula-PLTU Anggrek	Konstruksi	150 kV	100,00%
		gg. Tx. Kesugihan-Gombong	Konstruksi	150 kV	100,00%
		GARDU INDUK			
		a. GI 150 kV Sinar Sahabat (60 MVA No. 2)	RLB	150/20	100,00%
		b. Muara Tawar	Konstruksi	150/20	100,00%
		c. Dayeuhkolot	Konstruksi	150/20	100,00%
		d. GITET 275 kV Nagan Raya (SF) 250 MVA No 1	RLB	275/150	100,00%
		e. Muko Muko	Konstruksi	150/20	100,00%
		f. Bintuhan	Konstruksi	150/20	93,91%
		g. GITET 275 kV Gumawang (250 MVA No. 1)	RLB	175/150	100,00%
		h. GITET 150 kV Kuala Pambuang (30 MVA No. 1)	RLB	150/20	100,00%
		i. GI 70 kV Namlea (New) 30 MVA	RLB	70/20	100,00%

No	Unit	Proyek Strategis Nasional	Milestone yang dilaksanakan pada tahun 2023	Target yang Selesai di Tahun 2023	Progress Tahun 2023
		j. Namrole	Konstruksi	70/20	100,00%
		k. Pandu	Konstruksi	150/20	100,00%
		l. GI 150 kV Pendo Extension	Konstruksi	150/20	100,00%
		m. Tawaeli	Konstruksi	150/20	100,00%
		n. Rengat	Konstruksi	150/20	100,00%
		o. Muara Enim	Konstruksi	500/275	100,00%
		p. Gumawang	Konstruksi	275/150	100,00%
		q. GI 150 kV Nanga Bulik (30 MVA No 1)	RLB	150/20	100,00%
		r. Maloy	Pra-Konstruksi	150/20	100,00%
		s. Bungah	Pra-Konstruksi	150/20	100,00%
		t. Tolinggula (30 MVA)	RLB	150/20	100,00%
		u. Muara Tawar	Konstruksi	500/150	100,00%
2	Asisten Deputi Bidang Mineral dan Batubara	1. Proyek Pengembangan Ekosistem EV Battery,	Pembentukan JV Smelter & Refinery untuk mendukung ekosistem EV Battery dengan mitra strategis Target : 100% (Desember 2023)	100% (Desember 2023)	100%
		2. FeNi Haltim	Pelaksanaan Commissioning Pabrik Feronikel Haltim	100% (Desember 2023)	100%

No	Unit	Proyek Strategis Nasional	Milestone yang dilaksanakan pada tahun 2023	Target yang Selesai di Tahun 2023	Progress Tahun 2023
3	Asisten Deputi Bidang Perkebunan dan Kehutanan	Program Revitalisasi Industri Gula Nasional dan Hilirisasi Industri Kelapa Sawit.	- Permohonan izin prakarsa PalmCo - Permohonan izin prakarsa SupportingCo - Penandatanganan kajian bersama - Penerbitan Peraturan Pemerintah tentang Penggabungan - Persetujuan perubahan anggaran dasar setelah Peraturan Pemerintah keluar - Persetujuan aksi korporasi terkait kemitraan strategis Sugar Co	Integrasi Grup PT Perkebunan Nusantara melalui pembentukan SugarCo, PalmCo, dan SupportingCo	100%
4	Asisten Deputi Bidang Industri Pangan dan Pupuk	Proyek Amurea - Papua Barat	Tahapan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2023 terkait Proyek Amurea – Papua Barat adalah sebagai berikut: - Finalisasi FS - Pembaharuan MOU Gas	Adapun tahapan yang direncanakan selesai pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut: - Finalisasi FS – Q1 2023 - Pembaharuan MOU Gas – Q1 2023	95%
5	Asisten Deputi Bidang Jasa Pariwisata dan Pendukung	1. KEK Sanur			100%
		a. Pembangunan Infrastruktur Dasar KEK Sanur		100%	100%
		b. Revitalisasi Hotel Tower, Garden, dan Convention Center KEK Sanur		100%	100%
		c. Pembangunan UMKM Center		100%	100%
		2. KEK Mandalika			
		a. Okupansi Lahan		100%	100%
		b. Investasi KEK Mandalika		100%	90,41%

No	Unit	Proyek Strategis Nasional	Milestone yang dilaksanakan pada tahun 2023	Target yang Selesai di Tahun 2023	Progress Tahun 2023
6	Asisten Deputi Bidang Jasa Infrastruktur	3. Investasi BUPP KEK Mandalika		100%	100%
		a. Progres Infrastruktur Zona Barat		100%	100%
		b. Progres Infrastruktur Zona Timur		100%	100%
		1. Bendungan Bener	Pembangunan bendungan di Purworejo, Jawa Tengah dengan kapasitas sebesar 100,94 meter kubik, dan diharapkan dapat mengairi lahan seluas 15.069 hektar.	100%	100%
		2. Bendungan Bagong	Pembangunan Bendungan di Kabupaten Trenggalek dengan kapasitas tampung 17,40 juta m3		80%
6	Asisten Deputi Bidang Jasa Infrastruktur	3. Bendungan Way Apu	Pembangunan bendungan di Maluku yang memiliki kapasitas daya tampung sebesar 50,05 juta m3	100%	80%
		4. Bendungan Manikin Paket II	Bangunan Pelimpah Terowongan morning glory atau Spillway Terowong, panjang 780 meter dengan diameter 5,8 meter, dan pekerjaan Spillway Tambahan. Selain itu, pembangunan Jalan Inspeksi, Inlet dan Outlet Pengelak atau Terowong Pengelak.	100%	61%
		5. Bendungan Tiu Suntuk Paket II	Pekerjaan Spillway dan jalan Inspeksi pada Bendungan Tiu Suntuk di NTB.	100%	100%

No	Unit	Proyek Strategis Nasional	Milestone yang dilaksanakan pada tahun 2023	Target yang Selesai di Tahun 2023	Progress Tahun 2023
		6. Program Pengembangan Kawasan Perbatasan - PLBN Long Nawang	Pembangunan kawasan di area 9 Ha meliputi bangunan utama, mess pegawai, masjid, lansekap, pos jaga, GWT, power house, selasar parkir, serta mekanikal elektrikal dan plumbing (MEP)	100%	100%
		7. Upgrading Kilang-Kilang Existing (RDMP)	Pembangunan peningkatan kapasitas pengolahan yang semula 260 KBPD menjadi 360 KBPD dengan peningkatan kualitas dari Euro II menjadi Euro V. Lingkupnya meliputi pembangunan New Workshop & Warehouse, Residual Fluid Catalytic Cracking (RFCC) Feed Tank, Boiler, New Flare BPP II, FCC & FCC NHT, dan Terminal Lawe-Lawe Facilities.	87,19%	87%

No	Unit	Proyek Strategis Nasional	Milestone yang dilaksanakan pada tahun 2023	Target yang Selesai di Tahun 2023	Progress Tahun 2023
		8. Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR)	Pembangunan SGAR berkapasitas 1 juta ton per tahun, meliputi: 1. Alumina Plant (403.257 m2) 2. Return Water Regulating Pond (40.510 m2) 3. Slag Stockyard (123.326 m2) 4. Mixed Bauxite Stockyard (123.326 m2) 5. Red Mud Stockyard (647.430 m2) 6. Intake Water System (779 m2) 7. Access Road (133.907 m2)	52,53%	53%
		9. Jalan Tol Jakarta Cikampek II Sisi Selatan sepanjang 62 km (Jatiasih - Sadang)	1. Pembangunan Paket III (Sadang - Sukabungah) sepanjang 31 km 2. Mulainya Pembangunan Paket II sepanjang 23 km (Sukabungah - Setu)	53,92%	100%
		10. Jalan Tol Yogyakarta-Bawen sepanjang 76 km	1. Pembangunan Seksi 1 (Yogyakarta-Banyurejo) sepanjang 8 km 2. Pembangunan Seksi 6 (Ambarawa-Bawen) sepanjang 5 km 3. Pembangunan Seksi 2-5 (Banyurejo-Temanggung) sepanjang 40 km	24,85%	40%
		11. Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi sepanjang 175 km	Pembangunan seksi Probolinggo-Besuki sepanjang 50 km	35,16%	26%

No	Unit	Proyek Strategis Nasional	Milestone yang dilaksanakan pada tahun 2023	Target yang Selesai di Tahun 2023	Progress Tahun 2023
		12. Jalan Tol Solo - Yogyakarta - YIA Kulonprogo sepanjang 96 km	1. Pembangunan Tahap 1 yaitu Kartasura-Purwomartani sepanjang 42km, Purwomartani-Maguwo sepanjang 3.6 km, dan Trihanggo-Sleman sepanjang 3.2 km 2. Pembangunan Tahap 2 yaitu Sleman Purworejo sepanjang 38 km	28,62%	29%
		13. Bendungan Jlantah (65%)	Pembangunan Bendungan	100%	23%
		14. Bendungan Bener Paket II (100%)	Pembangunan Bendungan	100%	46%
		15. Bendungan Rukoh	Pembangunan Bendungan	100%	69%
		16. Di Tapin	Pembangunan Irigasi	100%	100%
		17. Rentang Irrigation Modernization Project	Pembangunan Irigasi	99,76%	91%
		18. Bendungan Jragung Paket 1	Pembangunan Bendungan	50%	70%
		19. Kek Tanjung Lesung Paket I	Pembangunan Irigasi	100%	100%
		20. Pengaman Pantai DKI Jakarta Tahap 2, Paket 1 (60%)	Pembangunan Tanggul Pantai	100%	100%
		21. BANGUNAN PENGARAH BENDUNGAN RUKOH	Pembangunan Bendungan	100%	23%
		22. Jembatan Musi	Pembangunan Jembatan	100%	100%
		23. TEMEF PAKET 4 JOP65%	Pembangunan Bendungan	91,71%	100%
		24. TOL JAKARTA - CIKAMPEK II SISI SELATAN-INDUK	Jalan Tol dari Jakarta - Cikampek	100%	100%
		25. TOL JAKARTA - CIKAMPEK II SISI SELATAN-PERALATAN	Jalan Tol dari Jakarta - Cikampek	100%	100%

No	Unit	Proyek Strategis Nasional	Milestone yang dilaksanakan pada tahun 2023	Target yang Selesai di Tahun 2023	Progress Tahun 2023
		26. TOL CIMANGGIS - CIBITUNG SEKSI 2	Jalan Tol dari Cimanggis ke Cibitung	100%	100%
		27. TOL CIBITUNG - CILINCING SEKSI 2	Jalan Tol dari Cibitung ke Cilincing	100%	100%
		28. TOL CIAWI - SUKABUMI SEKSI 2	Jalan Tol dari Ciawi ke Sukabumi	100%	100%
		29. Pasuruan -Probolinggo Seksi 4	Jalan Tol dari Pasuruan ke Probolinggo	100%	100%
		30. Tol KAPB Paket II Seksi 2 PMN	Jalan Tol dari Kayu Agung Palembang Betung	100%	100%
		31. KAPB Paket II Seksi 3 PMN	Jalan Tol dari Kayu Agung Palembang Betung	100%	100%
		32. KAPB Paket IV Seksi 3 PMN	Jalan Tol dari Kayu Agung Palembang Betung	100%	100%
		33. KAPB Paket IV Seksi 3B PMN	Jalan Tol dari Kayu Agung Palembang Betung	100%	100%
		34. KAPB Paket IV Seksi 2A PMN	Jalan Tol dari Kayu Agung Palembang Betung	100%	100%
		35. Upgrading Inalum Smelter	Pembangunan smelter di Kuala Tanjung	100%	100%
		36.. SPAM Umbulan	Pembangunan Sistem Air Minum	80%	98%
		37. Penyelesaian Pembangunan Bendungan Keureuto (MYC)	-Jalan Inspeksi sisa pekerjaan 85,31% -Bangunan Fasilitas sisa pekerjaan 77,54% -Bendungan Utama sisa pekerjaan 70,93%	58%	59%

No	Unit	Proyek Strategis Nasional	Milestone yang dilaksanakan pada tahun 2023	Target yang Selesai di Tahun 2023	Progress Tahun 2023
		38. Bendungan Bener Paket 1	-Bangunan Pengelak Terowong sisa 132 m' -Bangunan Pengambilan sisa pekerjaan 1360 m3 -Hidromekanikal sisa pekerjaan 91%	89%	70%
		39. Bendungan Bener Paket 4	-Galian Maindam sisa pekerjaan 534.655 m3 -Jembatan overpass sisa pekerjaan 10,35% -Jalan Inspeksi sisa pekerjaan 2.020 m3	71%	18%
		40. Bendungan Sidan Lanjutan	-Bendungan Utama sisa pekerjaan 100% -Bangunan Spillway sisa pekerjaan 99,56% -Hidromekanikal sisa pekerjaan 100%	56,52%	51%
		41. Bendungan Bagong Paket 1	-Bendungan Utama sisa pekerjaan 96% rencana kerja 2023 sebesar 28% -Jalan Inspeksi	65,84%	80%

No	Unit	Proyek Strategis Nasional	Milestone yang dilaksanakan pada tahun 2023	Target yang Selesai di Tahun 2023	Progress Tahun 2023
		42. Bendungan Mbay	-Bangunan Pengelak sisa pekerjaan 60% -Bangunan Pelimpah sisa pekerjaan 99,9% rencana kerja 2023 sebesar 36% -Hidromekanikal sisa pekerjaan 100% rencana kerja 97%	34,91%	38%
		43. Bendungan Bulango Ulu Paket II	Diafragma Wall beton K-225 597 m3 ; Pengeboran secant pile 10.378 titik -Bangunan Pelimpah beton K-225 14.517 m3 -Escape Channel Beton K-225 20.765 m3	79,38%	60%
		44. Pelaksanaan Pembangunan Jalan Tol Ruas Sigli - Banda Aceh	Konstruksi Selesai	100%	100%
		45. Pembangunan Bendungan Rukoh Kabupaten Pidie Paket-2 (MYC)	Konstruksi Selesai	100%	100%
		46. Tol Cisumdawu Paket 5A	Konstruksi Selesai	100%	100%
		47. Tol Serang Panimbang	Pek tanah dan Rigid	100%	69%
		48. Pekerjaan Tanah Di Wilayah Utara / Cs Wur Earthwork Package 2	Konstruksi Selesai	100%	100%
		49. Proyek Pembangunan Pengaman Pantai di Pesisir Teluk Jakarta Tahap 6 Paket 3	Konstruksi Selesai	100%	42%

No	Unit	Proyek Strategis Nasional	Milestone yang dilaksanakan pada tahun 2023	Target yang Selesai di Tahun 2023	Progress Tahun 2023
		50. Pembangunan Bendungan Way Apu, Kab. Buru, Provinsi Maluku (Paket 01)	Pekerjaan Terowongan Pekerjaan Timb. Random Batu	95%	95%
		51. Pembangunan Bendungan Jlantah di Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah	Konstruksi Selesai	100%	100%
		52. Pembangunan Bendung Manikin di Kabupaten Kupang (Paket -1)	Pekerjaan Main Dam Bangunan Pengambil Pekerjaan Jalan	44%	41%
		53. Proyek Pembangunan Bendungan Bener Kabupaten Purworejo Paket 4 (MYC)	Pekerjaan Jalan Akses Pekerjaan Crest Dam Pekerjaan Cross Drain	45%	36%
		54. Bendungan Ameroro	Konstruksi Selesai	100%	100%
		55. Pek. Pembangunan Jalan Tol Solo - Yogyakarta - Nyia Kulon Progo Seksi 1 paket 1.1 : Solo - Klaten STA 0+000 - STA 22+300	Konstruksi Selesai	100%	81%
		56. Light Rail Transit (LRT) Terintegrasi di Wilayah Jabodetabek	Konstruksi Selesai	100%	100%

No	Unit	Proyek Strategis Nasional	Milestone yang dilaksanakan pada tahun 2023	Target yang Selesai di Tahun 2023	Progress Tahun 2023
		57. Jakarta Mass Rapid Transit Project (Phase 2) (I) Contract Package CP201 Underground Section-Civil 1	- Monast Station Structure work completed, Archi & MEP work ongoing - Monas Entarnc 1 Box Jacking Construction work - Thamrin station excavation & top down RC structure work (Slab, Column,etc) - Tunnel, TBM work Completed driving (BHI - Harmoni), exclude arrival portion at CP202 Harmoni south shaft.	55%	90%
		58. Jalur Ka Elevated Solo 104+900 Sd 106+900 Tahap li	- Pekerjaan Struktur Slab Onpile - Pekerjaan Jembatan Zona 1 - Pekerjaan Jembatan Zona 2	100%	100%
		59. Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan Seksi 4	- Penyelesaian pekerjaan tanah dan rigid pavement - Penyelesaian pekerjaan drainase - Penyelesaian Concrete Barrier - Penyelesaian Jembatan Penyebrangan Orang di STA 34+250 - Penyelesaian pekerjaan landscape - Penyelesaian Guardrail, Rambu, & Marka Jalan	100%	100%

No	Unit	Proyek Strategis Nasional	Milestone yang dilaksanakan pada tahun 2023	Target yang Selesai di Tahun 2023	Progress Tahun 2023
		60. Tol Serang-Panimbang Seksi 1 dan 2	- Penyelesaian pekerjaan tanah dan rigid pavement - Penyelesaian pekerjaan drainase - Penyelesaian pekerjaan landscape - Penyelesaian Guardrail, Rambu, & Marka Jalan	100%	69%
		61. Tol Pekanbaru – Padang	- Penyelesaian pekerjaan tanah dan rigid pavement - Penyelesaian pekerjaan drainase - Penyelesaian pekerjaan landscape - Penyelesaian Guardrail, Rambu, & Marka Jalan - Penyelesaian pekerjaan kantor & gerbang tol	100%	100%
		62. Tol Semarang-Demak (VGF)	- Pekerjaan Galian Biasa - Pekerjaan Matras Bambu - Pekerjaan Kelompok Cerucuk Bambu - Pekerjaan Struktur Beton - Pekerjaan Tiang Pancang	37%	37%
		63. Pembangunan Pengaman Pantai di Pesisir Teluk Jakarta Tahap 6 Paket 4	Pekerjaan struktur pengaman ombak	30%	42%
		64.Tol Medan - Binjai	Sudah Beroperasi	100%	100%
		65.Tol Palembang - Indralaya	Sudah Beroperasi	100%	100%
		66.Tol Bakauheni - Terbanggi Besar	Sudah Beroperasi	100%	100%

No	Unit	Proyek Strategis Nasional	Milestone yang dilaksanakan pada tahun 2023	Target yang Selesai di Tahun 2023	Progress Tahun 2023
		67.Tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang-Kayu Agung	Sudah Beroperasi	100%	100%
		68.Tol Pekanbaru - Dumai	Sudah Beroperasi	100%	100%
		69. Tol Kisaran - Indrapura	Penyelesaian konstruksi sampai pelaksanaan PHO	100%	95%
		70. Tol Pekanbaru - Bangkinang	Sudah Beroperasi STA 9 - 40; tahun 2023 menyelesaikan konstruksi STA 0 - 9	100%	100%
		71. Tol Bangkinang - Pangkalan	Penyelesaian konstruksi sampai pelaksanaan PHO	100%	98%
		72. Tol Padang - Sicincin	Penyelesaian Konstruksi ekuivalen km terbangun 8,8 km	71%	49%
		73. Tol Binjai - Langsa	Penyelesaian konstruksi sampai pelaksanaan PHO	100%	92%
		74. Tol Sigli - Banda Aceh	Sudah Beroperasi Seksi 2, 3, 4; tahun 2023 menyelesaikan konstruksi seksi 1, 5, 6	100%	88%
		75. Tol Indralaya - Prabumulih	Penyelesaian konstruksi sampai pelaksanaan PHO	100%	100%
		76.Tol Bengkulu - Taba Penanjung	Sudah Beroperasi	100%	100%
7	Asisten Deputi Bidang Jasa Logistik	1. Makassar New Port	Kelanjutan Pembangunan Terminal Makassar New Port Tahap 1B dan 1C termasuk fasilitas pendukung pelabuhan (Pekerjaan Mekanikal Elektrikal, eRTG Crane, Infrastruktur IT, Main Gate	100% Realisasi 2022 (Kumulatif): 93,50% Target di 2023: 6,5%	100%

No	Unit	Proyek Strategis Nasional	Milestone yang dilaksanakan pada tahun 2023	Target yang Selesai di Tahun 2023	Progress Tahun 2023
		2. Pengembangan Pelabuhan Terminal Kijing	Kelanjutan Relokasi Jalan Nasional Ruas Sei Duri-Mempawah	100% Realisasi 2022 "Terminal Tahap Inisial" (Kumulatif): 100% Realisasi 2022 "Relokasi Jalan Nasional" (Kumulatif): 17,56% Target di 2023: 82,44%	36,01%
		3. Pengembangan Pelabuhan Benoa (Bali Maritime Tourism Hub)	- Pekerjaan Lanjutan Pengembangan Pelabuhan Benoa (Reventment & Retaining Wall Dumping II); - Penyiapan Lahan Bali Tenten, Dermaga Cruise Timur 160 m, Taman Segara Kerthi); - Pengerukan Alur dan Kolam Pelabuhan Benoa (Paket A dan Paket B)	97%, Realisasi 2022 (Kumulatif): 33,55% Target di 2023: 63,45% Target Penyelesaian: Tahun 2024	79%
		4. Pengembangan Pelabuhan Sorong dan Arar	- Pelaksanaan Pra Konstruksi (Penyesuaian layout, spesifikasi teknis, finalisasi desain & pelaksanaan lelang); - Pekerjaan Penyempurnaan dan Perkerasan Container Yard (CY	36%, Realisasi 2022 (Kumulatif): 14,02% Target di 2023: 21,98% Target Penyelesaian: Tahun 2024	14,02% (Pelaksanaan Pengadaan Kontraktor)

No	Unit	Proyek Strategis Nasional	Milestone yang dilaksanakan pada tahun 2023	Target yang Selesai di Tahun 2023	Progress Tahun 2023
		PT KAI 5. High Speed Railway Jakarta-Bandung (KCJB)	Penyelesaian pekerjaan konstruksi, pemenuhan pendanaan cost overrun, test and commissioning, dan dimulainya Commercial Operation Date pada 1 Juli 2023	100% Realisasi 2022 (Kumulatif): 83,18% Target di 2023: 16,82%	100%
		6. Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/Light Rail Transit (LRT) Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi.	Penyelesaian progres fisik, realisasi/penyerapan investasi, penyelesaian test and commissioning GOA3 (sistem integrasi) dan dimulainya Commercial Operation Date pada 1 Juli 2023	100% Realisasi 2022 (Kumulatif): 88,07% Target di 2023: 11,93%	100%

No	Unit	Proyek Strategis Nasional	Milestone yang dilaksanakan pada tahun 2023	Target yang Selesai di Tahun 2023	Progress Tahun 2023
		PT ASDP 7. Kawasan Terintegrasi Bakauheni	- DED, Basic Design dan Kajian (Landmark BHC, Dermaga Wisata dan Sea Food Culinary, Skywalk Penghubung TEB- Krakatau Park-Siger Cultural Park, Sport Center dan Parkir Area Masjid BSI, Basic Design & Kajian (Ekonomi dan Bisnis) : Jembatan & Flyover Kawasan BHC). - Pembangunan Fisik (Jalan Dalam Kawasan, Area Parkir Dalam Kawasan Distrik 1, Dermaga Wisata dan Sea Food Culinary, Pengadaan Energi Kelistrikan (include penyambungan, bangunan dan kabel), Museum Siger (Renovasi Tahap 2), Skywalk & Koridor Penghubung TEB-Krakatau Park-Siger Cultural Park, Sport Center Siger)	39% Realisasi 2022 (Kumulatif): 20% Target di 2023: 19% Target Penyelesaian: Tahun 2027 (Ultimate)	34%
Rata-Rata					91,88%



KEMENTERIAN
BADAN USAHA
MILIK NEGARA
REPUBLIK
INDONESIA